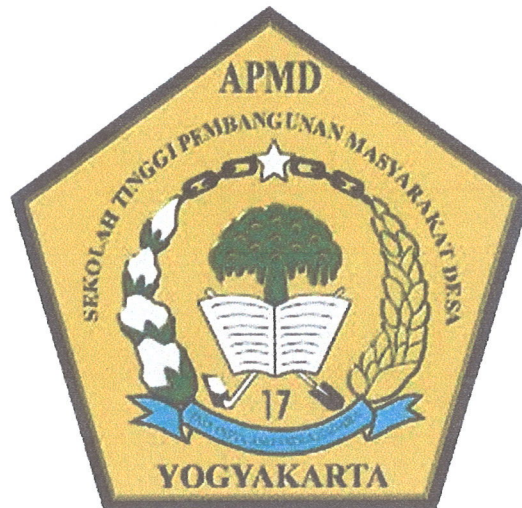


## **SKRIPSI**

### **STRATEGI PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI**

(Studi pada Kelompok Tani Kalurahan Pacarejo, Kapanewon Semanu, Kabupaten  
Gunungkidul, Yogyakarta)

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Jenjang Strata Satu (S1)  
Program Studi Ilmu Pemerintahan



Disusun oleh:

**INDAH MARLIAN GLORIA KONDA TANA**

**NIM: 21520154**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”  
YOGYAKARTA**

**2025**



**STRATEGI PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PEMBERDAYAAN  
KELOMPOK TANI**

(Studi pada Kelompok Tani Kalurahan Pacarejo, Kapanewon Semanu, Kabupaten  
Gunungkidul, Yogyakarta)

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Jenjang  
Strata Satu (S1)  
Program Studi Ilmu Pemerintahan



Disusun Oleh:

**INDAH MARLIAN GLORIA KONDA TANA**

**21520154**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT  
DESA “APMD” YOGYAKARTA**

**2025**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan tim penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta Pada:



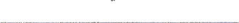
Hari : Rabu

Tanggal : 6 Agustus 2025

Jam : 08.30 s.d Selesai

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD”APMD” Yogyakarta

### TIM PENGUJI

	NAMA	TANDA TANGAN
1.	<b><u>Dr. Rumsari Hadi Sumarto, S.IP., MPA.</u></b> Ketua Penguji/Pembimbing	
2.	<b><u>Dra. B Hari Saptaning Tyas, M.Si</u></b> Penguji Samping I	
3.	<b><u>Dr. Rijel Samaloisa</u></b> Penguji Samping II	

### Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

  
**Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indah Marlian Gloria Konda Tana

NIM : 21520154

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Strategi Pemerintah Kalurahan dalam Pemberdayaan Kelompok Tani (Studi pada Kelompok Tani Kalurahan Pacarejo, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta)”** adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan sesuai aslinya. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 6 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan



**Indah Marlian Gloria Konda Tana**

**21520154**

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMI

Yang bertanda tangan bawah ini, saya :

Nama Lengkap : Indah Marlian Gloria Konda Tana  
NIM : 21520154  
Telp : 082235282337  
Email : indahgloria04@gmail.com  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi Pembangunan  
Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta

Dengan ini **memberikan ijin dan hak kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta** untuk menyimpan, mengalih-media atau memformat-kan, mengelola dalam pangkalan data (database), mendistribusikan dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“Strategi Pemerintah Kalurahan dalam Pemberdayaan Kelompok Tani (Studi pada Kelompok Tani Kalurahan Pacarejo, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta)”**

Ijin dan hak sebagaimana tersebut di atas termasuk juga **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif** (*Non-exclusive Royalti-Free Right*)

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi apabila dikemudian hari timbul segala bentuk tuntutan hukum atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 6 Agustus 2025

Ya  ataan

Indah Marlian Gloria Konda Tana

Nim. 21520154

## **MOTTO**

**“ Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi TUHANlah yang menentukan arah langkahnya”**

**(Amsal 16: 9)**

**“Dan segala sesuatu yang kamu lakukan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita”**

**(Kolose 3:17)**

**“Saya tidak sampai di titik ini sendirian setiap pencapaian adalah hasil dari doa, cinta, dan pengorbanan orang-orang yang percaya kepada saya. Terima kasih dari hati”**

**(Penulis)**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkatnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak memperoleh bimbingan, semangat dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepantasnya pada kesempatan ini penulis akan menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dengan segala kerendahan hati, ucapan syukur saya kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas izin dan karunia-Nya maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya.
2. Terima kasih untuk kedua orang tua tercinta saya Bapak Adrianto Konda Tana dan Ibu Sarah Lemba Peka Amah yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan saya dan keberhasilan dalam penulisan skripsi ini, ucapan terima kasih saya tak akan pernah cukup untuk membalas segala kebaikan kalian.
3. Terima kasih juga untuk kakak laki-laki saya Aswinto Irvan Konda Tana dan adik-adik saya, Vanessa Joycelin Konda Tana, Aurelya Corlina May Panggadi, Wilson Umbu Tamu Hunga Hamba Wali, dan Carlene Grantlovenia Rambu Halanda, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, keceriaan serta doa yang kalian panjatkan untuk keberhasilan ini, cinta dan kasih sayang kalian telah memberikan saya semangat yang menggebu, terima kasih dan sayangku untuk kalian.

4. Terima kasih juga untuk dosen pembimbing saya Dr. Rumsari Hadi Sumarto, S.IP., MPA, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya serta memberikan bimbingan dan pelajaran agar saya tetap semangat. Terima kasih selalu tulus membantu dalam penulisan skripsi saya dan semoga menjadi ilmu yang sangat bermanfaat



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan karunia-nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Strategi Pemerintah Kalurahan dalam Pemberdayaan Kelompok Tani (Studi pada Kelompok Tani Kalurahan Pacarejo, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta)” ini tepat pada waktunya. Skripsi ini merupakan salah satu syarat akademik untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, baik itu dalam pengalaman dan ilmu pengetahuan serta wawasan dalam berfikir dan menulis. Maka dari itu, apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan dimohon untuk kritik dan sarannya. Penulis juga menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Rumsari Hadi Sumarto, S.IP., MPA selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan, memberikan kritik, saran dan pengarahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Tri Nugroho Emanuel Widayat selaku Dosen Wali yang telah

memberikan bimbingan dan bantuan selama penulis menempuh studi di Program Studi Ilmu Pemerintahan.

4. Penguji I

5. Penguji II

6. Bapak/Ibu dosen, serta segenap karyawan Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.

7. Pemerintahan Kalurahan Pacarejo, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, dan seluruh masyarakat Kalurahan Pacarejo yang telah memberikan izin, ruang, tempat, waktu, dan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Terima kasih saya ucapkan kepada para sepupu saya yang berada di Yogyakarta maupun yang di Sumba. Terima kasih sudah menjadi teman, sahabat, dan saudara yang selalu membawa keceriaan. Mengambil banyak peran penting dibalik proses saya dan selalu ada di saat susah maupun senang. Semoga impian dan harapan kita dapat terwujud.

9. Terima kasih juga untuk seluruh teman-teman yang tidak bisa saya tuliskan satu per satu, yang selalu ada untuk saya disaat suka maupun duka yang sudah kita lalui bersama-sama. Semangat dari kalian sangat berharga bagi saya.

10. Terima kasih juga untuk Brosist di CG mahasiswa, Sisters di center dan jemaat GKB Kabar Baik Yogyakarta yang telah memberikan dukungan doa, semangat, dan kasih yang tulus selama proses penyusunan skripsi ini. Doa dan perhatian dari kalian menjadi penguatan yang berarti bagi saya

dalam menjalani setiap tahapan studi hingga penyusunan skripsi ini.

Sebagai penutup, penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Strategi Pemerintah Kelurahan dalam Pemberdayaan Kelompok Tani. Penulis juga berharap hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan inspirasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik di kalangan akademisi, praktisi, maupun masyarakat umum, dalam memahami pentingnya Strategi Pemerintah Kelurahan dalam Pemberdayaan Kelompok Tani. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-nya kepada kita semua.

Yogyakarta, 6 Agustus 2025

Penulis

Indah Marlian Gloria Konda Tana

Nim. 21520154

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR BAGAN.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
INTISARI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Fokus Penelitian.....	6
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Literatur review.....	8
G. Kerangka Konseptual.....	19
1. Strategi .....	19
2. Pemerintah Kalurahan.....	23
3. Pemberdayaan Masyarakat .....	26
H. Metode Penelitian .....	32
1. Jenis Penelitian.....	32
2. Unit Analisis.....	34
3. Teknik Pengumpulan Data .....	36
4. Teknik Analisis Data .....	38

BAB II PROFIL KALURAHAN PACAREJO, KAPANEWON SEMANU, KABUPATEN GUNUNGKIDUL.....	41
A. Sejarah Kalurahan.....	41
B. Visi dan Misi Kalurahan .....	45
C. Kondisi Geografis .....	46
D. Kondisi Demografis .....	49
E. Kondisi Ekonomi .....	56
F. Sarana dan Prasarana .....	57
G. Kondisi Sosial dan Budaya .....	60
H. Struktur Pemerintah Kalurahan.....	63
I. Gambaran Umum Kelompok Tani .....	73
BAB III ANALISIS STRATEGI PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI.....	78
A. Strategi Pemerintah dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Kalurahan Pacarejo	80
1. Strategi Agresif .....	80
2. Strategi Defensif .....	86
3. Strategi Kompetitif.....	93
4. Strategi Inovatif .....	100
5. Strategi Preventif .....	105
B. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Kelompok Tani di Kalurahan Pacarejo .....	112
BAB IV PENUTUP .....	117
A. Kesimpulan .....	117
B. Saran .....	117
DAFTAR PUSTAKA .....	119

## DAFTAR TABEL

Table 1.1 Data Informan .....	35
Table 2.1 Data Lurah Kalurahan Pacarejo dari Tahun ke Tahun.....	45
Table 2.2 Batas-batas Wilayah di Kalurahan Pacarejo .....	47
Table 2.3 Jumlah Penduduk .....	50
Table 2.4 Jumlah Penduduk Menurut Golongan Usia .....	51
Table 2.5 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	52
Table 2.6 Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan .....	54
Table 2.7 Jumlah Penduduk Menurut Agama.....	55
Tabel 2.8 Struktur Organisasi Gapoktan Sembada di Kalurahan Pacarejo.....	75

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Kalurahan Pacarejo.....	49
-----------------------------------------	----

## **DAFTAR BAGAN**

Bagan 2. 1 Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Pacarejo.....	63
-------------------------------------------------------------------	----



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Surat Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 Surat Tugas

Lampiran 3 Surat Permohonan Izin Penelitian

Lampiran 4 Surat Izin Penelitian

Lampiran 5 Interview Guide (Panduan Wawancara)

Lampiran 6 Foto-foto di Lokasi Penelitian

## INTISARI

Pemberdayaan Kelompok Tani Di Kalurahan Pacarejo masih menghadapi berbagai masalah dalam pelaksanaannya. Salah satu masalahnya adalah kurangnya keterampilan petani dalam mengolah lahan dan hasil panen, serta rendahnya partisipasi petani dalam program pemberdayaan dan lemahnya pemasaran hasil pertanian. Mengingat sebagian penduduk bekerja di sektor pertanian, keberhasilan di sektor ini berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat tani. Oleh karena itu diperlukan strategi dari Pemerintah Kalurahan untuk mendorong kemandirian petani dengan meningkatkan keterampilan, pengetahuan serta akses mereka terhadap peluang produksi dan pemasaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji strategi Pemerintah Kalurahan Pacarejo dalam pemberdayaan kelompok tani.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi informan meliputi Lurah Pacarejo, Penyuluh Pertanian (PPL) Kapanewon Semanu, ketua kelompok tani dan anggotanya. Data yang diperoleh dianalisis dengan tahapan reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Metode ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang strategi Pemerintah Kalurahan dalam pemberdayaan kelompok tani.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kalurahan Pacarejo telah menerapkan berbagai strategi pemberdayaan kelompok tani. 1) strategi agresif dalam peningkatan produktivitas pertanian melalui bantuan sarana-prasarana. 2) strategi defensif dengan penguatan kelembagaan kelompok tani. 3) strategi kompetitif untuk memperluas akses permodalan dan pemasaran hasil tani. 4) strategi inovatif untuk memperluas akses permodalan dan pemasaran hasil tani. 5) strategi prefentif melalui pemanfaatan teknologi pertanian modern. Strategi ini meliputi pelatihan, pendampingan langsung kepada petani, penyediaan alat pertanian dan benih, penguatan struktur dan peran kelembagaan petani, serta perluasan akses pasar bagi produk pertanian mereka. Semua langkah ini dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan, serta disesuaikan dengan kebutuhan spesifik kelompok tani di wilayah kalurahan. Selain itu, Pemerintah Kalurahan Pacarejo terus berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja petani melalui kemitraan dengan Penyuluh Pertanian dan instansi terkait di bidang pertanian. Pelaksanaan strategi pemberdayaan di Kalurahan Pacarejo telah menunjukkan hasil yang cukup efektif berkat budaya gotong royong, dan keterlibatan aktif Pemerintah Kalurahan. Namun, pelaksanaan strategi pemberdayaan ini masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain terbatasnya akses terhadap sarana pertanian modern, rendahnya pengetahuan petani tentang teknologi dan pemasaran, serta distribusi dukungan dan dukungan informasi yang belum merata di wilayah tersebut.

**Kata kunci: Strategi, Pemerintah Kalurahan, Pemberdayaan Kelompok Tani.**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sektor pertanian mempunyai peran penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi bangsa, terutama sebagai pemasok kebutuhan pangan bagi masyarakat Indonesia. Sektor pertanian turut berkontribusi dalam meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat, terutama untuk kelompok tani. Peran strategis sektor pertanian semakin di tegaskan kontribusinya yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan sosial, khususnya bagi masyarakat petani sebagai produsen pangan utama. Oleh karena itu, keberlanjutan dan kemajuan sektor pertanian bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan strategis yang mendasar bagi ketahanan nasional dan kesejahteraan sosial seluruh bangsa. Namun, kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa sektor pertanian yang ironisnya memegang peranan krusial dalam penghidupan negara kerap terhambat oleh beberapa permasalahan mendasar yang saling berkaitan.

Permasalahan yang sering terjadi di dalam sektor pertanian yaitu kurangnya ketersediaan pupuk, peralatan pertanian yang belum memadai, dan kurangnya pengetahuan para petani untuk mengolah lahan pertanian. Kelemahan lain yang menghambat kemajuan sektor pertanian meliputi masalah yang terkait dengan umumnya ukuran lahan pertanian yang kecil, kesulitan dalam mengakses modal kerja, kurangnya peningkatan keahlian petani, penggunaan teknologi yang sudah ketinggalan zaman dan integrasi akses pasar yang belum optimal (Batubara, 2023).

kendala-kendala ini tidak hanya membatasi kemampuan petani untuk meningkatkan hasil panen dan pendapatan mereka, tetapi juga membahayakan masa depan sektor pertanian dan pasokan pangan nasional. Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif tentang akar penyebab permasalahan ini sangat penting untuk mengembangkan strategi dan langkah-langkah yang efektif untuk mendorong pembaharuan, peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani Indonesia.

Oleh sebab itu, persoalan yang terdapat dalam sektor pertanian merupakan bagian dari hal yang harus diselesaikan oleh pemerintah desa. Hal tersebut merupakan upaya untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam sektor pertanian. Pemberdayaan petani melalui kelembagaan kelompok tani adalah suatu cara pemberdayaan masyarakat untuk memungkinkan mereka dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Asosiasi petani dibangun atas dasar kepentingan, sumber daya, dan hubungan baik antar petani, serta dipimpin oleh orang yang mereka percaya. Organisasi ini memiliki kontribusi kelembagaan yang penting di wilayah pedesaan, mereka membantu dan melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai kemajuan pertanian (Grathiano, 2023). Mengingat kelompok tani mampu mengatasi berbagai kegiatan dan permasalahan pertanian bersama-sama, mereka juga berfungsi sebagai wadah penting bagi petani untuk belajar berorganisasi dan bekerja sama, sehingga memainkan peran krusial dalam kehidupan masyarakat tani (Bili, 2022).

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kelompok tani, pemerintah desa memiliki peranan yang penting untuk menyusun strategi dan

menyediakan layanan demi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa memiliki otoritas untuk mengatur desa dan mempunyai otoritas untuk mengatur kehidupan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa adalah bagian wilayah yang diakui secara resmi oleh negara yang dapat mengelola dan menjalankan urusan internalnya sendiri sesuai dengan hukum adat. Undang-undang desa dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memperkuat pemerintah desa dan mendorong pembangunan desa. Pemerintah desa merupakan salah satu unsur birokrasi negara yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintah sesuai dengan karakteristik desa masing-masing. Pemerintah desa diminta untuk memberi layanan dan melakukan pemberdayaan, sehingga masyarakat desa bisa terlibat dalam pembangunan Desa.

Pemberdayaan sendiri merupakan suatu proses yang membawa masyarakat menjadi berdaya, artinya bahwa dengan adanya pemberdayaan ini dapat menjadikan masyarakat lebih mandiri, kuat dan juga mampu mencapai tujuan pembangunan sosial dan ekonomi. Terlebih bagi masyarakat desa yang mata pencahariannya sebagai petani yang tidak memiliki kemampuan di sektor lain dan memiliki jenjang pendidikan yang masih minim. Dengan adanya pemberdayaan dan pembinaan dari pemerintah, petani dapat mengembangkan kemampuan dan kemandiriannya di desa tersebut. Dalam melaksanakan pemberdayaan pada sektor pertanian, pemerintah desa membentuk kelompok tani. Dengan adanya kelompok tani, pembinaan dan pengawasan dari pemerintah bisa lebih terstruktur. Untuk memastikan keberhasilan pemberdayaan masyarakat khususnya pemberdayaan

kelompok tani sangat memerlukan partisipasi pemerintah dan aparat desa. Pemerintah desa mempunyai hak untuk mengatur urusan masyarakat atau pemerintah desa berperan aktif dalam memberikan pendampingan untuk memberikan pengetahuan, sikap, perilaku, kesadaran untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada, meningkatkan potensi yang ada dan melindungi kelompok tani dengan membimbing dan membentuk perilaku masyarakat melalui pemanfaatan potensi yang ada. Petani adalah pelaku utama yang perlu ditingkatkan kapasitasnya. Strategi untuk memberdayakan petani perlu disusun secara optimal dengan cara melibatkan masyarakat petani secara efisien agar pemberdayaan bisa tepat pada target (petani) agar dapat meningkatkan kemampuan personal yang ada.

Menurut Peraturan Kementerian Pertanian No. 82 Tahun 2013 tentang pembinaan kelompok tani dan gabungan kelompok tani, kelompok tani merupakan kumpulan petani, peternak, pekebun yang dibentuk atas dasar kepentingan yang sama, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Perlunya Pemberdayaan kelompok tani sangat penting karena keberadaan kelompok tani belakangan ini, terutama sejak era otonomi daerah, perhatian pemerintah terhadap kelompok tani sangat kurang. Bahkan cenderung diabaikan sehingga kelompok tani yang seharusnya adalah aset yang sangat berharga untuk mendukung pembangunan belum berfungsi dengan baik (Wibowo, 2020). Strategi pemberdayaan kelompok tani diperlukan karena sejak otonomi daerah perhatian pemerintah terhadap kelompok tani cenderung berkurang, sehingga potensi besar kelompok tani sebagai aset pembangunan pertanian belum dimanfaatkan secara

optimal. Melalui strategi yang terarah, kelembagaan kelompok tani dapat difungsikan secara maksimal untuk meningkatkan keberdayaan petani, mengatasi tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta memastikan program pembangunan sektor pertanian berjalan, berkelanjutan dan berdampak nyata pada peningkatan kualitas hidup petani.

Menurut hasil observasi peneliti, di Kalurahan Pacarejo, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Sekitar 2.101 hektare (Ha) dari wilayahnya termasuk lahan persawahan dan ladang serta 4.238 kepala keluarga yang memiliki lahan pertanian dan bekerja sebagai petani. Sebelum ada kelompok tani, hasil yang didapatkan oleh para petani kurang maksimal. Banyak kendala mulai dari bidang alat pertanian, karena alat pertanian cuma seadanya. Setelah adanya kelompok tani, hasil tani memang ada peningkatan, namun dampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat masih jauh dari harapan. Faktor lain yang menghambat petani untuk menjadi berdaya yaitu, kurangnya pengetahuan dan ketrampilan petani dalam mengelola lahan dan hasil pertanian. Ketidapahaman ini berakibat pada praktik pertanian yang kurang optimal, penggunaan pestisida yang kurang tepat, dan terbatasnya pemanfaatan teknologi pertanian modern yang berpotensi meningkatkan produktivitas. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) petani melalui program penyuluhan dan pendidikan pertanian yang dilakukan pemerintah. Berdasarkan pemaparan strategi pemerintah kalurahan sangat penting karena dapat mengungkap apakah pemerintah sudah bertindak secara terarah dan efektif dalam memberdayakan kelompok tani. Maka

dari itu, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana strategi pemerintah dalam pemberdayaan kelompok tani di Kalurahan Pacarejo.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep *governing*. *Governing* adalah serangkaian tindakan dan kegiatan pemerintah untuk menjalankan fungsi pemerintah, yang merupakan dasar penting dalam proses pemberdayaan. Inti dari konsep *governing* dalam sektor pertanian adalah bagaimana pemerintah mengelola dan memajukan sektor pertanian untuk mencapai tujuan ekonomi, sosial dan lingkungan yang menyeluruh. Tata kelola pemerintah yang baik dapat menciptakan kondisi ideal bagi pertumbuhan pertanian berkelanjutan dan kesejahteraan petani.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana Strategi-strategi Pemerintah dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Kalurahan Pacarejo, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta.?

## **C. Fokus Penelitian**

Dengan mengacu pada rumusan masalah yang dijelaskan sebelumnya, bagian ini mengidentifikasi dan menjelaskan fokus penelitian utama, yang ingin dijawab oleh penelitian ini.

1. Strategi agresif Pemerintah Kalurahan dalam Pemberdayaan Kelompok Tani
2. Strategi defensif Pemerintah Kalurahan dalam Pemberdayaan Kelompok Tani
3. Strategi kompetitif Pemerintah Kalurahan dalam Pemberdayaan Kelompok Tani
4. Strategi inovatif Pemerintah Kalurahan dalam Pemberdayaan Kelompok Tani



5. Strategi preventif Pemerintah Kalurahan dalam Pemberdayaan Kelompok Tani
6. Faktor – faktor yang mendukung dan menghambat strategi pemerintah kalurahan dalam pemberdayaan kelompok tani.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu:

1. Untuk mengidentifikasi strategi-strategi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan dalam pemberdayaan kelompok tani di Kalurahan Pacarejo, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat strategi pemerintah kalurahan dalam memberdayakan kelompok tani.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat teoritis dan praktis yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini bertujuan untuk menjadi landasan akademis yang relevan bagi penelitian lebih lanjut tentang strategi pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat, serta menjadi referensi penting bagi para peneliti dan pihak lain yang berminat pada topik ini.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Anggota masyarakat di Kalurahan Pacarejo, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta dan sekitarnya dapat memperoleh manfaat dari penelitian ini melalui investigasi menyeluruh terhadap praktik-praktik pemerintah dalam memberdayakan kelompok tani.

- b. Memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat dan mendorong partisipasi dan inisiatif masyarakat dalam pembangunan desa melalui mekanisme pemberdayaan kelompok tani.

#### **F. Literatur review**

*Literature review* merupakan unsur mendasar dalam struktur penelitian ilmiah, bagian ini secara sistematis menyajikan tinjauan komprehensif dan analisis kritis dari berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian (Mahanum, 2021)

Sebagai landasan teori, peneliti menggunakan berbagai jurnal untuk memperdalam pemahaman tentang kegiatan dan upaya pemerintah dalam pemberdayaan kelompok tani, walaupun fokus penelitian ini berbeda dengan beberapa topik dalam literatur.

1. “Strategi Pemerintah dalam Pemberdayaan Kelompok Tani” merupakan artikel jurnal yang ditulis oleh Yohanis Polce Lio (2022) dalam J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi strategi yang diterapkan oleh pemerintah desa untuk memberdayakan masyarakat, khususnya kelompok tani di desa Mautenda, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan artikel, dengan informan dipilih secara acak. Analisis data dilakukan melalui reduksi data dan inferensi, serta penggunaan teknik triangulasi untuk menjaga keabsahan data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan upaya pemberdayaan kelompok tani, Pemerintah Desa Mautenda menciptakan

suasana pengembangan potensi desa dengan melakukan penyuluhan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman kelompok tani sehingga mereka dapat mengembangkan potensi yang ada, meningkatkan kinerja kelompok tani dengan memperkuat potensi internal mereka dan melindungi mereka dari berbagai bentuk persaingan melalui pemantauan dan sosialisasi. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok tani. Penelitian ini mengidentifikasi sejumlah tindakan pemerintah desa. Namun, analisis yang lebih komprehensif tentang mekanisme implementasi spesifik setiap strategi, tingkat efektivitasnya dalam mencapai tujuan pemberdayaan faktor kontingensi yang mendorong atau menghambat keberhasilan implementasinya tidak disajikan secara rinci. Secara keseluruhan penelitian ini memberikan gambaran awal yang baik tentang pemerintah desa untuk memberdayakan kelompok tani di desa Mautenda. Akan tetapi, untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif, penelitian lebih lanjut dapat memperluas analisis untuk mencakup implementasi strategi, perspektif kelompok tani, identifikasi hambatan, peran aktor lain, dan indikator keberhasilan pemberdayaan.

2. “Strategi Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Sungai Segak Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang” merupakan artikel jurnal yang ditulis oleh Antonius (2024) dalam FOKUS; Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Penelitian ini didasari oleh pentingnya peran pemerintahan desa sebagai pemimpin dalam pemerintahan yang berhubungan langsung dengan

masyarakat, terutama dalam upaya mewujudkan pembangunan di berbagai bidang. Mengingat sebagian besar masyarakat desa Sungai Segak berprofesi sebagai petani dan memiliki kondisi geografis yang ideal untuk pertanian, maka penelitian ini sangat penting untuk mengembangkan potensi lokal yang ada. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian ini menyoroti adanya permasalahan di tingkat desa dalam penerapan regulasi atau inisiatif pemberdayaan petani. Kurangnya kemandirian yang dihadapi mayoritas kelompok tani disebabkan karena ketidaksetaraan atau efisiensi dalam penyaluran bantuan dan sumber daya manusia. Kompetensi petani berpengaruh besar terhadap pemberdayaan. Rencana pemberdayaan yang efektif harus secara khusus mempertimbangkan dukungan dari pemerintah desa sambil menjelaskan kemampuan internal kelompok tani. Strategi pemerintah desa untuk memberdayakan masyarakat petani di desa Sungai Segak tampaknya belum efektif dan tidak mengalami kemajuan. Penelitian ini mengungkapkan adanya kelompok petani di desa yang kurang mendapat perhatian dan dukungan dari pemerintah desa. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa selain faktor pemerintah, sumber daya manusia juga berperan penting.

Temuan menunjukkan adanya masalah dalam pelaksanaan kebijakan atau program pemberdayaan petani di tingkat desa. Ketidakberdayaan yang dialami oleh sebagian kelompok tani mencerminkan adanya ketidakmerataan atau ketidakefektifan dalam penyaluran dukungan dan sumber daya dari pemerintah desa. Selain itu, pentingnya kualitas dan kapasitas sumber daya manusia juga

jadi sorotan. Hal ini menegaskan bahwa kemampuan petani sangat berpengaruh dalam proses pemberdayaan. Ini berarti bahwa strategi pemberdayaan yang efektif harus mempertimbangkan dukungan dari pemerintah desa sekaligus meningkatkan kapasitas internal kelompok tani.

3. “Strategi Pemberdayaan Petani Padi Ladang di Kabupaten Konawe Kepulauan” adalah artikel jurnal yang disusun oleh Sitti Rosmalah, Harianti, dan Nurmaya (2023) dalam Jurnal Agribisnis Komunitas Pertanian. Tujuan penelitian ini adalah merumuskan strategi pemberdayaan petani usaha tani lahan kering di Kabupaten Konawe Kepulauan. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif yang menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif, penelitian ini memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh petani lahan kering di wilayah tersebut. Data dianalisis menggunakan metode SWOT, yang memungkinkan peneliti mengidentifikasi faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) yang mempengaruhi petani lahan kering.

Pendekatan ini sangat relevan karena menyediakan kerangka kerja terstruktur untuk merumuskan strategi yang efektif. Informan yang terlibat dalam penelitian ini, termasuk kepala desa, penyuluh, petani lapangan, dan tokoh masyarakat, memberikan berbagai perspektif terperinci tentang situasi terkini. Secara keseluruhan penelitian ini memberikan wawasan penting tentang strategi pemberdayaan petani lahan kering di Kabupaten Konawe Kepulauan, dengan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan beberapa pemangku kepentingan.

Hasil penelitian ini dapat menjadi panduan bagi pemerintah dan lembaga lain dalam mengembangkan langkah-langkah yang lebih efektif untuk mendukung petani. Namun, sangat penting untuk mengevaluasi dan memantau penerapan strategi yang diusulkan secara berkala sehingga dapat disesuaikan dengan perubahan dan kondisi tempat.

4. “Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow” merupakan artikel jurnal yang ditulis oleh Anggreyni Raintung, Sarah Sambiran, dan Ismail Sumampow (2021) dalam Jurnal Governance. Peneliti menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat menjadi upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat atau menguatkan dan memandirikan masyarakat.

Upaya pemberdayaan kelompok tani yang dilakukan oleh pemerintah sebagai sarana pembangunan untuk memanfaatkan dengan lebih optimal semua daya yang tersedia serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah desa dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskripsi berupa informasi berupa tertulis dan lisan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa peran pemerintah desa dalam memberdayakan kelompok tani di Desa Mobuya belum dilakukan secara optimal dikarenakan kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap kelompok tani, minimnya

keaktifan dan keterlibatan pemerintah secara langsung untuk melihat kendala yang dialami oleh kelompok bantuan yang belum merata bagi kelompok.

5. “Strategi Pemerintah Desa Lea dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Long Bila, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara”, merupakan skripsi yang ditulis oleh Bobby Steventong (2023). Penelitian ini menggunakan metode dan prosedur penelitian deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi.

Obyek penelitian adalah strategi pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Long Bila, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Subyek penelitian menggunakan teknik *purposive sumpling* yaitu: Pemerintah Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, Ketua Kelompok Tani, dan Anggota Kelompok Tani berperan sebagai subjek dalam penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah Desa Long Bila untuk memberdayakan kelompok tani telah terlaksana dengan menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan oleh kelompok tani. Pemerintah desa telah mengambil inisiatif dan memberikan dukungan berupa alat pertanian modern, benih padi bersubsidi, pupuk bersubsidi, pestisida, dan ada juga kerjasama dengan perusahaan beras pemerintah daerah (Perusda Malinau). Menurut peneliti, strategi pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani sudah berjalan cukup baik.

6. “Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Gabungan Kelompok Tani (gapoktan) di Desa Gedangan, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik” merupakan artikel yang ditulis oleh Hikam dan Rahmadanik (2024) dalam Jurnal Penelitian Administrasi Publik. Penelitian ini membahas tentang peran pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Gedangan, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengkaji peran strategis pemerintah desa dan pemanfaatan perangkat pendukung kelompok tani dalam penguatan kelompok tani di tingkat desa.

Peneliti menemukan bahwa pemerintah Desa Gedangan telah cukup baik dalam memberdayakan kelompok tani. Namun, terdapat kendala dalam memasarkan produk kelompok tani karena masyarakat kurang memahami pentingnya mempromosikan dan membeli produk pertanian lokal. Lebih jauh lagi, studi ini menyoroti kurangnya regulasi oleh pemerintah desa mengenai pemberdayaan kelompok tani, yang menyebabkan masyarakat petani sulit menerima dukungan dan bantuan.

Penelitian ini juga menyoroti peran penting pemerintah desa berperan sebagai pengatur kebijakan, pelaku dinamis, fasilitator dan penggerak dalam memperkuat masyarakat pertanian. Tugas-tugas ini meliputi pembuatan kebijakan, memberi arahan dan kepemimpinan, menyediakan sarana dan prasarana, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pertanian.



7. “Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Sri Bintang Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan tahun 2022” merupakan artikel jurnal yang ditulis oleh Sugiarno dkk (2024) dalam *Journal of Government Science (Govsci): Jurnal ilmu pemerintahan*. Penelitian ini mengkaji peran pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Sri Bintang Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan. Penguatan masyarakat desa menjadi fokus utama dalam kerangka otonomi daerah, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah desa berwenang untuk memajukan pembangunan desa, termasuk pemberdayaan masyarakat. Asosiasi petani merupakan forum penting untuk memecahkan masalah pertanian dan meningkatkan produktivitas petani. Peneliti menemukan bahwa pelaksanaan pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah Desa Sri Bintang masih menimbulkan pertanyaan mengenai pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan dengan kelompok tani. Hal ini terlihat pada kelompok tani yang berkomitmen untuk memperkuat penentuan nasib sendiri. Ketika hal itu dilaksanakan, sebagian petani merasa berdaya, sementara yang lain tidak. Masih adanya pengaduan dari warga masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani kepada pemerintah desa sebagai aktor yang memegang kekuasaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

8. “Peran Pemerintah Desa dalam mendukung kelompok bina tani di Desa Ajuen Kecamatan Peukan Bada” merupakan artikel jurnal yang ditulis oleh Silvia dan Auralia (2023) dalam Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat. Fokus penelitian ini adalah peran pemerintah desa dalam mendukung kelompok tani di Desa Ajuen, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar. Tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi strategi pemerintah desa dalam memberdayakan kelompok tani, dengan fokus pada pemanfaatan potensi sumberdaya alam desa. Studi ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah desa telah berupaya memperkuat kelompok tani dengan menyediakan infrastruktur pertanian dan mengoptimalkan kelompok tani, namun strategi yang diterapkan masih belum optimal. Penelitian ini menyoroti pentingnya dukungan pemerintah dan swasta untuk pengembangan sektor pertanian, karena banyak masyarakat Indonesia bergantung pada sektor ini.

Penelitian ini juga menggarisbawahi perlunya peningkatan kualitas sumber daya masyarakat petani dan perlunya inovasi untuk menjawab tantangan di sektor pertanian. Lebih jauh lagi, penelitian ini menyoroti peran penting kelompok tani sebagai wadah komunikasi dan transfer teknologi di antara para petani.

9. “Pemberdayaan Kelompok Tani dalam Meningkatkan Hasil Panen Padi di Dusun Kaloang, Desa Lerang, Sulawesi Selatan” merupakan artikel jurnal yang ditulis oleh Rustriningsih dkk (2022) dalam Jurnal Pemberdayaan Masyarakat. Penelitian ini membahas tentang pemberdayaan kelompok tani di Dusun Kaloang Desa Lerang Sulawesi Selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk

mengidentifikasi upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pengelolaan lahan oleh kelompok tani dan kendala yang dihadapi petani. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Lokasi penelitian adalah Dusun Kaloang, Desa Lerang, Sulawesi Selatan. Metode pengumpulan data meliputi observasi dan wawancara dengan Kepala Dusun Kaloang, petani, dan pemilik lahan pertanian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya memberdayakan petani dengan memperluas usaha mereka, menyediakan benih pupuk, membentuk kelompok tani, menyediakan traktor, mendistribusikan pestisida, dan membangun sistem irigasi. Akan tetapi upaya tersebut belum terlaksana secara maksimal dan belum membuahkan hasil yang optimal.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberdayaan kelompok tani memainkan peran penting dalam meningkatkan ekonomi dan kinerja petani. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah meningkatkan pemantauan dan pengelolaan sarana dan prasana yang ada. Di sisi lain, petani diharapkan untuk mengembangkan pertaniannya dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan asosiasi petani.

10. “Strategi Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Salak di Desa Pangu Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara” merupakan artikel jurnal yang ditulis oleh Greiti Farah Salu, Ronny Gosal dan Sofia E. Pangemanan (2022) dalam Jurnal Governance. Penelitian ini mengkaji pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat petani buah salak di Desa Pangu, Kecamatan Rantahan Timur, Kabupaten Minahasa Tenggara.

Pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah desa merupakan tugas penting untuk memajukan potensi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan berfokus pada teori strategi pemberdayaan Edi Suharto yang meliputi pemberdayaan, penguatan, perlindungan, dukungan dan keberlanjutan. Kajian Pustaka mencakup konsep strategi, pengembangan masyarakat, dan peran pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dan Undang-Undang No, 23 Tahun 2014. Strategi pemberdayaan masyarakat dipandang sebagai cara untuk mewujudkan potensi masyarakat melalui modal sosial. Studi ini juga mengidentifikasi masalah-masalah yang terkait dengan efektivitas administrasi desa, pelayanan publik, dan pemahaman fungsi pekerjaan utama. Lebih jauh lagi, studi ini menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan dan pendekatan bawah atas untuk mengeksplorasi potensi.

Berdasarkan tinjauan berbagai *literatur review* sebelumnya, beberapa persamaan dan perbedaan signifikan dapat diidentifikasi. Secara umum, penelitian sebelumnya menggarisbawahi urgensi strategi pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani sebagai produsen utama untuk mencapai ketahanan pangan nasional. Metode penelitian yang umum digunakan adalah kualitatif deskriptif dan kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk memahami tantangan dan strategi pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani di berbagai wilayah. Baik penelitian terdahulu maupun penelitian ini berfokus pada strategi pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani, khususnya dalam hal perluasan pengetahuan, penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan

ketrampilan petani, dan penguatan kelembagaan kelompok tani. Perbedaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah, bahwa penelitian ini mengkaji tentang strategi pemerintahan dengan berfokus pada strategi agresif, strategi defensif, strategi kompetitif, strategi inovatif, dan strategi preventif.

## **G. Kerangka Konseptual**

### **1. Strategi**

Definisi umum strategi dapat diartikan sebagai upaya individu atau kelompok untuk membuat rencana demi mencapai tujuan yang ingin di capai. Dalam arti lain, strategi adalah seni bagi individu ataupun kelompok untuk memanfaatkan, kekuatan dan sumber daya yang ada untuk mencapai target sasaran melalui tata cara yang di anggap efektif dan efisien untuk mencapai sasaran yang telah diharapkan.

Menurut KBBI strategi merupakan rencana atau cara yang sistematis untuk mencapai tujuan tertentu, terutama dalam konteks militer, bisnis, atau manajemen. Strategi juga dapat merujuk pada taktik atau metode yang digunakan untuk mengatasi masalah atau mencapai hasil yang diinginkan. Definisi ini menunjukkan bahwa strategi melibatkan perencanaan yang terstruktur dan pendekatan yang terencana untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam berbagai bidang.

Menurut Suprpto (2019 dalam Hidayat (2025) terutama dalam manajemen, strategi memainkan peranan penting untuk mencapai kesuksesan. Keberhasilan manajemen sangat bergantung pada pemilihan dan penerapan strategi yang efektif. Istilah “strategi” berasal dari kata Yunani kuno “*stratos*” yang berarti tentara dan “*agein*” yang berarti pemimpin tertinggi dalam militer. Strategi pada hakikatnya adalah sebuah konsep militer yang dapat diartikan sebagai seni berperang yang

dikuasai oleh para jendral atau sebagai rencana unggul untuk memenangkan suatu pertempuran.

a. Jenis-jenis strategi

Menurut Nawawi dalam (Hamdi, 2021) Jenis-jenis strategi yang dapat digunakan diantaranya

1) Strategi agresif

Strategi ini berfokus pada perubahan cepat dan kemandirian melalui transfer sumber daya dalam skala besar, pelatihan intensif, dan pelimpahan penuh kekuasaan dalam masyarakat untuk segera mengambil kendali pembangunan dan mendorong inovasi meskipun terdapat resiko kegagalan dan potensi ketidaksesuaian dengan nilai lokal yang lebih tinggi.

2) Strategi defensif

Strategi ini bertujuan untuk menciptakan perlindungan dan ketahanan terhadap ancaman eksternal melalui advokasi, meningkatkan kesadaran hukum, memperkuat solidaritas internal dan diversifikasi mata pencaharian. Fokusnya adalah pada pembelaan hak dan kesejahteraan rakyat, meskipun inisiatif ini lebih reaktif dan kurang berfokus pada kemajuan jangka panjang.

3) Strategi kompetitif

Strategi ini diimplementasikan melalui perancangan dan pelaksanaan program-program terstruktur serta serangkaian tindakan sistematis dengan tujuan untuk menghasilkan suatu keunggulan kompetitif yang signifikan dibanding dengan organisasi-organisasi lain yang memiliki posisi dan tingkatan sebanding.

#### 4) Strategi inovatif

Strategi ini berfokus pada pengembangan solusi baru dan kreatif untuk mengatasi masalah masyarakat dan mendorong eksperimen dengan ide-ide lokal, penggunaan teknologi yang tepat atau adopsi praktik terbaik eksternal untuk menghasilkan perubahan yang signifikan dan berkelanjutan.

#### 5) Strategi preventif

Strategi ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan masyarakat dan mencegah masalah dan kerentanan di masa mendatang. Hal ini dilakukan melalui pendidikan, peningkatan kesadaran, penguatan sistem sosial atau pengembangan mekanisme peringatan dini dan pengurangan resiko terhadap potensi ancaman seperti bencana alam, konflik atau dampak perubahan iklim.

Dalam pemberdayaan kelompok tani ke-5 strategi ini dipandang sebagai opsi yang paling menjanjikan dan tepat sasaran. Strategi Agresif, yang mendorong perubahan cepat, inovasi, dan kemandirian penuh meskipun ada resiko yang ditimbulkan dalam transfer sumber daya dalam jumlah besar. Strategi Defensif, yang bertujuan untuk melindungi dan memperkuat ketahanan kelompok terhadap ancaman eksternal melalui lobi dan diversifikasi mata pencaharian. Strategi Kompetitif, yang berfokus pada penciptaan keunggulan kompetitif yang berbeda melalui program-program terstruktur. Strategi Inovatif, mendorong pengembangan solusi baru dan kreatif untuk masalah pertanian melalui eksperimen dengan ide-ide lokal atau adopsi teknologi. Strategi Preventif, yang bertujuan untuk membangun

ketahanan dan mengantisipasi masalah masa depan melalui pendidikan, peningkatan kesadaran, dan mekanisme peringatan dini.

Strategi masuk dalam konsep *governing*, *governing* adalah pendekatan yang menekankan pentingnya partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan, baik di sektor publik maupun organisasi nirlaba. Pendekatan ini berfokus pada interaksi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk kerjasama antar pemerintah, masyarakat dan sektor swasta dalam mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Konsep ini sering dikaitkan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, yang mencakup efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya dan respons terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, *governing* berupaya menciptakan sistem yang lebih inklusif dan responsif terhadap tantangan sosial dan ekonomi yang kompleks.

Konsep *governing* dipahami sebagai upaya mengatur dan mengelola sehingga memiliki proses, fungsi dan hasil. *Governing* meliputi politik, hukum, dan administrasi. Penyusunan peraturan perundang-undangan merupakan suatu tindakan yang penting posisi pemerintah. Yang ideal dalam konteks ini adalah fungsi ekstraksi, distribusi, perlindungan dan pemaksaan oleh pemerintah terhadap negara, warna negara dan publik (Yunanto, 2021)

Strategi dalam *governing* adalah rencana dan metode terstruktur yang digunakan oleh lembaga pemerintah untuk mencapai tujuan pengelolaan suatu entitas dari pembangunan ekonomi hingga keamanan nasional melalui alokasi sumber daya yang efektif, manajemen pemangku kepentingan, dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Strategi-strategi ini beroperasi pada berbagai, dari



visi jangka panjang hingga implementasi kebijakan sektoral, dan keberhasilannya bergantung pada legitimasi dan persetujuan dari mereka yang memimpinya. Strategi ini bertujuan untuk mengatasi akar penyebab ketidakberdayaan dan membangun masyarakat secara kolektif mampu menentukan masa depan mereka sendiri dengan cara yang inklusif dan berkelanjutan.

## **2. Pemerintah Kalurahan**

Pemerintah desa adalah kepala desa, yang dapat disebut dengan istilah lain, dan didukung oleh perangkat desa sebagai unsur pelaksana pemerintah di tingkat desa. Pemerintah desa selaku pelaksana pemerintahan yang dijalankan oleh kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan desa.

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa dinyatakan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan Pemerintah Desa berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pengaturannya berlandaskan pada pemikiran keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh sebab itu penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan desa.

Dalam fungsinya sebagai kepala pemerintahan tingkat desa, kepala desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa. Mereka mengemban tanggung jawab ini dengan mempertimbangkan kedudukan mereka sebagai wakil

masyarakat yang dipilih langsung, yang mandatnya ditentukan oleh suara penduduk desa. Oleh karena itu seorang kepala desa harus memiliki kompetensi, potensi, dan kualitas kepemimpinan yang sesuai dan di samping itu, melaksanakan berbagai kegiatan, fungsi koordinasi, peran, dan tanggung jawab yang terkait dengan tugasnya.

a. Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan

Struktur organisasi pemerintahan desa secara sistematis menggambarkan penyerahan wewenang, tugas, tanggung jawab, dan pekerjaan kepada satuan kerja dan perorangan tertentu. Arsitektur organisasi ini menggambarkan mekanisme operasional yang digunakan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan desa, termasuk garis kepemimpinan hierarkis dan hubungan horizontal wewenang dan tanggung jawab.

Dalam UU No 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kehidupan masyarakat, dan pemantapan kinerja masyarakat desa berasaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pada PP No. 11 Tahun 2019, menurut pasal 62 dan 64, Menteri Dalam Negeri berwenang mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur pelaksanaannya.

Perangkat desa diatur lebih rinci dalam peraturan Menteri Dalam Negeri No 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang meliputi : 1.) susunan organisasi di tingkat desa ditentukan berdasarkan klasifikasi tipologi desa, yang mempertimbangkan jumlah penduduk dan potensi

sumber daya desa. 2.) jabatan dan tugas pokok yang menguraikan nomenklatur jabatan dalam struktur organisasi desa, serta gambaran tugas pokok yang diemban oleh masing-masing jabatan. 3.) fungsi perangkat desa, termasuk peran fungsional yang dilaksanakan oleh masing-masing perangkat desa untuk mendukung efektivitas kinerja kepala desa. 4.) alur kerja penyelenggaraan pemerintah desa, yang mengatur mekanisme koordinasi, alur komunikasi, dan alur kerja yang berlaku antar unsur perangkat desa. 5.) pengangkatan dan pemberhentian pejabat desa, persyaratan kualifikasi dan mekanisme yang ditetapkan untuk mengatur proses pengangkatan dan pemberhentian pejabat desa.

b. Kewenangan Pemerintah Kalurahan

Menurut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) No. 2 Tahun 2020, pemerintah desa mempunyai kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, memajukan dan memberdayakan masyarakat, menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta di tingkat Kalurahan (terutama di bidang kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang di kabupaten), mengatur dan mengelola urusan masyarakat setempat berdasarkan inisiatif, hak-hak masyarakat adat, dan nilai-nilai tradisional, sebagai membentuk dan mengurus Tuwanggana, serta melaksanakan kewenangan, tugas, hak, dan kewajiban lain menurut perundang-undangan, dan hubungan kerja dengan Kapanewon/Kemantren yang bersifat kooperatif, konsultatif, dan koordinatif dalam kerangka hierarki (Peraturan, 2020)

Kepala desa dengan dukungan perangkat desa sebagai satu-satunya penyelenggara, kepala desa memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengelola semua aspek wilayah desanya (G Sihite, 2023). Pemerintahan desa dipimpin oleh kepala desa, dibantu oleh seorang sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri atas kepala desa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sebagai urusan. Panitera membantu sekretaris desa dalam menyediakan data dan informasi serta dalam memberikan pelayanan. Kepala desa merupakan kepala pejabat yang mengelola urusan keuangan daerah desa, sedangkan kepala dusun berkedudukan sebagai wakil kepala desa di daerahnya. Pengaturan dan pengelolaan urusan anggaran desa menjadi tanggung jawab pemerintah desa. Untuk mengatur dan mengurus hal-hal tersebut, pemerintah desa mengeluarkan peraturan desa. Peraturan desa ini ditetapkan oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas administratif dan berwenang mengatur urusan pemerintahan serta memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Landasan kewenangan itu adalah asal-usul masyarakat, hak-hak dan adat istiadat yang telah ada sejak lama yang diakui keberadaannya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sopanah, 2023)

### **3. Pemberdayaan Masyarakat**

#### **a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses peran serta masyarakat secara aktif dalam mewujudkan potensi yang dimilikinya, disertai komitmen

untuk memecahkan berbagai permasalahan mendasar kehidupan secara bersama-sama (Lestari, 2021). Pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya, baik melalui program maupun proses untuk meningkatkan kinerja suatu sistem sosial sehingga mampu mencapai tujuannya secara mandiri. Pemberdayaan itu sendiri merupakan hasil interaksi dan ekspresi budaya manusia dan kemauan untuk melakukan pekerjaan yang efektif dan efisien.

Suharto dalam Sabani (2025) juga menekankan penguatan masyarakat adalah proses yang berkelanjutan dan membutuhkan waktu. Setiap strategi harus disesuaikan dengan konteks dan kekhususan lokal masyarakat yang berbeda. Pemberdayaan tidak hanya ditujukan pada orang-orang yang tidak mampu membelinya, tetapi juga bagi mereka yang masih tidak mampu membelinya dibatasi untuk mencapai kemerdekaan.

Pemberdayaan masyarakat melibatkan pengidentifikasian aset dan kendala internal serta eksternal yang memengaruhi kemampuan kontrol dan kesejahteraan mereka. Proses ini mencakup pemetaan sumber daya, hubungan kekuasaan, kebutuhan partisipasi, dan kapasitas kelembagaan lokal. Menilai dampak politik, pasar, dan lingkungan juga penting. Pemahaman khusus ini mendasari desain intervensi pemberdayaan yang terarah, sesuai konteks dan berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya partisipatif yang berkelanjutan dan beradaptasi dengan keadaan setempat. Tujuan utamanya adalah untuk memperkuat keterampilan dan kemandirian seluruh anggota masyarakat dalam mengatasi permasalahan mendasar. Proses ini memerlukan pemeriksaan mendalam terhadap potensi dan kendala lokal, dinamika kekuatan,

perlunya partisipasi warga, dan kekuatan organisasi masyarakat sebagai dasar untuk mengembangkan intervensi yang ditargetkan. Sasarannya antara lain adalah memperbaiki sistem dan peraturan, meningkatkan kinerja dan dampak kegiatan ekonomi di masyarakat, memperbaiki lingkungan, meningkatkan kesejahteraan umum, dan mengembangkan masyarakat secara menyeluruh, yang pada akhirnya menghasilkan warga yang mampu mengelola sumber daya secara mandiri dan meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, sehingga tercipta masyarakat yang tangguh dan produktif.

b. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Wijaya (2002 dalam Patilaiya et al.,2022) mengatakan bahwa tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membangkitkan segala kemampuan yang ada pada masyarakat untuk mencapai tujuan pertumbuhan motivasi, inisiatif, kreatif serta penghargaan dan pengakuan bagi mereka yang berprestasi (Patilaiya, 2022).

Semua konsep pemberdayaan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kebaikan bersama dan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat. Pada dasarnya setiap orang adalah memiliki keinginan untuk membangun dan meningkatkan kehidupan kesejahtraannya (Larasathi, 2020).

Menurut Pakpahan dan Sihombing dalam Pakpahan (2023) pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk menciptakan individu dan masyarakat yang mandiri. Beberapa perbaikan pemberdayaan, diantaranya:

1) Pendidikan (*better education*)

Pemberdayaan datang dari pendidikan tinggi. Pendidikan tidak boleh berat sebelah, tapi harus para pendidik yang berpihak dan tidak menggurui harus bertindak sebagai moderator, sikap saling menghormati, proses pengejaran dan pembelajaran didasarkan pada pengalaman dan praktis.

2) Aksesibilitas (*better accessibility*)

Perbaikan pada area ini harus dilakukan karena mereka menawarkan kenyamanan dalam kegiatan pemberdayaan. Aksesibilitas tercapai dengan menyediakan gedung, jalan, sumber informasi, inovasi, agen pemasaran yang menciptakan peluang untuk masyarakat dalam segala aspek kehidupan.

3) Tindakan (*better action*)

Pemberdayaan dengan perbaikan tindakan dapat dicapai melalui pemeriksaan, pemantauan, sehingga dapat diambil tindakan penguatan komunitas yang akan dilakukan di masa yang mendatang jauh lebih baik.

4) Kelembagaan (*better institution*)

Peningkatan kelembagaan meliputi keterampilan komunikasi, pengembangan jaringan kemitraan untuk perubahan perilaku yang sesuai dengan nilai adat istiadat masyarakat, sehingga tujuan pemberdayaan dapat tercapai.

5) Usaha (*better business*)

Perbaikan usaha harus dilakukan secara terus-menerus dalam segala aspek.

6) Perbaikan pendapatan (*better income*)

Peningkatan bisnis akan memberikan dampak positif pada peningkatan pendapat masyarakat.

7) Lingkungan (*better environment*)

Lingkungan adalah sesuatu yang sangat perlu diperhatikan dalam pemberdayaan masyarakat. Hidup yang lebih baik akan dimiliki masyarakat mandiri dan dapat dilihat dengan jelas terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat

8) Kehidupan (*better living*)

Pemberdayaan akan mengubah kehidupan masyarakat. Hidup yang lebih baik akan dimiliki masyarakat mandiri dan dapat dilihat dengan jelas terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat.

9) Masyarakat (*better community*)

Peningkatan melalui program yang terstruktur dengan baik akan menjadikan masyarakat mandiri.

Dengan demikian, tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk menciptakan masyarakat yang lebih efektif dalam menentukan kehidupannya sendiri, terlibat dalam pengambilan keputusan, partisipasi aktif dalam pembangunan dan akhirnya mencapai kesejahteraan berkelanjutan melalui inisiatif dan kemampuannya sendiri.



c. Pemberdayaan Masyarakat Tani

Menurut Pasal 1 Ayat 2 UU No. 19 Tahun 2013 terkait perlindungan dan pemberdayaan petani, upaya pemberdayaan petani diwujudkan melalui penguatan kapasitas petani dalam pengelolaan pertanian yang optimal. Proses tersebut dilaksanakan melalui penyediaan pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan penyuluhan terpadu, pengembangan infrastruktur pemasaran hasil pertanian, pemantapan dan pemberian jaminan lahan pertanian, serta fasilitas akses ilmu pengetahuan teknologi, dan sumber daya relevan lainnya (Grathiano, 2023).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pemberdayaan petani sesuai dengan ketentuan perundang-undangan merupakan program nasional yang mencakup berbagai aspek dan memerlukan kerjasama berbagai pihak. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan pertanian yang mendukung perkembangan dan kemajuan petani di Indonesia.

Menurut Suharto (2005 dalam Afriansyah dkk 2022), menjelaskan bahwa penerapan pemberdayaan dapat dilakukan melalui 5P yaitu : pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Pemungkinan, menciptakan suasana atau iklim yang membuat masyarakat berkembang optimal.
2. Penguatan, memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kabutuhannya.

3. Perlindungan, melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dan lemah, serta dapat mencegah eksploitasi kuat terhadap kelompok lemah.
4. Penyokong, memberikan dukungan dan bimbingan agar masyarakat mampu menjalankan perannya dan tugas-tugas kehidupannya.
5. Pemeliharaan, memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya adalah gerakan dari, oleh, dan untuk rakyat (al, 2023)

Pandangan ini berasumsi bahwa inti dari pemberdayaan yang sejati dan berkelanjutan berakar pada dinamika internal masyarakat, dimana inisiatif, implementasi, dan manfaat yang dihasilkan merupakan karya bersama yang secara melekat dimiliki dan dirasakan oleh anggota masyarakat. Oleh karena itu, pemberdayaan sejati melampaui sekedar intervensi eksternal, tetapi terwujud sebagai proses internal yang didorong oleh partisipasi aktif, kepemilikan, dan tanggung jawab penuh masyarakat dalam mengelola perubahan dan mencapai kesejahteraan bersama.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini metode yang digunakan peneliti adalah metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif

kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang melibatkan indentifikasi masalah aktual di masyarakat, diikuti dengan proses pengolahan, analisis, dan interprestasi data yang relevan.

Menurut Sugiyono dalam Safarudin (2023) penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang digunakan untuk kondisi alamiah (berlawanan dengan eksperimen) dimana peneliti sebagai instrument sentral, teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi (kombinasi), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif menekankan pentingnya untuk generalisasi.

Penelitian kualitatif merupakan pendekatan penilitian humanistik yang menempatkan manusia sebagai pemahaman fenomena sosial. penelitian ini mengakui hakikat manusia sebagai subjek yang memiliki kebebasan berpikir dan mengambil keputusan berdasarkan latar belakang budaya sistem nilai yang dimilikinya (Safarudin 2023)

Creswell dalam Safarudin (2023) bahwa penelitian kualitatif dalam pendidikan adalah jenis penelitian yang sangat bergantung pada perspektif partisipan atau informan. Para peneliti melakukan wawancara mendalam dengan pertanyaan terbuka, dan data yang dikumpulkan sebagian besar berupa narasi atau teks dari para peserta. Proses analisis data melibatkan identifikasi tema dari teks. Penafsiran bersifat subjektif dan cenderung eksploratif dengan mengajukan pertanyaan lanjutan.

Penelitian kualitatif memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan deskripsi komprehensif, mengidentifikasi pola baru, dan mengembangkan

pemahaman teoritis yang mendalam tentang fenomena yang diteliti dengan menekankan interpretasi reflektif peneliti dan penggunaan strategi validitas yang tepat.

## **2. Unit Analisis**

Unit analisis sebagai bagian terpisah yang menjadi fokus penelitian memungkinkan peneliti untuk melakukan penelitian pada tingkat yang tepat. Tingkat ini penting untuk memastikan keakuratan dan keandalan hasil penelitian.

Sederhananya peneliti tidak selalu dapat segera menentukan apakah suatu topik, objek, lokasi, dan rentang waktu dimungkinkan untuk berfungsi sebagai unit analisis penelitian. Penting untuk dipahami bahwa unit analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **a. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kalurahan Pacarejo, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta.

### **b. Obyek Penelitian**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), objek penelitian merupakan hal atau perkara yang akan menjadi sasaran dalam penelitian. Dalam penelitian ini, objek penelitian yang akan diteliti adalah strategi pemerintah kalurahan dalam pemberdayaan kelompok tani di Kalurahan Pacarejo, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta.

c. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah informan dalam penelitian ini. Informan adalah orang yang bisa memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Pengambilan informan didasarkan atas tujuan tertentu yaitu mampu memberikan data atau informasi sesuai dengan topik penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini diantaranya: *Pertama*, (Kelompok tani Kalurahan Pacarejo Kabupaten Gunung Kidul). *Kedua*, (Pemerintah Kalurahan Pacarejo).

**Tabel 1.1 Data Informan**

NO.	Nama	Usia	Pendidikan terakhir	Jabatan
1.	Suhadi	55 Tahun	S-1	Lurah
2.	Sudiyatna	57 Tahun	D-3	PPL
3.	Sukiman	55 Tahun	SMP	Ketua Gapoktan dan Ketua BPD
4.	Wartoyo	55 Tahun	SLTA	Ketua Kelompok Tani
5.	Tarip	54 Tahun	SMEA	Ketua Kelompok Tani
6.	Watini	53 Tahun	SMP	Ketua KWT
7.	Yatina	52 Tahun	Paket B	Anggota KWT
8.	Yatini	34 Tahun	SMP	Anggota KWT
9.	Denik	32 Tahun	SMK	Anggota KWT
10.	Wabiyem	40 Tahun	SMA	Ketua KWT

(Sumber: Data Lapangan Peneliti, tahun 2025)

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan aspek fundamental dalam penelitian yang sangat menentukan keakuratan dan kualitas hasil penelitian. Menurut Sugiyono (2017), teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan valid guna menjawab permasalahan penelitian secara tepat. Penggunaan teknik yang tepat akan memastikan data yang diperoleh memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, pemilihan teknik pengumpulan data harus disesuaikan dengan tujuan penelitian, jenis data yang dibutuhkan, serta karakteristik subjek penelitian agar proses pengumpulan data berjalan lancar dan menghasilkan informasi yang akurat serta berkualitas tinggi

#### **a. Observasi**

Observasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki, (Moleong, 2003). Observasi atau disebut juga dengan pengamatan meliputi kegiatan memusatkan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra. Observasi dapat dilakukan dengan dua cara, yakni observasi no sistematis dan observasi sistematis. Melalui observasi, peneliti mencatat berbagai informasi kunci dan mengamati kolaborasi berbagai pihak terkait dalam pemberdayaan kelompok tani di Kalurahan Pacarejo. Data yang diperoleh dari observasi memberikan pemahaman mendalam tentang strategi agresif, strategi defensif, strategi

kompetitif, strategi inovatif, strategi preventif yang dijalankan oleh Pemerintah Kalurahan Pacarejo untuk mencapai tujuan pemberdayaan kelompok tani.

b. Wawancara

Penelitian ini mengkombinasikan dua jenis wawancara yaitu, wawancara terarah dan wawancara mendalam (*indepth interview*). Berkaitan dengan wawancara terarah, peneliti menanyakan kepada informan hal-hal yang telah disiapkan sebelumnya (panduan wawancara). Sementara itu, wawancara mendalam dilakukan dengan cara bertanya jawab secara bebas tanpa pedoman pertanyaan (Raharjo, 2011). Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan berbagai pihak terkait Strategi Pemerintah Kalurahan dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Kalurahan Pacarejo. Informan yang diwawancarai meliputi: Lurah Pacarejo, PPL Kalurahan Pacarejo, Ketua Gapoktan/Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Ketua Kelompok Tani, dan Masyarakat. Wawancara dilakukan secara langsung untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang strategi yang diterapkan oleh pemerintah Kalurahan Pacarejo dalam pemberdayaan kelompok tani. Peneliti memastikan bahwa setiap informan menyampaikan pandangan yang beragam dan relevan terhadap topik yang diteliti. Selama tahap wawancara, peneliti juga memperhatikan kerangka wawancara yang telah disusun sebelumnya untuk memastikan tanggapan yang bermakna. Proses wawancara dilakukan secara terstruktur dan bersifat dialogis, sehingga interaksi antara peneliti dan informan dapat

memberikan kontribusi yang berharga dalam mengungkap strategi pemerintah Kalurahan Pacarejo dalam pemberdayaan kelompok tani di wilayah tersebut.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2017), dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan beragam dokumen terkait dengan Kalurahan Pacarejo, termasuk sejarah kalurahan, dokumentasi dengan ketua kelompok tani, dokumentasi terkait pemberdayaan kelompok tani, dan peta kalurahan. Data yang diperoleh melalui dokumen tersebut akan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai konteks historis, kebijakan, aktivitas ekonomi, dan pembangunan di Kalurahan Pacarejo. Dokumentasi menjadi landasan penting untuk mengevaluasi strategi pemerintah kalurahan dalam pemberdayaan kelompok tani serta dapat memberikan perspektif yang komprehensif dalam penelitian ini.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Miles dan Huberman dalam Safarudin (2023) menyatakan bahwa kegiatan dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus dan menyeluruh hingga datanya jenuh, aktifitas dalam analisis data yaitu *data reduction* (pengumpulan data), *data display* (penyajian



data), *reduksi data conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan dan verifikasi)

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini analisis data kualitatif. Analisis kualitatif tertuju pada pemecahan masalah saat sekarang melalui cara menganalisa dan klasifikasi penyelidikan dengan berbagai jenis penelitian. Ada beberapa komponen yang dilakukan oleh peneliti yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarik kesimpulan.

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian dicari tema dan polanya. Reduksi data bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan dan mencari data selanjutnya bila diperlukan. Peneliti melakukan pemilahan data yang berasal dari hasil observasi dan wawancara yang berkaitan dengan strategi pemerintah dalam pemberdayaan kelompok tani di Kalurahan Pacarejo.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan reduksi yang disajikan dalam laporan secara sistematis yang mudah dibaca atau dipahami baik sebagai keseluruhan maupun bagian-bagiannya dalam konteks sebagai satu kesatuan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penyajian data dalam bentuk narasi,

tabel, gambar dan bagan yang berkaitan dengan strategi pemerintah kalurahan dalam pemberdayaan kelompok tani di Kalurahan Pacarejo.

c. Penarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan sesuai dengan data-data yang diperoleh dalam penelitian dan telah dianalisis. Dalam hal ini, penarikan kesimpulan dilakukan melalui pembadingan dengan teori atau kerangka konseptual yang relevan. Peneliti melakukan penarikan kesimpulan sesuai dengan data atau informasi yang telah diperoleh yang berkaitan dengan strategi pemerintah kalurahan dalam pemberdayaan kelompok tani di Kalurahan Pacarejo.

**BAB II**  
**PROFIL KALURAHAN PACAREJO, KAPANEWON SEMANU,**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**A. Sejarah Kalurahan**

Kalurahan Pacarejo merupakan salah satu Kalurahan dengan luas wilayah terluas dan jumlah padukuhan terbanyak di Kabupaten Gunungkidul. Secara geografis, Kalurahan Pacarejo terletak di sebelah Selatan Kota Wonosari, kurang lebih 4 km dari Kantor Kapanewon Semanu. Kalurahan Pacarejo berlandaskan pada cerita dan adat lisan para tetua yang cakap, mendalam, dan bijak dalam memberi nasihat serta telah mengalami perkembangan zaman. Kalurahan Pacarejo terbentuk dari tiga kalurahan, yaitu: 1) Kalurahan Kuwangen. Di Kuwangen pada waktu itu, ada seorang demang yang menjabat sebagai demang (kepala wilayah), yaitu R. Ngabei Suro Dilog, yang menjabat pada tahun 1812. Kemudian digantikan oleh Demang Mangun Dilog, yang memiliki seorang putra bernama Mulyo Dinomo. Pada waktu itu, kekuasaan berada di tangan Sri Sultan Hamengkubuwono VII dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Demang Mangun Dilog mempunyai seorang putri yang kemudian menikah dengan R. Purwo Wijoyo dari Kalurahan Kuwon. Saat itu, terjadi pergantian sistem pemerintahan dari kademangan menjadi kalurahan. Yang menjabat sebagai lurah adalah Karso Dinomo, dan jabatan carik (sekretaris desa) dipegang oleh Mangun Dinomo. Setelah Lurah Karso Dinomo mengundurkan diri dari pemerintahan,

jabatan lurah kemudian dilanjutkan oleh Mulyo Dinomo, yang sebelumnya adalah carik.

Wilayah kalurahan kuwangen meliputi tiga padukuhan yaitu: Padukuhan Jetis, Padukuhan Jelok, Padukuhan Kuwangen. Kemudian terjadi pemekaran padukuhan, dari semula hanya tiga padukuhan menjadi 8 padukuhan yaitu: Padukuhan Jetis Wetan, Padukuhan Jetis Kulon, Padukuhan Jelok, Padukuhan Jonge, Padukuhan Kuwangen Lor, Padukuhan Kuwangen Kidul, Padukuhan Tonggor. 2) Kalurahan Kuwon, pada masa itu Kalurahan Kuwon mencakup tiga padukuhan yaitu: Padukuhan Kenteng, Padukuhan Wilayu, Padukuhan Kuwon. Yang menjabat sebagai Lurah pada waktu itu adalah R. Purwo Wijoyo, yang memiliki seorang putra bernama R. Mangun Wijoyo. Kemudian R. Mangun Wijoyo menikah dengan putri Demang R. Mangun Dilogi (dari Kalurahan Kuwangen). Setelahnya R. Mangun Wijoyo menggantikan ayahnya sebagai lurah di Kalurahan Kuwon. Lurah R. Mangun Wijoyo memiliki seorang putra bernama R. Sukardi. pada saat itu, meskipun lanjut usia, R. Sukardi masih menempuh pendidikan di lembaga MILO (kemungkinan nama sekolah atau institusi masa itu). Setelah terjadi pemekaran wilayah, Kalurahan Kuwon yang sebelumnya memiliki tiga berkembang menjadi tujuh padukuhan yaitu: Padukuhan Kenteng, Padukuhan Wilayu, Padukuhan Ngelak, Padukuhan Kuwon Lor, Padukuhan Kuwon Tengah, Padukuhan Kuwon Kidul, Padukuhan Cempluk. 3) Kalurahan Dengok, pada waktu itu Kalurahan Dengok mencakup tiga padukuhan, yaitu : Padukuhan Dengok, Padukuhan Pacing, Padukuhan Serpeng. Kalurahan dipimpin oleh Lurah Suro Sentiko, yang kemudian

digantikan oleh Lurah R. Nodoro Gayung. Pada masa pemerintahan beliau terjadi pemekaran wilayah padukuhan. Dari semula tiga padukuhan, wilayah ini berkembang menjadi 13 padukuhan yaitu : Padukuhan Jasem Lor, Padukuhan Jasem Kidul, Padukuhan Dengok Lor, Padukuhan Dengok Kidul, Padukuhan Ngampo, Padukuhan Trukan Ngampo, Padukuhan Pacing Lor, Padukuhan Pacing Kidul, Padukuhan Serpeng Lor, Padukuhan Serpeng Wetan, Padukuhan Serpeng Kidul, Padukuhan Banyumanik, Padukuhan Piyuyon. Diceritakan bahwa saat itu Lurah Nodoro Gayung meninggalkan pemerintahan tanpa menyelesaikan urusannya. Hal ini menyebabkan pemerintahan di Kalurahan Dengok menjadi kosong atau tidak berjalan (komplang). Keadaan tiga kalurahan yaitu Kuwangen, Kuwon, Dengok pada waktu itu berada dalam masa penjajahan Belanda.

Kehidupan masyarakat masih sangat sederhana belum ada tempat untuk mencari ilmu seperti sastra, Bahasa, dan sebagainya. Pekerjaan masyarakat adalah segala jenis pekerjaan yang bisa dikerjakan dengan peralatan seadanya, berdasarkan peninggalan leluhur. Meskipun demikian, masyarakat tetap hidup rukun dan bergotong royong. Namun mereka juga merasa takut kepada para penguasa ( Punggawaning Projo) pada masa penjajahan Belanda. Pada waktu-waktu tertentu masyarakat dipaksa menyetor hasil bumi kepada penguasa, termasuk ternak dan rempah-rempah lainnya. Semua ini terjadi karena kurangnya pengetahuan dan pendidikan pada saat itu. Oleh karena itu disusunlah rencana penggabungan Kalurahan Kuwangen, Kuwon, dan Dengok menjadi satu Kalurahan. Secara kebetulan, R. Sukardi putra dari R. Mangun Wijoyo telah

menamatkan pendidikannya di MILO. Oleh karena itu, ia mencalonkan diri sebagai pengganti lurah di tingkat pemerintahan. Kemudian, diadakan proses seleksi untuk mencari calon lurah. R. Karso Dinomo dari Kalurahan Kuwangen mencalonkan putranya, Sosro Gendhogo. Kalurahan Kuwon mencalonkan R. Sukardi. Hanya Kalurahan Dengok yang tidak mengajukan calon. Pemilihan dilakukan dengan cara pengundian oleh pengurus ketiga Kalurahan tersebut pada hari rabu 11 Juli 1945. Hasil pengundian menunjukkan bahwa R. Sukardi terpilih menjadi lurah, menggantikan ayahnya sebagai pemimpin. Kalurahan hasil penggabungan tersebut dipimpin oleh R. Sukardi Purwo Hadi Wijoyo. Kemudian diadakan musyawarah untuk menentukan nama kalurahan tersebut.

Masing-masing pihak awalnya mengusulkan nama berdasarkan keinginan daerahnya masing-masing. Melihat kondisi daerah sekitar yang banyak ditumbuhi tanaman pacar dikedua sisi jalan sehingga suasana asri dan harum, akhirnya disepakati nama Pacarejo. Dengan harapan agar daerah tersebut menjadi daerah yang makmur dan sejahtera, maka disepakatilah nama Pacarejo. Upacara pemberian nama tersebut dilaksanakan pada tahun 1945, bertepatan dengan hari kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak dilantik sebagai Lurah, R. Sukardi Purwo Hadi Wijoyo memimpin daerah yang terdiri dari 28 padukuhan. Saat itu, daerah tersebut masih berada di bawah kekuasaan colonial Belanda. Pada tahun 1948, terjadi perang gerilya yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Dalam Gerakan gerilyanya, Jenderal Sudirman melewati Desa Pacarejo. Ia memulai perjalanannya ke arah timur dari Padukuhan Jasem. Tandu yang digunakan Jenderal Sudirman juga dibawa ke

perbatasan oleh warga Pacarejo dan dibawa ke perbatasan Pacarejo di Padukuhan Jetis Wetan. Selanjutnya, perjalanan Jendral Sudirman terus berlanjut dengan bantuan warga Kalurahan Semanu. Dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari, Kalurahan Pacarejo mendapat dukungan dari sebuah lembaga yang bernama LSD (Lembaga Sosial Desa) yang mendukung jalannya pemerintahan. Selanjutnya kepemimpinan di Kalurahan Pacarejo berturut-turut sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Data Lurah Kalurahan Pacarejo dari Tahun ke Tahun**

NO	Nama	Tahun
1	R. Sukardi	1941-1986
2	A.Bowo Lismanto	1986-1996
3	Sardiyo	1996-2014
4	Budi Setiyono	2014-2015
5	Suhadi	2015-2025

(Sumber: Profil Kalurahan Pacarejo, tahun 2024)

## **B. Visi dan Misi Kalurahan**

### **1) Visi Kalurahan Pacarejo**

Visi dari Kalurahan Pacarejo adalah:

“Mewujudkan Pacarejo yang berkemajuan”

### **2) Misi Kalurahan Pacarejo**

Misi dari Kalurahan Pacarejo adalah:

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- b. Metode kerja yang berbasis teknologi informasi.

- c. Mengeksplorasi potensi Desa Pacarejo sebagai pendongkrak pendapatan asli desa.
- d. Meningkatkan manajemen tata Kelola air sebagai modal peningkatan kesejahteraan masyarakat dibidang pertanian dan pemenuhan air bersih.
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
- f. Menjadikan peran penting bidang pendidikan dan Kesehatan.
- g. Meningkatkan kualitas infrastuktur jalan desa.

### **C. Kondisi Geografis**

Kalurahan Pacarejo yang memiliki luas wilayah sekitar 3.693,1810 hektar (Ha), dan sekitar 2.101 hektare (Ha) merupakan lahan pertanian. Kalurahan Pacarejo terletak di Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara geografis kalurahan ini terletak di Kawasan karst Gunung Sewu yang memiliki ciri khas perbukitan kapur. Topografi kalurahan Pacarejo sebagian besar berbukit dengan kemiringan lereng yang bervariasi, sehingga mempengaruhi struktur pemukiman, pemanfaatan lahan, dan kegiatan pertanian masyarakatnya. Jenis tanah yang dominan adalah berbatu, tanah mediterania, dan tanah grumusol yang kurang subur dan memerlukan pengelolaan pertanian khusus. Iklim Kalurahan Pacarejo adalah tropis, dengan curah hujan yang tinggi namun tidak merata sepanjang tahun. Pada tahun 2024 rata-rata curah hujan di Kalurahan Pacarejo adalah 15.680 mm. Musim hujan berlangsung selama tiga bulan, selama musim kemarau pasokan air merupakan salah satu tantangan terbesar. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah kota memanfaatkan sekitar 13 danau sebagai waduk penampung air hujan dengan



kapasitas hingga 60.000 m<sup>3</sup>, yang dapat digunakan selama empat bulan. Suhu rata-rata harian 30,0°C. Kelembaban udara berkisar antara 80% hingga 85%. Iklim di Kalurahan Pacarejo pada tahun 2024 menunjukkan kontras yang ekstrem. Curah hujan sangat tinggi tetapi singkat, diikuti oleh musim kemarau yang panjang. Hal ini mengakibatkan siklus tahunan yang tidak seimbang dengan resiko banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau. Meskipun kelembaban cukup tinggi, peningkatan suhu rata-rata merupakan indikator penting perubahan iklim lokal yang harus diperhitungkan. Kondisi iklim tersebut menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi karakteristik dan pengelolaan wilayah. Secara administratif, Kalurahan Pacarejo Memiliki batas wilayah sebagai berikut :

**Tabel 2.2 Batas-batas Wilayah di Kalurahan Pacarejo**

Batas	Kalurahan	Kapanewon
Sebelah Utara	Baleharjo	Wonosari
Sebelah Selatan	Hargosari	Tanjungsari
Sebelah Timur	Semanu	Semanu
Sebelah Barat	Mulo	Wonosari

(Sumber: Profil Kalurahan Pacarejo Tahun 2024)

Secara administratif Kalurahan Pacarejo terbagi dalam 28 padukuhan yang terbagi 28 RW dan 140 RT.

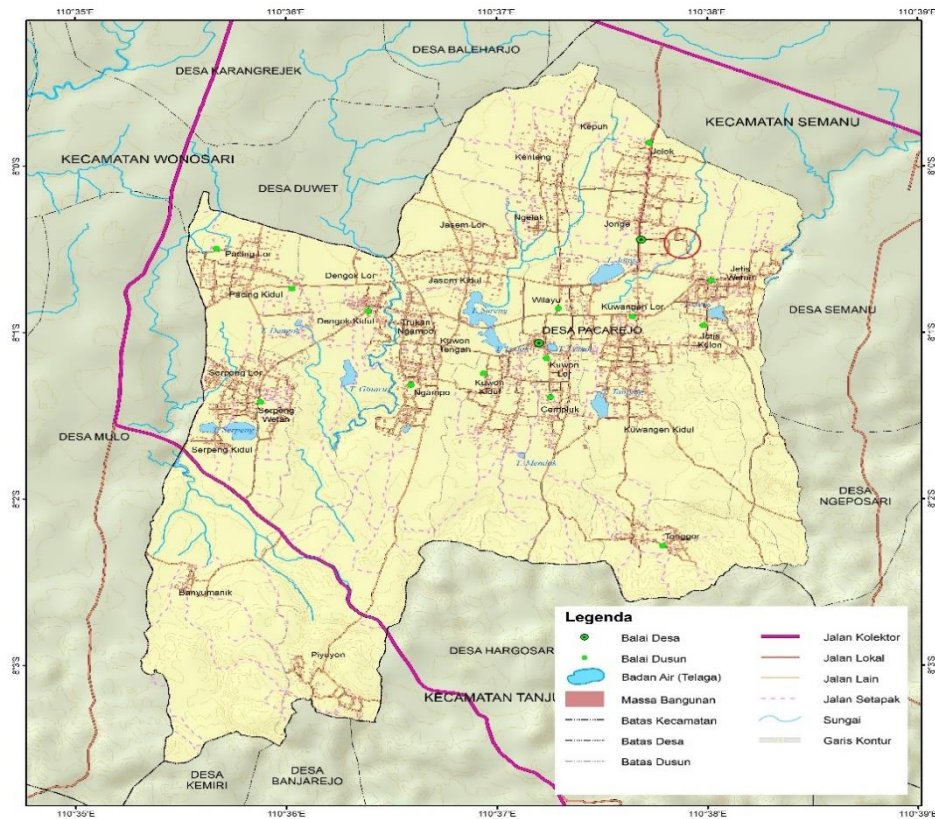
Adapun padukuhan-paduhukan tersebut yaitu :

- 1) Padukuhan Jetis Wetan
- 2) Padukuhan Jetis Kulon

- 3) Padukuhan Jelok
- 4) Padukuhan Jonge
- 5) Padukuhan Kuwangen Lor
- 6) Padukuhan Kuwangen Kidul
- 7) Padukuhan Tonggor
- 8) Padukuhan Kenteng
- 9) Padukuhan Ngelak
- 10) Padukuhan Kepuh
- 11) Padukuhan Wilayu
- 12) Padukuhan Kuwon Lor
- 13) Padukuhan Kuwon Tengah
- 14) Padukuhan Kuwon Kidul
- 15) Padukuhan Cempluk
- 16) Padukuhan Jasem Lor
- 17) Padukuhan Jasem Kidul
- 18) Padukuhan Dengok Lor
- 19) Padukuhan Dengok Kidul
- 20) Padukuhan Trukan Ngampo
- 21) Padukuhan Ngampo
- 22) Padukuhan Pacing Lor
- 23) Padukuhan Pacing Kidul
- 24) Padukuhan Serpeng Lor
- 25) Padukuhan Serpeng Wetan

- 26) Padukuhan Serpeng Kidul
- 27) Padukuhan Banyumanik
- 28) Padukuhan Piyuyon

### Gambar 2.1 Peta Kalurahan Pacarejo



(Sumber : Profil Desa Pacarejo Tahun 2024)

#### D. Kondisi Demografis

a. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data mengenai kependudukan di Kalurahan Pacarejo terdapat 16.990 jiwa. yang kemudian terbagi dalam 5732 Kepala Keluarga (KK). Jumlah penduduk laki-laki 8.417 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 8.573 jiwa

**Tabel 2.3 Jumlah Penduduk**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah penduduk	Persentase (%)
1.	Laki-Laki	8.417 Jiwa	49,53%
2.	Perempuan	8.573 Jiwa	50,47%
	<b>Jumlah Total</b>	16.990 Jiwa	100%

(Sumber : Profil Kalurahan Pacarejo, tahun 2024)

Berdasarkan data penduduk Kalurahan Pacarejo yang berpenduduk sebanyak 16.990 jiwa diketahui bahwa penduduk laki-laki sebanyak 8.417 jiwa atau 49,53%, sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 8.573 jiwa atau 50,47%. Hal ini menunjukkan bahwa selisih sebanyak 156 jiwa, dengan jumlah penduduk perempuan sedikit lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki.

**b. Jumlah Penduduk Menurut Golongan Usia**

Komposisi penduduk di Kalurahan Pacarejo meliputi semua kelompok umur mulai dari anak-anak, usia produktif, hingga lansia. Hal ini tercermin dari data demografi yang secara sistematis mengelompokkan penduduk berdasarkan umur seperti yang disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Menurut Golongan Usia**

No.	Golongan Usia (Tahun)	Jumlah	Persentase (%)
1.	0-15	3.193 Jiwa	18,79%
2.	16-65	11.374 Jiwa	66,92%
3.	66 ke atas	2.423Jiwa	14,26%
	<b>Jumlah Total</b>	16.990 Jiwa	100%

(Sumber: Profil Kalurahan Pacarejo, tahun 2024)

Berdasarkan persebaran penduduk menurut kelompok umur, Kalurahan Pacarejo memiliki jumlah penduduk sebanyak 16.990 jiwa yang terbagi dalam tiga kelompok umur. Kelompok umur yang paling banyak jumlahnya adalah kelompok umur produktif (16-65 tahun) yaitu sebanyak 11.374 jiwa atau sekitar 66,92% dari jumlah penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk berada pada usia produktif yang berpotensi untuk mendorong kegiatan pembangunan di berbagai sektor. Kelompok umur 0-15 tahun sebanyak 3.193 jiwa atau sebesar 18,79%, sehingga perlu adanya perhatian khusus terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan Kesehatan anak. Kelompok umur lanjut usia (66 tahun ke atas) sebanyak 2.432 jiwa atau sebesar 14,26%, sehingga perlu adanya perhatian khusus terhadap kesejahteraan dan layanan sosial bagi penduduk lanjut usia.

c. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Kalurahan Pacarejo juga memiliki data mengenai jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan seperti yang sudah disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase%
1	Sedang Sekolah	2.604 Jiwa	19,02%
2	Tidak Pernah Sekolah	231 Jiwa	1,69%
3	Tidak Tamat SD	39 Jiwa	0,28%
4	Tamat SD	5.626 Jiwa	41,12%
5	Tamat SMP	2.797 Jiwa	20,44%
6	Tamat SMA	2.088 Jiwa	15,25%
7	Tamat D3	102 Jiwa	0,75%
8	Tamat S-1	185 Jiwa	1,35%
9	Tamat S-2	14 Jiwa	0,10%
	<b>Jumlah Total</b>	13.686 Jiwa	100%

(Sumber: Profil Kalurahan Pacarejo, tahun 2024)

Berdasarkan tabel di atas sebagian besar penduduk Pacarejo telah menamatkan pendidikan Sekolah Dasar (SD) yakni sebanyak 5.626 jiwa atau 41,12% dari total penduduk (13.685 jiwa). Disusul oleh penduduk yang tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 2.797 jiwa (20,44%) dan penduduk yang masih menempuh pendidikan formal sebanyak 2.604

jiwa (19,02%). Kelompok penduduk yang berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 2.088 jiwa (15,25%), sedangkan penduduk yang berpendidikan tinggi (D3, S-1, dan S-2) secara keseluruhan hanya 2,2% dari total penduduk. Sebaliknya, terdapat penduduk yang tidak pernah mengenyam pendidikan sama sekali 231 jiwa (1,69%) dan 39 jiwa (0,28%), yang tidak menamatkan pendidikan dasar.

d. Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kalurahan Pacarejo, dalam tingkatan pekerjaan penduduk di Kalurahan Pacarejo sebenarnya tersebar ke dalam beberapa jenis pekerjaan masing-masing, seperti yang diterangkan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan**

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Buruh Tani	253 Jiwa	4,51%
2.	PNS	81 Jiwa	1,45%
3.	Pedagang	112 Jiwa	2,00%
4.	Montir	5 Jiwa	0,09%
5.	Guru Swasta	24 Jiwa	0,43%
6.	Seniman	3 Jiwa	0,05%
7.	Tukang Batu	11 Jiwa	0,20%
8.	Karyawan Perusahaan Swasta	1.224 Jiwa	21,85%
9.	Ibu Rumah Tangga	1.542 Jiwa	27,52%
10.	Pensiunan	43 Jiwa	0,77%
11.	Buruh Harian Lepas	2.272 Jiwa	40,53%
12.	Sopir	33 Jiwa	0,59%
	<b>Jumlah Total</b>	5.603 Jiwa	100%

(Sumber: Profil Kaluraha Pacarejo, tahun 2024)

Berdasarkan data sebaran ketenagakerjaan dari 5.603 jiwa penduduk Kalurahan Pacarejo menunjukkan bahwa mayoritas penduduk bekerja sebagai buruh harian lepas, yakni sebanyak 2.272 orang atau 40,53% dari total Angkatan kerja. Ibu rumah tangga menempati posisi kedua dengan jumlah 1.542 Jiwa (27,54%), disusul oleh pegawai swasta sebanyak 1.224 jiwa (21,85%). Kelompok pekerjaan lainnya seperti buruh tani (4,51%), dan



PNS (1,45%) memiliki porsi yang lebih kecil. Sedangkan pekerjaan seperti guru, montir dn tukang batu masing-masing hanya mencakup kurang dari 1% dari total Angkatan kerja.

e. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kalurahan Pacarejo berikut ini merupakan tabel dari persebaran penduduk menurut agama yang dianut adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.7 1 Jumlah Penduduk Agama**

No.	Agama	Jumlah	Persentase (%)
1.	Islam	16.870 Jiwa	99,35%
2.	Kristen	48 Jiwa	0,28%
3.	Katholik	62 Jiwa	0,37%
4.	Hindu	-	0,00%
5.	Budha	-	0,00%
	<b>Jumlah Total</b>	16.980 Jiwa	100%

(Sumber: Profil Kalurahan Pacarejo, tahun 2024)

Data menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Pacarejo beragama Islam. Sebanyak 16.870 jiwa tinggal disana, mewakili 99,35% dari total populasi yang berjumlah 16.980 jiwa. Umat Kristen diwakili oleh 48 jiwa (0,28%) dan umat Katolik oleh 62 Jiwa (0,37%). Tidak ada pemeluk agama Hindu atau Budha yang terdaftar.

## **E. Kondisi Ekonomi**

Secara umum, struktur perekonomian Kalurahan Pacarejo masih didominasi oleh sektor primer, khususnya pertanian, peternakan, dan kegiatan informal seperti buruh harian lepas. Mayoritas penduduk bekerja sebagai buruh harian lepas (40,53%) dan buruh tani (4,51%), yang mencerminkan ketergantungan masyarakat terhadap pekerjaan serabutan dan upah rendah. Sebanyak 4.238 keluarga memiliki lahan pertanian, utamanya berupa singkong dan kedelai, serta tanaman buah-buahan seperti pisang, manga, dan papaya, yang sebagian besar dipasarkan melalui jalur lokal.

Peternakan, dengan jumlah ternak yang relatif besar, juga memberikan kontribusi bagi perekonomian kotamadya, meskipun pemanfaatan potensi tersebut belum didukung oleh infrastruktur dan sistem distribusi yang memadai. Di sisi lain, potensi kehutanan dan perikanan air tawar juga ada, tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal karena terbatasnya fasilitas pendukung dan pengelolaan nilai tambah yang belum memadai. Usaha mikro dan lembaga ekonomi desa seperti BUMDes telah berdiri, tetapi belum memenuhi fungsi dasar dan belum berkembang menjadi penggerak ekonomi lokal. Terbatasnya pengembangan industri kecil, sektor jasa, dan pariwisata menunjukkan bahwa diversifikasi ekonomi belum berjalan efektif. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis untuk meningkatkan sumber daya manusia, memperkuat kelembagaan ekonomi, dan mengoptimalkan pemanfaatan potensi lokal secara terpadu dan berkelanjutan guna mendorong transformasi ekonomi yang lebih inklusif dan mandiri di tingkat kalurahan.

## **F. Sarana dan Prasarana**

### **a. Sarana Kesehatan**

Sarana Kesehatan di Kalurahan Pacarejo didukung oleh 1 unit puskesmas, 1 unit puskesmas pembantu, 28 unit posyandu, dan 2 unit rumah bersalin. Hal ini menunjukkan tersedianya fasilitas Kesehatan dasar di sebagian besar wilayah pelayanan. Fasilitas-fasilitas tersebut merupakan tanda positif dari komitmen pemerintah Kalurahan dalam menjamin akses layanan Kesehatan penduduk, terutama bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, anak kecil, dan lansia. Selain itu, 3 orang bidan dan 7 orang perawat turut berkontribusi dalam menambah jumlah tenaga Kesehatan setempat. Namun, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kalurahan Pacarejo (16.980 jiwa), jumlah tenaga kesehatan yang tersedia masih belum sebanding dengan beban pelayanan. Proporsi bidan dan perawat masih relatif rendah, sehingga dapat berdampak pada keterbatasan waktu, intensitas pelayanan, dan keberlanjutan layanan preventif.

### **b. Sarana Pendidikan**

Berdasarkan data profil Kalurahan Pacarejo, sarana pendidikan yang tersedia mencakup berbagai jenjang, mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi. Terdapat 8 Kelompok Bermain (KB) dan 8 Taman Kanak-kanak (TK) yang difokuskan pada PAUD, serta 9 Sekolah Dasar (SD) yang tersebar di beberapa dusun, yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat. Namun, sarana pendidikan menengah masih terbatas. Kalurahan ini hanya memiliki 1 Sekolah Menengah Pertama

(SMP), dan tidak memiliki Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), sehingga siswa harus melanjutkan pendidikan di luar wilayah kalurahan. Hal ini dapat menimbulkan kesenjangan akses pendidikan, terutama bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Di sisi lain, terdapat 1 perguruan tinggi di wilayah tersebut, yang menyediakan akses pendidikan bagi masyarakat. Secara keseluruhan, sarana pendidikan di Kalurahan Pacarejo relatif memadai untuk jenjang pendidikan dasar, namun perlu diperluas untuk jenjang menengah atas. Hal ini juga mencakup peningkatan kualitas sarana belajar dan tenaga pengajar guna mendorong kemajuan pendidikan secara merata dan berkelanjutan.

c. Sarana Peribadatan

Berdasarkan profil Kalurahan Pacarejo, di wilayah ini terdapat cukup banyak tempat ibadah yang berfungsi sebagai pusat kegiatan keagamaan masyarakat. Tempat ibadah yang ada di Kalurahan Pacarejo antara lain:

- 1) 30 buah Masjid
- 2) 24 buah Mushola
- 3) 1 buah Gereja Kristen Protestan

Masjid dan Mushola mendominasi. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Kalurahan Pacarejo beragama Islam (sekitar 99,35% dari jumlah total penduduk). Tempat ibadah tersebut tersebar di hampir seluruh dusun, sehingga memudahkan masyarakat untuk melaksanakan ibadah harian, kegiatan keagamaan mingguan, dan kegiatan sosial keagamaan mingguan, dan kegiatan sosial pendidikan agama, pengajian, dan perayaan hari besar

islam. Meskipun jumlah pemeluk agama non-muslim seperti Kristen dan Katolik sangat sedikit (kurang dari 1% dari jumlah penduduk total), Kalurahan Pacarejo tetap memiliki gereja Kristen Protestan sebagai tanda penghormatan terhadap keberagaman dan hak semua warga untuk menjalankan agamanya.

d. Sarana Umum

Kalurahan Pacarejo memiliki berbagai sarana umum yang cukup menunjang kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Jaringan transportasi meliputi jalan aspal sepanjang 14,35 km, jalan kerikil sepanjang 251,7km, jalan tanah sepanjang 16,55 km, dan jalan beton sepanjang 46 km. sarana komunikasi meliputi 115 stasiun radio, 4.332 perangkat televisi dan surat kabar. Air minum disediakan oleh 420 sumur gali, 27 sumur pompa, 74 sistem PAH, dan 13 waduk. Sistem pembuangan limbah dan 4.785 toilet keluarga melengkapi fasilitas tersebut. Kantor Kalurahan dan balai kalurahan dengan fasilitas administrasi lengkap tersedia untuk administrasi. Keamanan meliputi 136 pos keamanan dan 126 anggota hansip. Fasilitas ibadah meliputi 30 masjid, 24 mushola, dan sebuah gereja Kristen. Fasilitas olahraga meliputi 3 lapangan sepak bola, 17 lapangan bulu tangkis, dan 15 lapangan voli. Pelayanan Kesehatan disediakan sebuah puskesmas, sebuah puskesmas pembantu, 28 posyandu, dan dua rumah bersalin, dengan dukungan tenaga medis seperti bidan dan perawat. Fasilitas pendidikan meliputi 11 Taman Kanak-kanak, 9 Sekolah Dasar, 2 Sekolah Menengah Pertama, 1 Perguruan Tinggi, 1 Lembaga Pendidikan Agama, dan sebuah perpustakaan

Kalurahan. Di sektor energi, 4.732 rumah tangga penerima listrik dari PLN, tersedia 7 generatif diesel, dan 3.032 keluarga masih menggunakan kayu bakar. Fasilitas sanitasi meliputi 28 tempat sampah, pembuangan sampah ditangani secara mandiri oleh kotamadya tanpa TPS atau kendaraan pengangkut sampah. Selain itu, ada tujuh objek wisata, seperti danau, gua, dan monument budaya, yang secara aktif digunakan oleh warga.

#### **G. Kondisi Sosial dan Budaya**

Kondisi sosial budaya di Kalurahan Pacarejo mencerminkan tatanan sosial yang mencerminkan tatanan sosial yang harmonis dengan kesadaran kolektif yang kuat akan kebersamaan, gotong royong, dan pelestarian nilai-nilai adat. Warga Kalurahan Pacarejo merupakan masyarakat yang kuat dan saling mendukung dalam bidang kehidupan, termasuk kegiatan sosial, pembangunan fisik, serta praktik adat dan agama. Semangat gotong royong bukan hanya slogan, tetapi juga tercermin dalam berbagai kegiatan masyarakat seperti pembangunan balai Kalurahan, pembangunan jalan, pendirian tempat ibadah, ronda malam, dan tanggap darurat. Kohesi sosial yang kuat ini diperkuat oleh lembaga-lembaga lokal seperti RT, RW, Karang Taruna, PKK, Paguyuban Tani. dan Kader Kesehatan, yang secara partisipatif menjalankan fungsi sosial dan pemerintahan di tingkat akar rumput. Kehidupan sosial masyarakat Pacarejo tumbuh subur dalam suasana kebersamaan, saling menghormati, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan kalurahan baik secara fisik maupun dari segi nilai-nilai kemasyarakatan.

Secara budaya, masyarakat Kalurahan Pacarejo memiliki kekayaan adat istiadat yang masih lestari dan dilestarikan secara turun-menurun. Adat istiadat bukan hanya sekedar warisan simbolis, tetapi menjadi praktik hidup yang terus berlanjut sepanjang siklus kehidupan masyarakat. Tradisi kelahiran seperti *Ngapati*, *Mitoni*, *Selapan*, dan *Wetonan* masih dipraktikkan dan merupakan bentuk penghormatan terhadap kehidupan baru dan nilai-nilai spiritual yang mendalam. Dalam acara pernikahan, upacara adat lamaran, *Ndodhok Kori*, *Sanggan*, *Panggih Manten*, dan berbagai prosesi seperti *Bubak Kampung*, *Pelangkah Wates*, dan *Tumpak Punjen* menunjukkan pentingnya adat istiadat dalam perjalanan hidup seseorang. Bahkan setelah kematian masyarakat masih menganut adat istiadat seperti *Tingkepan*, *Pitung Dina*, *Nyatus*, dan *Nyewu*, yang tidak hanya merupakan bentuk penghormatan kepada orang yang meninggal, tetapi juga mempererat ikatan keluarga dan kohesi sosial. Selain itu, kegiatan seni dan budaya menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat Pacarejo. Berbagai kesenian tradisional seperti *wayang kulit*, *Kerawitan*, *Ketoprak*, *Jathilan*, *Reog*, *Sholawatan*, *Campusari*, dan *Tari Gembyong* berkembang di setiap Kalurahan. Perkumpulan kesenian ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga menjadi wadah belajar bagi generasi muda untuk belajar dan mengapresiasi warisan budaya mereka sendiri. Acara budaya seperti *Sandrahan*, *Rosulan* (bersih-bersih kalurahan), *Mauludan*, dan *Besik Tlogo* merupakan bagian dari kalender budaya tahunan dan mempererat hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kegiatan ini melibatkan

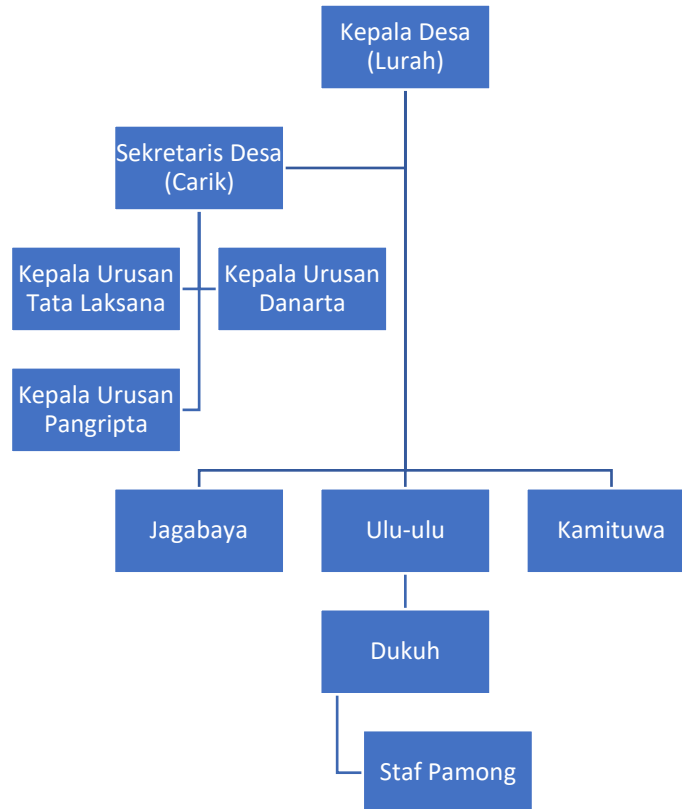
semua lapisan masyarakat, menciptakan suasana spiritual dan sosial yang kuat, serta memperkuat identitas budaya lokal di masa depan perubahan.

Kondisi sosial dan budaya Kalurahan Pacarejo terintegrasi dengan kegiatan ekonomi tradisional. Masyarakat memanfaatkan ketrampilan lokal seperti ukir kayu, batik tulis, anyaman bamboo, dan produksi pangan tradisional sebagai bagian dari ekonomi kreatif Kalurahan. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga merupakan bagian dari ekspresi budaya yang mendukung pelestarian pengetahuan lokal. Pasar panganan tradisional dan pameran kerajinan juga mempromosikan budaya sekaligus mendukung pemberdayaan ekonomi warga. Pertanian dan peternakan yang masih dipraktikkan dilakukan dengan pendekatan yang lebih modern tetapi tetap melandaskan pada nilai-nilai tradisional, seperti pemilihan waktu tanam sesuai dengan Pranata Mangsa dan mengikuti petunjuk adat setempat. Secara keseluruhan, kondisi sosial dan budaya Kalurahan Pacarejo mencerminkan masyarakat yang tidak hanya tangguh secara struktural tetapi juga berakar kuat pada nilai-nilai luhur. Hubungan sosial yang harmonis, tingkat keterlibatan warga yang tinggi, dan pelestarian budaya yang konsisten menjadikan kalurahan ini sebagai contoh keberhasilan kombinasi pembangunan dan identitas lokal. Tradisi budaya tidak dipandang sebagai masa lalu yang usang, tetapi sebagai modal sosial yang hidup dan dinamis yang menjadi landasan bagi masa depan yang bermartabat dan berkelanjutan.



## H. Struktur Pemerintah Kalurahan

**Bagan 2. 1 Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Pacarejo**



(Sumber: Profil Kalurahan Pacarejo, tahun 2025)

Berikut adalah tugas masing-masing aparatur kalurahan antara lain adalah :

### 1. Lurah

Lurah memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan Kalurahan: memimpin, mengatur, dan melaksanakan administrasi serta regulasi kalurahan, termasuk pengelolaan keuangan.

- b. Melaksanakan Pembangunan Kalurahan: merencanakan dan mengawasi proyek pembangunan serta mengoptimalkan potensi desa.
- c. Membina Kemasyarakatan Kalurahan: menjaga ketertiban, kerukunan, mengembangkan budaya, mendorong gotong royong, dan menyelesaikan perselisihan.
- d. Memberdayakan Masyarakat Kalurahan: meningkatkan kapasitas, mendorong partisipasi aktif, mengembangkan kelembagaan, dan memfasilitasi akses layanan publik.

## 2. Carik

Carik memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Administrasi Pemerintahan: penyelenggara urusan kesekretariatan (surat menyurat, kearsipan, penata dokumen resmi), urusan umum (penyelenggaraan tata usaha perangkat kalurahan, pengadaan sarana dan prasarana kantor, persiapan rapat pengelolaan asset kalurahan, pelayanan umum) dan koordinasi kegiatan tata usaha seluruh perangkat kalurahan.
- b. Manajemen Keuangan Kalurahan: mengelola pengelolaan keuangan kalurahan, termasuk pencatatan pendapatan dan pengeluaran, audit keuangan, dan pengelolaan pendapatan kalurahan, perangkat kalurahan, dan lembaga lainnya.
- c. Perencanaan dan Pelaporan: penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), investarisasi data untuk

pembangunan, pemantauan dan evaluasi program kalurahan, dan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan.

- d. Koordinasi: koordinasi penyusunan kebijakan dan program kerja pemerintahan kalurahan koordinasi pelaksanaan tugas teknis dan tugas kewilayahan.
- e. Pelayanan public: memberikan layanan administratif teknis kepada seluruh unit organisasi di lingkungan pemerintah kalurahan dan pemerintah kota, seperti pengurusan akta dan dokumen lainnya.
- f. Tugas lainnya: melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh lurah

### 3. Kepala Urusan Tata Laksana

Kepala Urusan Tata Laksana memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Manajemen surat menyurat: mengelola semua hal yang berkaitan dengan surat menyurat masuk dan keluar kalurahan. Ini termasuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mengarsipkan surat-surat untuk memastikan surat tersebut terorganisasi dengan jelas.
- b. Manajemen arsip kalurahan: bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen dokumen dan arsip kalurahan, memastikan bahwa semua dokumen penting disimpan dengan aman dan mudah diambil kembali saat dibutuhkan.
- c. Manajemen peralatan kalurahan: mendukung organisasi manajemen perangkat desa, seperti catatan personel, catatan kehadiran, dan surat tugas.

- d. Aset/pengadaan dan manajemen kalurahan: mengelola pengadaan perlengkapan operasional untuk kantor kalurahan dan memelihara inventaris aset kalurahan, seperti gedung, kendaraan, dan peralatan kantor.
- e. Layanan publik: mendukung kotamadya dalam menyediakan layanan dasar yang terkait dengan administrasi umum, seperti menyiapkan surat rekomendasi atau permintaan lainnya.
- f. Persiapan rapat: mempersiapkan semua tugas untuk rapat kalurahan, termasuk menyiapkan tempat, undangan, dan dokumen yang diperlukan.
- g. Tugas lain: melakukan tugas resmi lainnya yang diberikan oleh Carik dan Lurah.

#### 4. Kepala Urusan Danarta

Kepala Urusan Danarta memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan kalurahan: bertanggung jawab atas pencatatan dan pengelolaan keuangan kalurahan secara menyeluruh. Termasuk mencatat seluruh pemasukan dan pengeluaran dana desa.
- b. Penyusunan anggaran: membantu carik dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), termasuk merinci sumber-sumber pendapatan kalurahan pengeluaran terkait untuk berbagai program dan kegiatan.

- c. Akuntansi keuangan: mengelola akuntansi keuangan kalurahan secara sistematis dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh pemasukan dan pengeluaran tercatat secara akurat.
- d. Pemeriksaan dan pelaporan: membantu dalam peninjauan semua bukti transaksi keuangan dan secara berkala menyiapkan laporan keuangan kalurahan, baik laporan pertanggungjawaban maupun laporan lainnya sesuai kebutuhan.
- e. Pengelolaan pendapatan dan belanja: mengelola pendapatan dana kalurahan dari berbagai sumber (misalnya, dana ddesa pemerintah pusat, alokasi dana desa pemerintah daerah, pendapatan asli desa) dan memastikan pengeluaran sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.
- f. Pengelolaan dana desa: mengelola pembayaran pendapatan (gaji/honorarium) untuk Lurah, dan insentif untuk lembaga desa lainnya.
- g. Tugas lainnya: melaksanakan tugas keuangan lainnya yang diberikan oleh Carik atau Lurah.

#### 5. Kepala Urusan Pangripta

Kepala Urusan Pangripta memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Penyusunan Rencana Pembangunan Kalurahan: meliputi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

- b. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes): bertanggung jawab atas penyusunan rancangan APBDes, perubahan, dan perhitungannya.
- c. Inventarisasi Data Pembangunan: pengumpulan dan pengelolaan data yang diperlukan untuk perencanaan pembangunan kalurahan.
- d. Pemantauan dan evaluasi program: memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan dan kegiatan kalurahan yang sedang berjalan.
- e. Penyusun laporan: penyusunan laporan tentang pelaksanaan program, keuangan, dan kegiatan kalurahan.

#### 6. Jagabaya

Jagabaya memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menjaga keamanan dan ketertiban: ini adalah tanggung jawab utama mereka. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan keamanan dan ketertiban diseluruh kalurahan.
- b. Patrol: patrol kalurahan secara berkala untuk memantau situasi, mencegah kejahatan, dan mengidentifikasi potensi pelanggaran keamanan.
- c. Pelaporan insiden keamanan: jika terjadi insiden keamanan seperti pencurian, perkelahian, dan aktivitas mencurigakan lainnya, Jagabaya wajib melaporkannya kepada Lurah atau petugas penegak hukum terkait (misalnya Polisi atau Babinsa).

- d. Membantu menyelesaikan konflik kecil: Jagabaya sering bertindak sebagai mediator atau pembantu dalam menyelesaikan perselisihan atau konflik kecil antar warga sebelum masalah meningkat.
- e. Mengatur Langkah-langkah keamanan lingkungan: terkadang mereka juga terlibat dalam mengatur atau memimpin langkah-langkah keamanan lingkungan dengan warga, seperti siskamling (sistem keamanan lingkungan) atau patrol.
- f. Membantu Lurah.
- g. Bekerja di bawah arahan Lurah atau pejabat kalurahan lainnya dalam hal keamanan dan ketertiban umum.
- h. Bantuan untuk tamu dan pendatang baru: pastikan bahwa pendatang baru atau tamu yang menginap di kalurahan terdaftar dan tidak menimbulkan gangguan.

## 7. Ulu-ulu

Ulu-ulu memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Pengaturan dan penyaluran air irigasi: mereka memastikan bahwa air dari sumber irigasi (sungai, waduk, atau kanal) didistribusikan secara adil dan merata keseluruh lahan pertanian di kalurahan, sesuai dengan rencana penanaman dan kebutuhan petani.
- b. Pemeliharaan kanal irigasi: Ulu-ulu bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kanal tidak tersumbat oleh sampah, lumpur, atau tanaman liar.

- c. Penyelesaian masalah irigasi: jika terjadi masalah terkait air, seperti kekurangan air di suatu wilayah atau konflik antar petani tentang penyaluran air, Ulu-ulu adalah yang pertama mencari solusi.
- d. Pemantauan penggunaan air: memastikan tidak ada penyalahgunaan air irigasi oleh orang yang tidak berwenang atau pemborosan air.
- e. Pelaporan status irigasi: melaporkan kepada Lurah atau otoritas terkait tentang kondisi jaringan irigasi dan kebutuhan air di kalurahan.
- f. Mendukung pembangunan dan kesejahteraan: di beberapa daerah Ulu-ulu juga dapat mengambil tugas yang lebih komprehensif, seperti mendukung Lurah dalam pengembangan infrastruktur kalurahan, sosialisasi program ekonomi dan lingkungan, dan masalah perencanaan tata ruang, khususnya yang terkait dengan penggunaan lahan pertanian.

#### 8. Kamituwa

Kamituwa memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Pengembangan keamanan dan ketertiban: menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah setempat, termasuk mengoordinasikan ronda malam atau jaga lingkungan.
- b. Pelaksanaan tata Kelola: mendukung Lurah dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah daerah di tingkat kalurahan.
- c. Pembangunan dan peningkatan komunitas: mempromosikan berbagai kegiatan masyarakat dalam berbagai kegiatan kalurahan,



seperti gotong royong, pembangunan infrastruktur, atau program pemberdayaan ekonomi.

- d. Pendorong partisipasi masyarakat: mengundang dan memobilisasi warga setempat untuk berpartisipasi aktif dalam rapat kaliurahan, pembangunan, dan kegiatan sosial lainnya.
- e. Pemantauan pelaksanaan pembangunan: memantau dan memonitor kemajuan pembangunan di wilayah setempat, misalnya pembangunan jalan, kanal air, atau fasilitas umum lainnya.
- f. Pengumpulan dan pelaporan data: melakukan pengumpulan data tentang warga, aset, dan kegiatan di kalurahan dan melaporkannya kepada Lurah.
- g. Mediasi konflik: kami membantu menyelesaikan perselisihan atau masalah kecil antara warga dusun anda sebelum meningkat.
- h. Perwakilan padukuhan: bertindak sebagai penghubung antara warga padukuhan dan pemerintah kalurahan dan menyampaikan permintaan warga serta keluhan warga kepada Lurah.

## 9. Dukuh

Dukuh memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan tingkat dusun: mendukung Lurah dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah daerah diwilayahnya, mengumpulkan data kependudukan, aset dan potensi di wilayahnya. Mengolah data penting daerah, seperti data kelahiran, kematian, atau migrasi.

- b. Menjaga keamanan dan ketertiban: mengkoordinasikan tindakan swadaya masyarakat seperti sistem keamanan lingkungan (siskamling) atau patroli malam.
- c. Penguatan dan pemberdayaan masyarakat: mempromosikan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan kalurahan, misalnya melalui kerja sama pembangunan infrastruktur atau kegiatan sosial lainnya. Mendukung Lurah setempat dalam melaksanakan program penguatan masyarakat, seperti pendidikan berkelanjutan atau kegiatan ekonomi produktif. Mempromosikan swadaya masyarakat dan kerja sama timbal balik dalam masyarakat untuk kebaikan bersama.
- d. Layanan padukuhan: memberikan layanan dasar kepada warga dusun, seperti mengantar surat ke kantor kalurahan mendukung mediasi atau menyelesaikan masalah kecil antar warga dusun, bertindak sebagai narahubungan untuk permintaan, keluhan, dan kebutuhan warga di padukuhan,.
- e. Pengawasan pembangunan: memantau dan mengawasi pelaksanaan proyek konstruksi di wilayah dusun., memastikan kemajuan proyek konstruksi yang dijadwalkan dan manfaatnya bagi masyarakat.

#### 10. Staf Pamong

Staf Pamong memiliki tugas sebagai berikut:

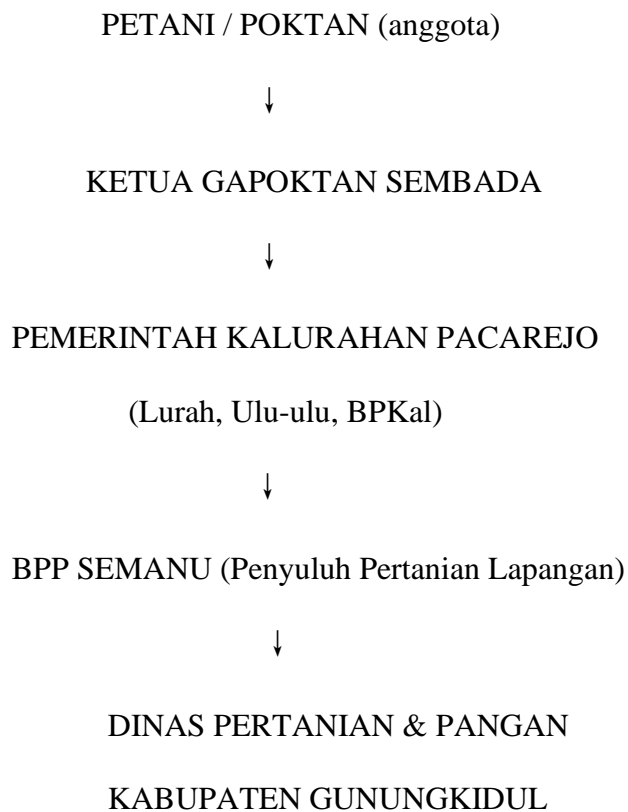
- a. Melaksanakan tugas-tugas pemerintahan: mencakup berbagai fungsi administrative dan pelayanan publik.

- b. Melayani masyarakat: memberikan pelayanan langsung kepada warga, seperti pengurusan dokumen, perizinan, atau informasi.
- c. Membantu Lurah: membantu Lurah dalam menjalankan roda pemerintahan.
- d. Menjaga ketertiban umum: Staf Pamong juga dapat terlibat dalam menjaga ketertiban dan ketentraman umum.

### **I. Gambaran Umum Kelompok Tani**

Kalurahan Pacarejo memiliki struktur kelembagaan pertanian yang relatif kokoh, dengan 28 kelompok tani yang tersebar merata di setiap dusun. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa terdapat keterwakilan kelembagaan petani diseluruh wilayah administrasi Kalurahan. Hal ini merupakan keunggulan yang jelas, karena mencerminkan sistem pertanian berbasis masyarakat yang terorganisasi secara formal dan terintegrasi dengan kondisi sosial setempat. Kelompok tani berfungsi sebagai wadah kolektif yang tidak hanya mengatur produksi pertanian dan distribusi sarana produksi, tetapi juga memainkan peran pendidikan dan pemberdayaan. Melalui kelembagaan ini, petani memperoleh akses terhadap berbagai program pemerintah, pelatihan teknis dari Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Semanu, dan menjadi mitra dalam pelaksanaan program ketahanan pangan desa yang dibiayai dari dana desa. Keterlibatan kelompok tani dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan di tingkat Kalurahan juga menunjukkan bahwa mereka tidak hanya berperan sebagai pelaku ekonomi tetapi juga pelaku sosial-politik dan secara aktif membentuk pembangunan desa. Salah satu wujud nyata upaya ini adalah pembentukan dan

pengembangan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di tingkat Kalurahan dan Kapanewon. Gapoktan menjadi wadah untuk mengorganisir kelompok-kelompok tani agar dapat mengakses bantuan pemerintah, meningkatkan kapasitas melalui pelatihan dan penyuluhan, dan memperkuat posisi tawar dalam pemasaran hasil pertanian. Gapoktan berperan penting dalam menyatukan petani, menjalin kemitraan dengan lembaga eksternal, serta menjadi mitra Pemerintah Kalurahan hingga kabupaten dalam mewujudkan pertanian yang mandiri dan berkelanjutan. Berikut adalah skema relasi singkat dari Gapoktan samapi ke Dinas Pertanian Gunung Kidul.



Skema relasi ini menunjukkan bahwa Gapoktan bukan bekerja sendiri, tetapi terhubung secara sistematis mulai dari petani di lapangan, Pemerintah Kalurahan, lembaga penyuluhan, hingga dinas di tingkat kabupaten. Demi

mensejahterakan petani Pemerintah Kalurahan juga membuat strategi-strategi yang sekiranya dapat membantu dan membimbing para petani. Berikut adalah struktur Gapoktan sembada :

**Tabel 2.8 Struktur Organisasi Gapoktan Sembada di Kalurahan Pacarejo**

No	Nama	Jabatan
1.	Sukiman	Ketua Gapoktan
2.	Agus Setiawan	Sekretaris Gapoktan
3.	Saridi	Bendahara

Sumber : Gapoktan Sembada

Struktur organisasi Gapoktan Sembada di Kalurahan Pacarejo terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Ketua berperan sebagai pemimpin dan penentu arah kebijakan organisasi, Sekretaris bertugas mengelola administrasi dan dokumentasi kegiatan, sedangkan Bendahara bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan. Dengan pembagian tugas yang jelas ini, Gapoktan Sembada dapat menjalankan program kerja secara terarah, transparan, dan efektif demi meningkatkan kesejahteraan para anggotanya

Namun, di balik struktur yang relatif kuat ini, kelompok tani di Kalurahan Pacarejo menghadapi tantangan ekologi dan teknis yang kompleks. Sebagian besar lahan pertanian di Pacarejo merupakan lahan kering atau tadah hujan dan dengan demikian sangat bergantung pada pola hujan musiman. Hal ini menyebabkan siklus tanam tidak stabil, dan produksi pertanian rentan terhadap perubahan iklim, terutama selama musim kemarau yang panjang.

Ketergantungan pada air hujan ini juga menunjukkan kurangnya infrastruktur irigasi teknis dan alternatif yang sesuai untuk pertanian, seperti waduk dan sumur bor. Selain itu, hama burung, khususnya burung Pipit dan Gelatik, menjadi masalah yang cukup serius disetiap tahunnya. Hama ini menyerang pada masa kritis menjelang panen, sehingga menurunkan produktivitas sehingga memaksa petani untuk terus-menerus menggunakan perlindungan manual. Berbagai upaya tradisional seperti memasang panjer, jarring, dan pengendalian kebisingan belum cukup efektif untuk mengendalikan serangan hama ini secara sistematis.

Masalah ini menunjukkan bahwa meskipun kelompok tani secara formal sudah ada, kapasitas teknis dan kemampuan adaptasi mereka terhadap lingkungan masih terbatas. Kelompok tani di Pacarejo belum mampu sepenuhnya merangkul transisi ke pertanian berbasis inovasi teknologi, baik dalam sistem irigasi, pengendalian hama, maupun diverifikasi komoditas. Penyediaan program pelatihan dan penyuluhan juga masih bersifat umum dan tidak menjawab kebutuhan khusus masing-masing kelompok atau daerah. Misalnya, kelompok tani di Padukuhan-padukuhan yang berbatasan dengan hutan atau lahan terbuka mungkin memiliki pendekatan yang berbeda terhadap pengendalian hama dibandingkan padukuhan-padukuhan di daerah padat penduduk. Kesenjangan ini menyoroti pentingnya menilai kebutuhan kelompok tani menurut daerah komoditas berkualitas tinggi agar lebih tepat sasaran dalam upaya pembangunan pertanian. Dari segi sosial, keberadaan 28 kelompok tani tersebut juga menjadi landasan yang penting bagi penguatan jaringan sosial

petani. selain untuk memenuhi tugas ekonomi, kelompok tani itu juga menjadi ruang untuk berdiskusi, bekerja sama, dan saling mendukung sehingga mempererat ikatan sosial warga. Kegiatan seperti gotong royong di sawah, ronda malam untuk menjaga tanaman dari hama, dan diskusi kelompok merupakan bentuk integrasi antara lembaga formal dengan nilai-nilai tradisional masyarakat Pacarejo. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok tani bukan hanya sekedar unit ekonomi, tetapi juga berfungsi sebagai modal sosial yang dapat memperkuat ketahanan masyarakat terhadap ancaman ekonomi, lingkungan, dan sosial.

**BAB III**

**ANALISIS STRATEGI PEMERINTAH KALURAHAN DALAM**

**PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI**

**(Studi pada Kelompok Tani Kalurahan Pacarejo, Kapanewon Semanu,**

**Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta)**

Pada bab ini, peneliti memaparkan hasil penelitian lapangan berdasarkan data dan informasi hasil wawancara dengan topik Strategi Pemerintah Kalurahan dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Kalurahan Pacarejo, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul. Analisis data dilakukan terutama berdasarkan tanggapan informan. Peneliti memaparkan temuan-temuan yang relevan dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui strategi pemerintah dalam pemberdayaan kelompok tani di Kalurahan Pacarejo. Sebelum menyusun pertanyaan wawancara, peneliti berupaya meyakinkan para informan untuk memastikan keakuratan dan ketertelusuran data yang terkumpul. kelompok tani merupakan organisasi kolektif yang mendukung petani perorangan, berbagi pengetahuan, dan menyediakan sumber daya untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam meningkatkan kapasitas mereka dalam menerapkan standar produksi pangan yang aman. Organisasi ini memainkan peran strategis dalam memainkan peran strategis dalam mempromosikan praktik terbaik dan kepatuhan terhadap standar produksi yang penting bagi Kesehatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Kinerja asosiasi petani dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kerja sama anggota, tujuan bersama, dan akses terhadap informasi. Namun mereka juga menghadapi tantangan yang dapat menghambat



pelaksanaan program yang direncanakan. Paradigma strategi penguatan masyarakat pertanian harus dirumuskan dengan melibatkan partisipasi aktif petani secara maksimal. Pemberdayaan harus difokuskan pada upaya membantu masyarakat sasaran mewujudkan potensinya dengan menggunakan berbagai inovasi yang tersedia. Strategi ini harus ditetapkan melalui proses partisipatif berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat dan aspek praktis, yang mencakup kontribusi individu dan kelompok. Dalam pemberdayaan kelompok tani sendiri pemerintah Kalurahan memiliki peran penting untuk menyusun strategi dalam pemberdayaan petani.

Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 273/Kpts/ot.160/4/2007. Dalam (Masrul Rosidin, 2022) tentang pedoman pembinaan kelembagaan petani, Gapoktan adalah gabungan beberapa kelompok tani yang bekerja sama untuk bersama-sama meningkatkan keuntungan dan efisiensi usaha tani mereka. Gapoktan bertujuan untuk membantu kelompok tani agar beroperasi lebih efisien dan efektif serta menyediakan sarana produksi pertanian, perbaikan, permodalan, atau perluasan usaha tani bagi petani dan kelompok tani dari sektor hulu dan hilir. Selain itu, gapoktan juga bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dan pemasaran produk.

## **A. Strategi Pemerintah dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Kalurahan Pacarejo**

### **1. Strategi Agresif Pemerintah Kalurahan dalam Pemberdayaan Kelompok Tani**

Dalam pemberdayaan kelompok tani, pemerintah Kalurahan Pacarejo memberikan pelatihan bagi kelompok tani. Pemerintah Kalurahan Pacarejo berupaya melalui strategi agresif yang dijalankan untuk mendukung pemberdayaan kelompok tani. Hal ini diungkapkan oleh Pak Suhadi selaku Lurah di Kalurahan Pacarejo bahwa:

“Strategi dari kami Pemerintah Kalurahan yaitu memberikan pelatihan untuk. Pelatihan ini biasanya dilakukan satu tahun sekali. Tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan kepada petani dan itu biasanya didampingi oleh PPL. Pendanaan bersumber dari APBDes, karena sebagian anggaran kami alokasikan untuk kegiatan pemberdayaan, khususnya di sektor pertanian. Selain pelatihan, kami juga membantu petani membuat sumur. Dengan demikian, mereka dapat menanam padi di musim kemarau karena sumber air. Kami juga menyediakan demplot, semacam lahan percontohan. Di sana, petani dapat belajar langsung dan mencoba metode baru sebelum menerapkannya di lahan mereka sendiri”.(Wawancara Pak Suhadi, 20 Juni 2025).

Berdasarkan hasil wawancara, strategi pemberdayaan kelompok tani yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan mencerminkan pendekatan yang terpadu dan berorientasi pada peningkatan kapasitas petani. Salah satu bentuk strateginya adalah dengan mengadakan pelatihan pertanian tahunan secara berkala yang memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada petani, khususnya dalam hal teknik budaya, serta pengendalian hama dan penyakit tanaman. Pelatihan ini biasanya didampingi oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) untuk memastikan materi pelatihan sesuai dengan kondisi setempat. dana untuk

kegiatan ini disediakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang menegaskan komitmen Pemerintah Kalurahan untuk memajukan sektor pertanian sebagai salah satu prioritas pembangunannya. Selain pelatihan, pemerintah juga mendukung kegiatan pengeboran sumur untuk mengatasi kesulitan air di musim kemarau dan memungkinkan petani untuk menanam padi. Selain itu, pemerintah menyediakan lahan percontohan agar petani dapat mencoba metode atau teknologi baru sebelum menerapkannya secara mandiri. Dengan strategi ini, Pemerintah Kalurahan menegaskan komitmennya untuk secara berkelanjutan mendorong kemandirian dan produktivitas kelompok tani.

Ada pula pernyataan yang disampaikan oleh Pak Sudiyatna selaku Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Kapanewon Semanu, bahwa dari pemerintah sendiri sudah melakukan strategi bagi para petani agar lebih maju dan berkembang seperti pada kutipan berikut ini:

“Dari Pemerintah Kalurahan sendiri mendukung kegiatan kelompok tani. salah satu bentuk dukungan mereka yaitu dengan cara memberikan pelatihan rutin yang diadakan pelatihan rutin sebulan sekali itu biasanya dilakukan pada tanggal 10 dan lokasinya bisa berpindah-pindah di setiap padukuhan. Pelatihan ini cukup penting karena petani bisa belajar media tanam yang terbaru atau cara mengatasi masalah yang ada di lapangan. Selain itu Pemerintah Kalurahan juga menyediakan lahan demplot yang lokasinya ada di Padukuhan Dengok Lor. Ada bantuan berupa sumur bor juga di titik yang sumber airnya dekat. Ditempat itu para petani masih bisa bertani di musim kemarau” (Wawancara Pak Sudiyatna, 23 Juni 2025).

Dari hasil wawancara ini menunjukkan kalau Pemerintah Kalurahan cukup berperan aktif dalam mendukung kemajuan petani di Kalurahan Pacarejo.

Bentuk dukungan yang sangat terlihat adalah penyelenggaraan pelatihan yang rutin dilaksanakan setiap bulan pada tanggal 10. Lokasi pelatihan yang bergiliran di setiap padukuhan menegaskan komitmen untuk menjangkau semua wilayah dan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap kelompok tani untuk memperoleh pengetahuan. Materi pelatihan juga disesuaikan dengan kebutuhan setempat, seperti penggunaan media tanam yang lebih efisien dan solusi atas tantangan teknis pertanian. Dengan demikian, petani tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis tetapi juga pengetahuan praktis yang dapat diaplikasikan dalam kegiatan Bertani. Selain pelatihan, dukungan juga diberikan dalam bentuk demplot yang berlokasi di Padukuhan Dengok Lor. Demplot ini memberikan kesempatan penting bagi petani untuk mencoba dan menerapkan Teknik dan metode pertanian baru yang dipelajari dalam pelatihan. Pemerintah Kalurahan juga memperhatikan ketersediaan air di lahan pertanian dengan mendukung pembangunan sumur di dekat sumber air. Sumur ini sangat penting terutama pada musim kemarau karena dapat menyediakan irigasi dan memungkinkan petani untuk terus bercocok tanam tanpa harus bergantung sepenuhnya pada hujan. Mengenai hal ini juga disampaikan oleh Ibu Wabiyem selaku ketua KWT (Kelompok Tani Wanita) di Padukuhan Dengok Lor, seperti kutipan di bawah ini :

“Upaya dari pemerintah kalurahan untuk pemberdayaan kelompok tani yang saya tau, yaitu ada bantuan lahan demplot, sumur bor dan juga kami di fasilitasi tiap bulannya untuk pertemuan dalam pertemuan itu biasanya ada pelatihan. Kalau sumur bor sendiri itu ada satu unit dekat lahan saya, berkat adanya sumur bor saya dan teman-teman petani disekitar situ masih bisa bertani dimusim kemarau kami bisa menanam kacang, kedelai, dan juga ada sayuran” (Wawancara Ibu Wabiyem, 17 Juli 2025)

Dapat diketahui dari hasil wawancara di atas bahwa, pemerintah kalurahan telah menerapkan beberapa inisiatif strategi untuk memberdayakan kelompok tani. ini termasuk menyediakan demplot untuk budidaya pertanian, membangun sumur bor untuk mengatasi kekurangan air selama musim kemarau, dan mengadakan pertemuan bulanan bagi para petani. sumur bor ini memberikan dampak positif, memungkinkan para petani untuk terus menanam seperti tanaman kedelai, kacang tanah, dan bahkan sayuran selama musim kemarau. Pelatihan rutin juga membantu meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan petani, sehingga mereka tidak hanya dapat menimba pengalaman tetapi juga memperoleh wawasan baru yang relevan. Secara keseluruhan, upaya-upaya ini mencerminkan kedekatan holistik pemerintah kalurahan, yang mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan ketahanan dan produktivitas sektor pertanian di wilayah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa Pemerintah Kalurahan Pacarejo berperan aktif dan strategis dalam memberdayakan kelompok tani. Dukungan ini tidak hanya dilakukan dalam bentuk pelatihan rutin yang disesuaikan dengan kebutuhan petani setempat, tetapi juga meliputi penyediaan sarana dan prasarana seperti demplot dan sumur bor. Sesi pelatihan bulanan menunjukkan komitmen untuk memberikan akses yang sama terhadap pengetahuan dan penguatan langsung keterampilan petani. Keterlibatan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) juga memberikan kontribusi yang signifikan untuk menghubungkan teori dan praktik dengan cara yang relevan secara lokal. Penyediaan demplot dan sumur bor juga menunjukkan

bahwa pemerintah kalurahan memperhatikan tidak hanya aspek pendidikan tetapi juga kebutuhan teknis dan infrastruktur yang mendukung keberlanjutan kegiatan pertanian, terutama selama musim kemarau.

Strategi agresif ini secara konseptual dapat dijabarkan ke dalam tiga aspek utama, yaitu pemungkinan (*enabling*), penguatan (*empowering*), dan perlindungan (*protecting*). Ketiganya membentuk satu kesatuan yang saling melengkapi, dengan tujuan menciptakan lingkungan pertanian yang lebih adaptif, mandiri, dan tangguh terhadap berbagai tantangan. Pembahasan berikut akan menguraikan secara rinci bagaimana ketiga aspek tersebut diwujudkan melalui program dan kebijakan yang telah dijalankan oleh Pemerintah Kalurahan Pacarejo dalam konteks pemberdayaan kelompok tani.

#### 1. Pemungkinan

dalam strategi pemberdayaan petani di Kalurahan Pacarejo diwujudkan melalui penciptaan kondisi yang memungkinkan petani untuk mengakses sumber daya dan informasi. Pemerintah kalurahan secara aktif memfasilitasi pelatihan rutin yang didanai melalui APBDes, menyediakan demplot sebagai media belajar, serta menjalin kerja sama dengan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) untuk mendampingi petani. Dukungan ini menunjukkan adanya upaya sistematis dari pemerintah desa dalam membuka peluang bagi kelompok tani untuk berkembang secara mandiri dan terarah.

## 2. Penguatan

dilakukan dengan meningkatkan keterampilan dan kapasitas petani melalui pelatihan teknis pertanian yang rutin, baik di tingkat padukuhan maupun kalurahan. Pelatihan mencakup teknik budidaya, pengendalian hama, dan penggunaan metode pertanian yang lebih efisien. Selain itu, keberadaan demplot sebagai lahan praktik memberikan kesempatan langsung bagi petani untuk menerapkan ilmu yang diperoleh. Dengan pendekatan ini, petani tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis tetapi juga keterampilan praktis yang mendukung peningkatan produktivitas usaha tani mereka.

## 3. Perlindungan

diberikan melalui penyediaan infrastruktur yang menunjang ketahanan pertanian, terutama saat menghadapi musim kemarau. Pembangunan sumur bor di dekat lahan pertanian menjadi langkah konkret dalam menjamin ketersediaan air irigasi, sehingga petani tetap dapat bercocok tanam meskipun curah hujan rendah. Tindakan ini mencerminkan kepedulian pemerintah terhadap keberlanjutan kegiatan pertanian sekaligus sebagai bentuk mitigasi risiko terhadap perubahan iklim dan ketergantungan pada musim.

Penerapan strategi agresif oleh Pemerintah Kalurahan Pacarejo dalam pemberdayaan kelompok tani terbukti memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kapasitas dan keberlangsungan usaha pertanian masyarakat. Melalui pendekatan pemungkinan, pemerintah menciptakan akses

terhadap pelatihan, fasilitas pendukung, dan pendampingan teknis yang membuka peluang bagi petani untuk berkembang secara mandiri. Aspek penguatan dilakukan melalui pelatihan rutin dan penyediaan demplot, yang memperkuat pengetahuan dan keterampilan petani dalam menghadapi tantangan teknis di lapangan. Sementara itu, strategi perlindungan diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur pendukung seperti sumur bor, yang memungkinkan petani tetap produktif di tengah kondisi iklim yang tidak menentu. Ketiga pendekatan ini saling melengkapi dan menjadi wujud nyata komitmen pemerintah kalurahan dalam mendorong kemandirian, ketahanan, dan keberlanjutan sektor pertanian di wilayahnya.

## **2. Strategi Defensif Pemerintah Kalurahan dalam Pemberdayaan**

### **Kelompok Tani**

Dalam pemberdayaan, kelompok tani Pemerintah Kalurahan Pacarejo dan BPP Kapanewon Semanu juga menjalankan strategi defensif. Pemerintah melakukan upaya untuk melindungi kelompok tani dari berbagai resiko seperti gagal panen, serangan hama, cuaca ekstrem, dan anjloknya harga hasil tani. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Sukiman selaku Ketua Gapoktan dan Ketua Bamuskal di Kalurahan Pacarejo, di bawah ini:

“Di Kalurahan Pacarejo ini, hampir setiap tahun mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah melalui BPP. Bantuannya berupa traktor dan bibit, itu hampir setiap tahun kami dapat. Namun dari 28 kelompok tani yang ada tidak semua mendapatkan tapi, pembagiannya bergilir, karena tidak semua dari 28 kelompok tani bisa dapat sekaligus. Misalnya, musim tanam pertama (MH1) sudah mendapatkan bibit padi mungkin musim tanam kedua (MH2) dapatnya kedelai. Kalau untuk pengendalian hama dan menghadapi cuaca ekstrem, itu biasanya di bahas setiap pertemuan kelompok yang diadakan setiap bulan sekali, untuk anggaran pertemuannya dikasih



dari Kalurahan sekitar Rp. 3.200.000 untuk satu tahun anggaran. Saat pertemuan nanti ada perwakilan dari Kalurahan, tapi tidak mesti harus ada tiap pertemuan. Waktu kemarin ada gagal panen karena kemarau panjang, pemerintah kalurahan juga ikut turun tangan dan mengupayakan pembuatan sumur bor agar lahan tetap bisa ditanami” (wawancara Pak Sukiman, 20 Juni 2025).

Dari hasil wawancara dengan Ketua Gapoktan, dapat dilihat bahwa pemerintah sudah menjalankan strategi defensif dalam upaya pemberdayaan kelompok tani di Kalurahan Pacarejo upaya konkretnya memberikan dukungan kepada kelompok tani yang terdampak risiko pertanian. Misalnya di Pacarejo, kelompok tani hampir setiap tahun menerima dukungan dari pemerintah daerah berupa traktor dan benih melalui BPP. Namun, dukungan tersebut tidak diberikan kepada semua kelompok secara serentak, melainkan secara bergiliran. Selain dukungan materiil, hasil wawancara juga menegaskan peran kelembagaan kelompok tani melalui pertemuan rutin bulanan sebagai wadah penting dalam menyusun Langkah-langkah penanggulangan hama dan cuaca ekstrem. Diskusi-diskusi merupakan bentuk pengorganisasian petani secara partisipatif, dimana kelompok tani tidak hanya menerima dukungan pasif, tetapi terlibat aktif dalam mengidentifikasi masalah dan menyusun solusi. Dukungan anggaran tahunan pemerintah kalurahan untuk pertemuan-pertemuan tersebut, yang jumlahnya mencapai Rp. 3.200.000. Memang terbatas, tetapi menunjukkan bahwa pemerintah kalurahan berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan forum diskusi kelompok tani sebagai sarana pencegahan dan koordinasi internal. Selain itu, gagal panen akibat kemarau panjang dan curah hujan rendah sangat menguji ketahanan pertanian di Pacarejo. Respon pemerintah berupa pengeboran sumur merupakan langkah tanggap darurat untuk mencegah kerugian yang

berkelanjutan dan mempertahankan produktivitas lahan pertanian meskipun menghadapi ancaman iklim. Sumur bukan hanya solusi jangka pendek untuk mengatasi kekeringan, tetapi juga investasi jangka panjang dalam pertanian yang beradaptasi dengan cuaca. Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Watini selaku ketua Kelompok Tani Wanita (KWT) di Padukuhan Jasem Kidul, seperti pada kutipan di bawah ini:

“Pemerintah sudah cukup berupaya untuk membantu kami, mulai dari pelatihan yang ada di setiap bulannya. Biasanya tidak semua kami dalam kelompok yang ikut tetapi hanya ada perwakilan, ada juga bantuan pupuk dan bibit. Kami juga dikasih sumur bor, setelah itu langsung dilakukan uji coba penanaman padi. Percobaanya cukup berhasil, hanya saja karena tidak semua disekitaran sumur bor ikut menanam padi, jadi waktu panen kami panennya cuman sedikit karena sudah dihabiskan sama burung” (Wawancara Ibu Watini, 17 Juli 2025)

Dari hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa pemerintah sudah berupaya dalam mendukung petani. berbagai program pendampingan seperti pelatihan bulanan, penyediaan pupuk dan benih, serta pembangunan sumur bor untuk irigasi. Pelatihan-pelatihan ini mencerminkan upaya penguatan kapasitas petani. Sumur bor tersebut langsung digunakan untuk uji coba budidaya padi dan mencapai hasil yang memuaskan. Namun, tantangan muncul karena tidak semua petani di wilayah tersebut berpartisipasi dalam penanaman padi, sehingga hasil panen kurang optimal akibat serangan burung di lahan pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan program pendampingan akan lebih optimal apabila semua petani terlibat aktif dalam proses budidaya secara bersamaam.

Dalam mengatasi berbagai permasalahan teknis di sektor pertanian, kelompok tani di Kalurahan Pacarejo tidak hanya mengandalkan dukungan Pemerintah Kalurahan saja, tetapi juga mendapatkan pendampingan dari Balai

Penyuluhan Pertanian (BPP) Kapanewon Semanu. Sebagai mitra teknis, BPP berperan penting dalam menyelesaikan permasalahan di lapangan, seperti serangan hama, penyakit tanaman, pola tanam yang tidak tepat, dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Kehadiran penyuluh pertanian PPL dari BPP memberikan informasi terkini tentang teknologi pertanian, cara bercocok tanam yang lebih efisien, dan pilihan penyelesaian masalah yang tepat kepada petani. Kolaborasi antara kelompok tani dan BPP ini menjadi pilar penting dalam memperkuat katahanan dan ketahanan usaha tani di tingkat lokal. Kerjasama ini diketahui melalui wawancara berasama Pak Sudiyatna selaku PPL di Kapanewon Semanu, seperti kutipan di bawah ini:

“Dari BPP untuk penyaluran pupuk ke kelompok itu diadakan setiap tahun. selain pupuk, kami juga menyalurkan bantuan, bibit, dan alat-alat pertanian yang bisa memudahkan petani dalam bertani. Bantuan itu kami sesuaikan dengan kebutuhan lapangan. Kalau untuk penyuluhan dan pemberian informasi kepada kelompok tani kami itu kami lakukan secara rutin, yang paling efektif itu ketika pertemuan rutin kelompok tani. Disitu kami bisa langsung menyampaikan informasi dan berdiskusi dengan para petani, jadi lebih paham situasi yang dihadapi seperti apa. Dalam mengatasi gagal panen kami melihat dulu faktor apa yang membuat petani menjadi gagal panen, apakah karena bibit atau seperti tahun kemarin karena curah hujan rendah maka disediakan sumur bor”(Wawancara Pak Sudiyatna, 23 Juni 2025).

Dalam upaya pemberdayaan kelompok tani, BPP sudah menjalankan strategi defensif. Bantuan dari BPP tidak hanya terbatas dengan Langkah-langkah teknis, tetapi juga mencakup aspek keberlanjutan dan ketahanan psikologis petani. setiap tahun, BPP menyalurkan bantuan berupa pupuk, benih dan peralatan pertanian dasar kepada kelompok tani. Bantuan ini tidak disalurkan secara merata, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi setempat berdasarkan hasil pemantauan dan komunikasi dengan petani. Hal ini

merupakan perlindungan awal yang penting untuk membantu kelompok tani mempertahankan produktivitasnya, terutama dalam menghadapi keterbatasan sumber daya dan ketidakpastian iklim yang mengancam. Selain itu, BPP menjalin kontak langsung dengan kelompok tani pertemuan rutin. Pertemuan-pertemuan ini merupakan forum yang paling efektif untuk bertukar informasi, menanggapi keluhan, dan membangun hubungan yang erat antara penyuluh dan petani. forum semacam ini kerap kali mengangkat berbagai permasalahan yang tidak tercakup dalam laporan resmi, seperti ketidakpastian petani dalam menghadapi perubahan kondisi cuaca atau kekhawatiran tentang hasil panen, Dalam kondisi ekstrem seperti gagal panen, BPP tidak hanya bereaksi, tetapi juga berupaya mencari akar permasalahannya. Seperti pada musim tanam sebelumnya, ketika curah hujan rendah sehingga mengakibatkan kekeringan dan mengakibatkan banyak tanaman yang tidak tumbuh optimal, BPP bekerja sama dengan Pemerintah Kalurahan Pacarejo untuk menyediakan sumur bor sebagai solusi jangka panjang. Dengan kata lain, pemberdayaan disini tidak hanya meningkatkan kapasitas, tetapi juga menjamin keberlangsungan hidup petani dan keluarganya.

Strategi defensif ini tidak berdiri sendiri, melainkan dijalankan melalui tiga pendekatan mendasar dalam pemberdayaan, yaitu pemungkinan, penguatan, dan perlindungan. Ketiga pendekatan ini menjadi kerangka kerja yang saling mendukung: menciptakan akses dan peluang (pemungkinan), memperkuat kapasitas dan keterampilan petani (penguatan), serta menjamin keberlangsungan usaha tani melalui upaya mitigasi risiko (perlindungan). Pembahasan berikut

akan menguraikan bagaimana strategi defensif ini dijabarkan ke dalam ketiga pendekatan tersebut dalam konteks nyata di Kalurahan Pacarejo.

#### 1. Pemungkinan

Pemungkinan tercermin dari upaya menciptakan lingkungan yang memungkinkan kelompok tani memperoleh akses terhadap bantuan dan informasi yang mereka butuhkan. Dalam konteks ini, Pemerintah Kalurahan Pacarejo secara aktif menyediakan forum pertemuan kelompok tani secara rutin, yang didukung dengan anggaran desa, sebagai ruang diskusi dan koordinasi internal antarpetani. Selain itu, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) juga membuka akses langsung kepada petani melalui kehadiran penyuluh pertanian (PPL) dalam forum-forum tersebut. Keterlibatan aktif kedua institusi ini memungkinkan petani untuk menyampaikan kendala lapangan, mendapatkan solusi teknis, serta informasi terkini mengenai pertanian yang sesuai dengan kondisi lokal.

#### 2. Penguatan

Penguatan ditunjukkan melalui kegiatan pelatihan rutin yang diberikan oleh pemerintah kalurahan dan BPP, baik dalam bentuk pertemuan bulanan maupun pelatihan teknis lainnya. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas petani dalam menghadapi tantangan agronomis seperti hama, kekeringan, dan teknik budidaya. Pengalaman Ibu Watini dari KWT menunjukkan bahwa setelah menerima bantuan sumur bor, kelompoknya langsung melakukan uji

coba tanam padi, yang menandakan adanya keberanian dan kesiapan kelompok tani untuk menerapkan ilmu yang diperoleh. Selain pelatihan, penguatan juga diberikan melalui distribusi alat pertanian, benih, dan pupuk secara selektif berdasarkan kebutuhan lapangan.

### 3. Perlindungan

Perlindungan sangat menonjol dalam strategi defensif ini, dengan fokus utama pada upaya mengurangi risiko kerugian akibat faktor eksternal seperti perubahan iklim dan gagal panen. Pemerintah Kalurahan dan BPP secara konkret merespons kekeringan dan gagal panen dengan membangun sumur bor di titik-titik strategis. Bantuan pupuk, benih, dan alat pertanian juga merupakan bentuk perlindungan produktivitas petani agar tetap bisa bercocok tanam dalam kondisi terbatas. Forum diskusi rutin kelompok tani juga berperan sebagai sistem deteksi dini untuk ancaman-ancaman seperti serangan hama atau harga pasar yang tidak stabil. Kolaborasi antara BPP dan pemerintah kalurahan menunjukkan pendekatan preventif dan responsif yang menjaga keberlanjutan usaha tani.

Strategi defensif di Kalurahan Pacarejo tidak hanya bersifat reaktif, tetapi mencerminkan pemberdayaan yang berlapis: membuka akses (pemungkinan), memperkuat kemampuan petani (penguatan), serta melindungi dari ancaman kerugian (perlindungan). Ketiga aspek ini memperlihatkan bahwa pemberdayaan kelompok tani dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, dengan dukungan kuat dari pemerintah kalurahan dan BPP.

### **3. Strategi Kompetitif Pemerintah Kalurahan dalam Pemberdayaan**

#### **Kelompok Tani**

Strategi kompetitif yang dijalankan oleh Pemerintah Kalurahan Pacarejo untuk memperkuat asosiasi petani menunjukkan upaya yang terarah untuk meningkatkan kualitas, kapasitas, dan daya saing petani secara berkelanjutan. Hal ini diungkapkan oleh Pak Wartoyo selaku Ketua Kelompok Tani di Padukuhan Serpeng Lor, seperti yang dikutip di bawah ini:

“Dalam meningkatkan daya saing dari Pemerintah Kalurahan pernah membiayai kami untuk pembuatan pakan ternak yang difermentasi dan pembuatan pupuk padat yang difermentasi. Namun untuk penguatan kapasitas kelompok tani, kami dari Gapoktan pernah diajak untuk melakukan studi banding di beberapa tempat yang pertaniannya maju seperti di Lembah Hijau, biayanya menggunakan kas gapoktan sejauh ini belum ada yang dari Pemerintah Kalurahan. Kalau pengolahan hasil tani, kami pernah diajarkan untuk membuat keripik, kacang oven dan lain-lain. Hanya memang dari kelompok tani sendiri masih kurangnya SDM, mereka tidak mau repot jadi programnya mandek” (Wawancara, Pak Wartoyo 20 Juni 2025).

Pemerintah Kalurahan Pacarejo berupaya meningkatkan daya saing kelompok tani dengan memberikan dana untuk kegiatan inovatif, seperti produksi pakan ternak dan pupuk padat fermentasi. Langkah ini merupakan bagian dari strategi untuk meningkatkan produktivitas dan kemandirian petani dalam pertanian dan peternakan. Namun, dukungan tersebut selama ini hanya terbatas pada aspek teknis dan belum sepenuhnya mencakup penguatan kelembagaan kapasitas organisasi kelompok tani. Misalnya, pelaksanaan studi banding dengan daerah pertanian maju seperti lembah hijau sepenuhnya dibiayai oleh dana Gapoktan, tanpa dukungan dari Kalurahan. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas terus didorong terutama oleh inisiatif internal

kelompok. Selain itu, kelompok tani menerima pelatihan tentang pengolahan hasil pertanian menjadi produk yang dapat dijual dan kacang tanah sangria untuk mendiversifikasi kegiatan usaha mereka. Namun, pelaksanaan pelatihan ini kurang optimal karena keterbatasan sumber daya manusia di tingkat kelompok. Banyak anggota yang tidak berminat maupun tidak mampu melaksanakan kegiatan tindak lanjut, sehingga menganggapnya terlalu membebani. Kurangnya partisipasi aktif menghambat keberlanjutan program. Meskipun Pemerintah Kalurahan telah mengambil Langkah awal yang baik dan dalam mendukung sektor pertanian, keberhasilan program sangat bergantung pada kesiapan internal kelompok, khususnya dalam hal kualitas tenaga kerja, motivasi untuk pengembangan lebih lanjut, dan kemampuan mengelola usaha mereka sendiri. Diperlukan pendekatan pemberdayaan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan yang tidak hanya berfokus pada dukungan selama persiapan tetapi juga mempertimbangkan aspek pengembangan kapasitas dan perubahan pola pikir petani.

Dalam wawancara bersama Pak Tarip selaku Ketua Kelompok Tani di Pacing Kidul, mengatakan bahwa upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kapasitas petani yaitu adanya pelatihan yang dibiayai oleh pemerintah kalurahan, seperti pada kutipan berikut ini :

“Pemerintah Kalurahan dalam membantu kelompok tani yaitu dengan cara memfasilitasi kami pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan satu bulan sekali dalam setahun, itu nanti untuk anggarannya di kasih dari ADD (anggaran dana desa). Dalam pelatihan itu mencakup pelatihan bagaimana mengendalikan hama, pembuatan pupuk organik dan metode tanam terbaru. Untuk meningkatkan daya saing, pemerintah memberikan pelatihan penanaman hortikultura, seperti sayur, bawang dan lain-lain. Namun, ini cuma diberikan di wilayah yang ada sumur bornya, karena melihat dari keadaanya sangat memungkinkan untuk



pembudidayaan holtikultura. Pengolahan hasil panen kami pernah diajar untuk membuat panganan, tapi belum sampe ke tahap pemasaran” (Wawancara Pak Tarip, 20 Juni 2025).

Pemerintah Kalurahan Pacarejo mendukung penguatan kelompok tani melalui pelatihan rutin yang diselenggarakan setiap bulan sekali dalam setahun. Dana pelatihan yang digunakan berasal dari Anggaran Dana Desa (ADD). Pelatihan ini mencakup materi-materi penting yang disesuaikan langsung dengan kebutuhan petani, seperti teknik pengendalian hama, produksi pupuk organik, dan metode pertanian yang lebih moderen dan ramah lingkungan. inisiatif ini menggarisbawahi komitmen pemerintah kalurahan untuk memperkuat kemandirian petani dan mempersiapkan mereka menghadapi tantangan sektor pertanian. Untuk meningkatkan daya saing dan meningkatkan diversifikasi usaha, petani juga diberikan pelatihan di bidang holtikultura, seperti budidaya sayur dan bawang merah. Namun, program ini baru dilaksanakan di daerah yang memiliki sumur, karena kondisi tanah untuk holtikultura memerlukan pasokan air yang stabil. Hal ini menunjukkan bahwa program ini masih terbatas dan belum merata di seluruh wilayah. Di bidang pengolahan hasil pertanian telah di latih untuk mengolah hasil panen menjadi panganan/camilan, tetapi belum sampai pada tahapan pemasaran. Hal ini mencerminkan bahwa, meskipun telah dilakukan pelatihan teknis, proses pemberdayaan belum menyentuh aspek hilir seperti pengembangan produk dan akses pasar. Minimnya dukungan dalam pengelolaan pasca panen dan distribusi produk menjadi hambatan dalam mewujudkan hasil pelatihan menjadi ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif yang tidak hanya berfokus pada pelatihan teknis tetapi juga memperkuat

kemampuan kewirausahaan petani, strategi pemasaran, dan kelembagaan sehingga kegiatan yang dilakukan dapat berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan petani. Penerapan strategi kompetitif oleh pemerintah juga di konfirmasi dalam wawancara bersama Ibu Yatina selaku anggota KWT, seperti terdapat pada kutipan di bawah ini:

“Menurut saya pemerintah sudah cukup mendukung kami para petani melalui pelatihan bulanan, dalam pelatihan ini kami diajarkan bagaimana cara pengendalian hama, pembuatan pupuk organik dan bagaimana metode penanaman terbaru. Kami juga diberi pelatihan budidaya hortikultura. Namun pelatihan ini tidak dilakukan di setiap padukuhan, hanya padukuhan yang ada sumur bornya saja. Setelah ada sumur bor kami dari KWT juga, masih bisa menanam di musim kemarau, hasilnya lumayan untuk uang tambahan” (Wawancara Ibu Yatina, 17 Juli 2025)

Melalui wawancara bersama ibu Yatina, dapat diketahui bahwa Pemerintah Kalurahan memberikan dukungan yang memadai kepada petani melalui berbagai program pelatihan bulanan. Program pelatihan ini sangat bermanfaat dan membekali petani dengan pengetahuan praktis, misalnya tentang metode pengendalian hama, serta metode budidaya terbaru yang lebih efisien. Pemerintah juga menawarkan pelatihan budidaya hortikultura bagi para petani. Namun, program hortikultura ini belum menjangkau semua dusun, karena hanya dilaksanakan di wilayah yang memiliki sumur bor. Ketersediaan sumur bor merupakan faktor krusial dalam pelaksanaan program pelatihan ini, karena wilayah dengan sumber air yang memadai dianggap lebih cocok untuk menanam hortikultura dengan kebutuhan air yang tinggi. Dengan sumur bor, para petani yang termasuk yang tergabung dalam Kelompok Wanita Tani (KWT), dapat terus bercocok tanam selama musim kemarau tanpa khawatir kekurangan air. Panen selama musim kemarau memberikan kontribusi yang signifikan terhadap

pendapatan rumah tangga, meskipun skala produksinya belum terlalu besar. Dukungan ini menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan upaya bertahap untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing petani. Namun, akses yang adil terhadap pelatihan dan fasilitas masih diperlukan untuk memastikan bahwa semua petani di berbagai dusun dapat menikmati manfaat yang sama.

Dalam upaya meningkatkan daya saing petani, pemerintah fokus dalam mengajarkan petani bagaimana cara meningkatkan kualitas produk dan penguatan posisi mereka di pasar lokal. Saat ini, pemasaran produk masih terbatas di wilayah Kalurahan, seperti pasar tradisional dan pembeli lokal langsung. Petani terus didorong untuk menghasilkan produk yang lebih baik dengan kemasan yang lebih bersih dan menarik. Pemerintah Kalurahan juga menyediakan pelatihan dan pendampingan untuk membantu petani kompetitif di luar tingkat lokal. Pelatihan pemanfaatan media sosial dan pemasaran daring dilakukan untuk menawarkan peluang signifikan memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan pendapatan petani di masa mendatang.

Dalam upaya pemberdayaan petani, Pemerintah Kalurahan Pacarejo telah menerapkan berbagai strategi yang dapat dipetakan ke dalam kerangka 3P: Pemungkinan, Penguatan, dan Perlindungan. Strategi Pemungkinan diwujudkan melalui penyediaan peluang, fasilitas, dan akses, seperti pembiayaan pembuatan pakan ternak fermentasi, penyediaan sumur bor untuk mendukung hortikultura di musim kemarau, pelatihan teknis rutin, serta fasilitasi inovasi pengolahan hasil pertanian dan pemasaran digital.

## 1. Pemungkinan

Pemerintah Kalurahan Pacarejo menciptakan peluang dan akses bagi petani melalui berbagai langkah, seperti memberikan pembiayaan awal untuk pembuatan pakan ternak fermentasi dan pupuk padat fermentasi, menyediakan sumur bor di wilayah tertentu agar petani tetap bisa menanam hortikultura pada musim kemarau, serta mengadakan pelatihan teknis bulanan yang mencakup pengendalian hama, pembuatan pupuk organik, metode tanam baru, dan budidaya hortikultura. Selain itu, petani difasilitasi untuk mengakses inovasi pengolahan hasil tani menjadi produk olahan seperti keripik dan kacang oven, serta diberikan pelatihan pemasaran digital melalui media sosial untuk memperluas jangkauan pasar.

## 2. Penguatan

Peningkatan kapasitas petani dilakukan melalui kegiatan seperti studi banding ke daerah pertanian maju untuk menambah wawasan, pelatihan hortikultura yang bertujuan mendiversifikasi usaha dan meningkatkan pendapatan, serta pendampingan pasca pelatihan meskipun masih terbatas pada pengolahan hasil panen. Pemerintah juga mendorong peningkatan kualitas produk, termasuk kemasan yang bersih dan menarik, serta memperkuat kelembagaan kelompok tani dan Kelompok Wanita Tani (KWT) agar petani mampu mengelola usaha secara mandiri dan berkelanjutan.

### 3. Perlindungan

Upaya perlindungan dilakukan dengan memberikan pelatihan pengendalian hama untuk mencegah kerusakan hasil panen, menyediakan sumur bor di wilayah rawan kekeringan guna menjaga produksi saat musim kemarau, dan mengajarkan metode tanam yang sesuai kondisi lokal agar petani terhindar dari kerugian akibat teknik yang tidak tepat. Pemerintah juga menjaga stabilitas pemasaran dengan memperkuat pasar lokal sebagai jalur distribusi utama, serta mendorong diversifikasi produk olahan agar pendapatan petani tidak hanya bergantung pada hasil panen segar, sehingga usaha pertanian dapat tetap berjalan meski menghadapi tantangan lingkungan atau pasar.

Pemerintah Kalurahan Pacarejo menerapkan strategi pemberdayaan petani melalui Pemungkinan, Penguatan, dan Perlindungan. Pemungkinan dilakukan dengan penyediaan fasilitas, pelatihan, dan akses inovasi; Penguatan melalui peningkatan kapasitas, diversifikasi usaha, dan penguatan kelembagaan; Perlindungan dengan mitigasi risiko, penguatan pasar lokal, dan diversifikasi produk. Upaya ini telah meningkatkan daya saing petani, namun pemerataan akses dan pendampingan berkelanjutan masih diperlukan.

#### **4. Strategi Inovatif Pemerintah Kalurahan dalam Pemberdayaan**

##### **Kelompok Tani**

Strategi inovatif yang dilakukan pemerintah Kalurahan Pacarejo meliputi penerapan metode pertanian modern, pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan daya saing petani, pengolahan hasil panen menjadi produk olahan, serta pengenalan teknologi dan cara tanam baru. Seperti telah di ungkapkan oleh Pak Suhadi selaku lurah di Kalurahan Pacarejo, yang terdapat dalam kutipan di bawah ini:

“Metode media tanam yang baru-baru ini kami sampaikan kepada kelompok tani adalah budidaya buah melon dengan sistem hidroponik, berbasis greenhouse. Dalam program ini kami memfasilitasi penuh mulai dari penyediaan lahan hingga mengundang narasumber yang ahli di bidang tersebut. Terkait masalah teknis seperti gagal panen maupun pengolahan lahan pertanian yang baik, kami melakukan koordinasi dengan PPL yang bertugas di Kalurahan Pacerejo. Pemerintah Kalurahan hanya bertindak sebagai fasilitator dalam kegiatan pelatihan, sedangkan pelatihan dan pendampingan teknis dilakukan oleh PPL. Untuk aspek pemasaran, hasil pertanian saat ini belum dipasarkan hingga keluar daerah. Namun, komoditas seperti padi dan jagung sebagian sudah dibeli oleh pemerintah maupun pihak BULOG” (Wawancara, Pak Suhadi, 20 Juni 2025).

Pemerintah Kalurahan Pacarejo telah memajukan modernisasi pertanian dengan memperkenalkan sistem budidaya yang lebih modern dan layak secara ekonomi. Salah satu inisiatif ini adalah pengenalan Teknik hidroponik di rumah kaca untuk budidaya tanaman melon. Peran pemerintah difokuskan pada penyediaan sarana dasar seperti lahan dan fasilitas pelatihan teknis, sedangkan pelaksanaan teknis didelegasikan kepada pihak yang lebih kompeten, yaitu Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Koordinasi antara pemerintah kalurahan dan PPL sangat penting agar pelatihan dan pendampingan dapat terlaksana

secara optimal dan efektif. Model kolaboratif ini menunjukkan pendekatan pembangunan pertanian yang melibatkan banyak pemangku kepentingan untuk hasil yang lebih efektif. Meskipun budidaya telah membaik, distribusi dan pemasaran produk pertanian masih menjadi kendala. Sebelumnya, beras dan jagung hanya dibeli oleh instansi pemerintah dan BULOG, artinya tidak ada perluasan pasar di luar daerah. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan sektor produksi tidak disertai dengan pemasaran yang optimal. Agar hasil inovasi benar-benar berkontribusi pada peningkatan pendapatan petani, diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengembangkan akses pasar dan jaringan distribusi yang lebih luas. Mengenai pemasaran hasil pertanian, pelatihan, dan pemasaran juga disampaikan oleh Pak Wartoyo selaku ketua kelompok tani Serpeng Lor.

“Baru tahun akhir-akhir ini pemerintah bekerja sama dengan pihak BULOG untuk membeli hasil panen. Dari pihak membeli jagung dengan harga Rp. 5.500/Kg, ini untuk mengatasi harga pasar. Tetapi ini tidak mencakup semua 28 kelompok, dalam membeli Bulog juga memberikan persyaratan bahwa kadar air dari jagung minimal cumin 80%. Namun, program ini sudah cukup membantu kami, karena sebelumnya kami menjual ke tangkulak itu cuman sekitar harga Rp. 4.000/Kg. Kalau pelatihan itu dilakukan setiap bulan sekali, nanti ada pendampingan dari PPL” (Wawancara Pak Wartoyo, 20 Juni 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa pemerintah menjalin kerja sama dengan pihak Bulog untuk memastikan stabilitas harga produk pertanian, khususnya jagung. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan petani terhadap tengkulak, yang meskipun menjadi jalur penjualan utama, sering kali merugikan petani dalam hal harga jual. Meskipun belum semua kelompok tani di Kalurahan tersebut terjangkau, program ini telah memberikan manfaat nyata bagi sebagian petani dan merupakan titik awal yang

manjajikan. BULOG menetapkan kriteria tertentu untuk kualitas panen, seperti kadar air. Hal ini secara tidak langsung mendorong petani untuk meningkatkan pengelolaan pasca panen. Selain itu, pemerintah menyelenggarakan pelatihan rutin setiap bulan untuk terus mendukung petani dalam meningkatkan kapasitasnya. Langkah ini akan memberikan dukungan teknis melalui PPL, yang memberikan bimbingan langsung di tempat. Sinergi antara perolehan pengetahuan, kualitas produksi, dan akses pasar mencerminkan langkah-langkah terencana pemerintah kalurahan untuk membangun sistem pertanian yang tangguh, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan petani. Meskipun masih terdapat dalam pelaksanaan dan cakupan program, kebijakan ini merupakan respons terhadap masalah nyata yang dihadapi oleh petani di tingkat Kalurahan. Adapun pendapat tentang penerapan strategi inovatif dari Ibu Yatini selaku anggota KWT, seperti pada kutipan di bawah ini:

“Pemerintah kalurahan ada membantu kami melalui program bantuan. Kemarin ini kami dikenalkan bagaimana cara menanam melon dengan sistem hidroponik. Kami difasilitasi penuh sama pemerintah, waktu lahan sudah disiapkan terus dipanggil narasumber yang ahli di bagian itu jadi kami juga lebih paham bagaimana cara mengolah lahan dan jika terjadi gagal panen, ada PPL yang bertugas di Kalurahan Pacarejo. PPL yang mengajari kami gimana cara penanggulangannya. Kalau untuk pemasaran, hasil pertanian kami belum dipasarkan hingga sampai keluar daerah, tapi sebagian beras dan jagung sudah dibeli dari pihak pemerintah dan BULOG, jadi minimal ada yang bisa menerima hasil panen kami dengan harga yang cukup” (Wawancara Ibu Yatini, 17 Juli 2025)

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa pemerintah Kalurahan Pacarejo memberikan dukungan konkret kepada petani melalui program pertanian inovatif, seperti pengenalan budidaya melon hidroponik. Dukungan ini komprehensif dan berkisar dari penyediaan lahan hingga keberadaan tenaga



professional terampil yang mengajarkan petani metode budidaya baru. Lebih lanjut, keberadaan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sangat penting dalam menyelesaikan masalah teknis di lapangan, seperti persiapan lahan dan gagal panen. PPL secara aktif memberi saran kepada petani dan menawarkan solusi langsung kepada mereka. Mengenai pemasaran, hasil panen tidak dijual secara luas ke luar daerah, tetapi beberapa hasil panen seperti padi dan jagung dibeli oleh pemerintah dan pihak BULOG, yang setidaknya memberikan keamanan pasar bagi petani. Hal ini menunjukkan bahwa kerja sama antara pemerintahan kabupaten dan PLL cukup berhasil dalam meningkatkan ketrampilan petani. Namun, penguatan sektor pemasaran tetap diperlukan untuk memastikan bahwa produk menjangkau pasar yang luas.

Dalam kerangka strategi daya saing, pendekatannya dibagi menjadi tiga aspek utama: pemberdayaan, pemberdayaan, dan perlindungan. Pemberdayaan berfokus pada penyediaan akses dan penciptaan peluang bagi petani; pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian mereka; dan perlindungan bertujuan untuk memastikan keberlanjutan pertanian terhadap berbagai tantangan eksternal. Ketiga aspek ini membentuk dasar penting untuk memahami bagaimana pemerintah kota Pacarejo secara berkelanjutan meningkatkan ketahanan dan daya saing petani.

#### 1. Pemungkinan

Pemungkinan dalam strategi kompetitif dilakukan dengan menciptakan akses terhadap pelatihan dan teknologi yang memungkinkan petani mengembangkan kualitas dan nilai tambah hasil

tani. Pemerintah Kalurahan memfasilitasi pembuatan pupuk organik dan pakan ternak fermentasi, serta membuka ruang pelatihan hortikultura di wilayah yang memiliki infrastruktur pendukung seperti sumur bor. Peluang juga dibuka melalui pelatihan pengolahan hasil panen dan pengemasan produk, meskipun pelaksanaannya masih terbatas. Selain itu, akses pelatihan pemasaran digital dan media sosial menunjukkan langkah awal untuk memperluas jangkauan pasar bagi petani. Semua ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana agar petani dapat mengakses peluang peningkatan kualitas dan daya saing.

## 2. Penguatan

Penguatan dilakukan melalui peningkatan kapasitas teknis dan kewirausahaan petani. Pemerintah menyelenggarakan pelatihan rutin, seperti teknik budidaya modern, pengendalian hama, serta pelatihan pengolahan hasil pertanian. Upaya ini mendorong petani agar tidak hanya bergantung pada penjualan hasil mentah, tetapi juga mampu menciptakan produk olahan yang bernilai ekonomi lebih tinggi. Inisiatif studi banding oleh Gapoktan juga menunjukkan adanya kesadaran internal untuk memperkuat pengetahuan kelembagaan, meskipun belum didukung langsung oleh anggaran kalurahan. Meskipun masih terbatas oleh minimnya partisipasi dan sumber daya manusia, program-program tersebut menunjukkan bahwa penguatan kapasitas petani menjadi titik tekan dalam strategi kompetitif.

### 3. Perlindungan

Perlindungan dalam strategi kompetitif tampak dalam bentuk dukungan terhadap keberlanjutan usaha tani menghadapi tantangan iklim dan pasar. Penyediaan sumur bor tidak hanya mendukung produksi di musim kemarau, tetapi juga menjadi syarat pelaksanaan program hortikultura, yang menunjukkan upaya adaptasi terhadap kebutuhan air tanaman bernilai jual tinggi. Meskipun pemasaran masih terbatas, pelatihan kemasan dan promosi daring menunjukkan langkah protektif agar petani dapat bertahan dalam persaingan pasar lokal dan regional. Selain itu, pelibatan KWT dalam pelatihan dan usaha tani saat musim kemarau juga memperluas basis perlindungan ekonomi rumah tangga petani.

Strategi kompetitif Pemerintah Kalurahan Pacarejo menekankan penciptaan peluang melalui pelatihan dan akses teknologi (pemungkinan), peningkatan keterampilan teknis dan kewirausahaan (penguatan), serta perlindungan keberlanjutan usaha melalui infrastruktur dan adaptasi pasar (perlindungan). Ketiganya membentuk pendekatan pemberdayaan yang bertahap dan bertujuan meningkatkan daya saing petani secara berkelanjutan.

## 5. Strategi Preventif Pemerintah Kalurahan dalam Pemberdayaan

### Kelompok Tani

Strategi preventif memainkan peran penting dalam pertanian berkelanjutan, karena menekankan tindakan proaktif, peningkatan kapasitas, dan

perencanaan jangka panjang. pendekatan ini memungkinkan kelompok petani untuk bertahan, berkembang, dan beradaptasi dengan tantangan yang semakin dinamis dan kompleks. Dalam wawancara bersama Pak Suhadi selaku Lurah di Kalurahan Pacarejo, mengungkapkan bagaimana upaya pemerintah untuk menjalankan strategi preventif, seperti pada kutipan wawancara di bawah ini:

“Jikalau tidak hujan atau musim kemarau panjang, kami berupaya dari dana desa untuk mengadakan pembuatan sumur bor. Harapan kami agar di musim kemarau petani masih bisa beraktifitas, mereka bisa menanam sayuran, pakan ternak, dan padi di MH2 (musim tanam 2). Tetapi, dalam pengadaan sumur bor ini kami belum bisa mencakup semua 28 padukuhan ini. Kami prioritaskan kelompok-kelompok yang ada sumber airnya saja. Jadi yang berhubungan dengan ketahanan pangan terus kami upayakan, baik dengan dana desa maupun dari bantuan-bantuan atau program dari luar dana desa. Untuk pelatihan dan pendampingan kami koodinasikan dengan PPL, kami hanya memfasilitasi” (Wawancara Pak Suhadi, 20 Juni 2025)

Strategi preventif yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan Pacarejo sangat relevan dalam menghadapi tantangan musim kemarau panjang. salah satu langkah yang konkrit yang dilakukan adalah pengadaaan sumur bor dengan menggunakan dana desa. Langkah ini bukan hanya solusi teknis, teapi merupakan bentuk nyata dari strategi preventif dalam menjaga keberlanjutan, khususnya dalam menghadapi kekeringan yang dapat menghambat kegiatan bercocok tanam. Melalui pembangunan sumur bor, petani tetap memiliki akses terhadap sumber air meskipun curah hujan rendah, sehingga mereka tetap dapat beraktifivitas pada musim tanam kedua (MH2), seperti menanam padi, sayur-sayuran, atau pakan ternak. Upaya ini menunjukkan bahwa pemerintah kalurahan memahami pentingnya mitigasi risiko sejak dini sebagai bagian dari tata kelola pembangunan kalurahan yang tanggap terhadap perubahan iklim dan

krisis pangan. Namun, kurangnya ketersediaan sumber air menyebabkan tidak semua dari 28 Padukuhan dengan pembangunan sumur bor secara merata. Oleh karena itu, strategi prioritas diterapkan dengan mengutamakan kelompok tani yang berada di wilayah yang memiliki potensi sumber air. Kebijakan ini mencerminkan perlunya strategi preventif yang hanya bersifat teknis, tetapi juga berbasis data dan kebutuhan riil di lapangan, sehingga sumber daya dapat dimanfaatkan secara efektif dan tepat sasaran. Dalam konteks ini, strategi preventif bukan hanya sekedar tindakan untuk mencegah kerusakan, tetapi juga pendekatan sistematis untuk meningkatkan ketahanan sistem pertanian kalurahan. Selanjutnya, strategi ini diperkuat dengan pendekatan pemberdayaan melalui pelatihan dan pendampingan bagi petani. pemerintah kalurahan tidak secara langsung menjadi pelaksana teknis, tetapi berperan sebagai fasilitator yang menjembatani kebutuhan petani dengan tenaga penyuluhan pertanian (PPL). koordinasi dengan PPL bertujuan agar petani tidak hanya mendapatkan bantuan fisik berupa sarana-prasarana, tetapi juga memperoleh pengetahuan dan ketrampilan dalam mengelola usaha tania secara adaptif dan efisien. Hal ini menunjukkan bahwa strategi preventif dalam konteks pertanian tidak dapat dilepaskan dari aspek pemberdayaan sumber daya manusia. Kesiapan petani dalam menghadapi tantangan cuaca, serangan hama, dan fluktuasi pasar sangat bergantung pada kualitas pendampingan dan edukasi yang diterima. Penerapan strategi preventif juga di ungkapkan oleh Pak Sudiyatna selaku PPL di Kalurahan Pacarejo, seperti kutipan di bawah ini:

“Untuk penguatan kapasitas petani, dari BPP selalu hadir untuk mengikuti pertemuan yang diadakan secara rutin oleh gapotan, disitu

setiap informasi yang berhubungan dengan pertanian kami sampaikan. Upaya pengendalian hama, pelatihan media tanam terbaru, kami adakan agar petani bisa lebih bersaing atau bertahan di saat mengalami masalah dalam pertanian. Untuk lahan kering dan sumber daya airnya dekat disitu dikasih sumur bor, agar petani bisa beraktifitas” (Wawancara Pak Sudiyatna, 23 Juni 2025).

Untuk memperkuat kapasitas petani, BPP Kapanewon Semanu turut berpartisipasi aktif dalam pertemuan rutin yang diselenggarakan oleh kelompok tani sebagai wadah penyampaian informasi pertanian yang relevan. Dalam kegiatan tersebut, petani diberikan pelatihan terkait pengendalian hama dan penggunaan media tanam terkini sebagai langkah preventif agar mampu menghadapi berbagai tantangan di sektor pertanian. Selain itu, di wilayah lahan kering yang memiliki potensi sumber air, juga dibangun sumur bor untuk mendukung keberlangsungan kegiatan pertanian di musim kemarau. Langkah tersebut merupakan bentuk kerjasama antar penyuluh dan pemerintah kalurahan dalam mewujudkan ketahanan pangan melalui pendekatan pemberdayaan dan pencegahan risiko. Kerjasama antara BPP dan pemerintah kalurahan juga disampaikan oleh Ibu Denik selaku anggota KWT, seperti pada kutipan berikut ini:

“Anggota BPP Semanu secara rutin hadir di pertemuan kelompok, saat pertemuan kami banyak berdiskusi mengenai masalah dalam pertanian. Kami diajarkan bagaimana metode tanam terbaru dan cara mengatasi hama. Pelatihan ini sangat membantu kami, dari pelatihan yang diadakan kami dapat belajar bagaimana mengatasi masalah yang terjadi di lapangan. Adanya sumur bor juga sangat membantu kami untuk tetap mengolah lahan pertanian meskipun di musim kemarau. Paling tanaman yang di tanam ada sayur, bawang, kedelai, dan beberapa tanaman lain. Ini hasil dari kerja sama antara pemerintah kalurahan dan penyuluh pertanian jadi kami merasa cukup di bantu” (Wawancara Ibu Denik, 17 Juli 2025)

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa partisipasi rutin anggota BPP Semanu dalam pertemuan kelompok tani sangat membantu petani untuk mengatasi tantangan di lapangan. Pertemuan ini menyediakan platform bagi petani untuk bertukar informasi langsung dan berbagi teknik budidaya serta metode pengendalian hama terbaru. Pelatihan yang diberikan terbukti telah meningkatkan pemahaman dan keterampilan petani untuk pengelolaan lahan yang lebih baik. Semua upaya ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah kalurahan dan penyuluh pertanian. Petani mendapatkan manfaat langsung dengan memastikan keberlanjutan kegiatan pertanian di wilayah mereka.

Pemerintah Kalurahan Pacarejo dan BPP Kapanewon Semanu secara aktif berkomitmen untuk memperkuat kelompok tani melalui berbagai program yang disesuaikan dengan kebutuhan setempat. Uaggpaya tersebut meliputi pelatihan, penyediaan saran pertanian, pengembangan demplot, dan pembangunan sumur bor untuk menanggulangi dampak musim kemarau. Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi tetapi juga pada ketahanan petani terhadap risiko teknis dan lingkungan. Kehadiran penyuluh pertanian (PPL) dalam setiap proses merupakan faktor penting dalam menghubungkan teori dan praktik serta memastikan intervensi didasarkan pada data lapangan. Pemerintah kalurahan juga berperan sebagai mediasi dengan menghubungkan kebutuhan kelompok tani melalui program pemberdayaan. Namun, analisis juga menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya partisipasi anggota, serta pengelolaan pasca panen dan

pemasaran hasil pertanian yang belum optimal. Strategi pemberdayaan yang diterapkan bersifat menyeluruh dan adaptif secara keseluruhan, yang mencerminkan sinergi antara pengembangan kapasitas, perlindungan risiko, dan pengembangan inovasi. Meskipun keberhasilan yang dicapai hingga saat ini positif, keberlanjutan dan dampak jangka panjang program ini sangat bergantung pada komitmen internal kelompok tani, dan pendampingan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan strategis yang lebih komprehensif, integritas lintas sektoral, dan penguatan jaringan antar lembaga untuk memastikan bahwa pemberdayaan petani di Kalurahan Pacarejo benar-benar dapat menciptakan kemandirian dan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Pendekatan preventif Pemerintah Kalurahan Pacarejo terhadap sektor pertanian mencerminkan penerapan strategi 3P: Enable (Memberdayakan), Empower (Memberdayakan), dan Protect (Melindungi). Dengan pendekatan ini, pemerintah tidak hanya mengatasi permasalahan seperti kekeringan dan serangan hama, tetapi juga memfasilitasi akses ke berbagai sumber daya, mengembangkan kapasitas petani, dan memastikan keberlanjutan kegiatan pertanian. Strategi ini membentuk fondasi penting untuk membangun kemandirian dan ketahanan pertanian jangka panjang.

#### 1. Pemungkinan

Hal ini dicapai dengan memberikan akses dan peluang bagi petani untuk meningkatkan kapasitas produksi dan beradaptasi dengan tantangan iklim. Pemerintah Desa Pacarejo mendukung pembangunan sumur bor di daerah-daerah dengan sumber air potensial, dengan



menggunakan dana desa, agar petani dapat terus bertani selama musim kemarau. Selain itu, pemerintah berperan sebagai penghubung antara petani dan penyuluh pertanian, memastikan pemerataan pelatihan dan pendampingan. Upaya ini memberikan peluang nyata bagi petani untuk melanjutkan kegiatan bertani mereka sekaligus mengakses sumber daya yang sebelumnya sulit diakses.

## 2. Penguatan

Upaya ini dilaksanakan melalui penguatan kapasitas teknis dan kelembagaan petani, baik secara individu maupun kelompok. Pemerintah, bersama Badan Penyuluhan Pertanian (BPP) dan Badan Penyuluhan Pertanian (PPL), menyelenggarakan pelatihan teknik budidaya modern, pengendalian hama, dan penggunaan media tanam yang sesuai dengan kondisi lahan. Pertemuan rutin kelompok tani berfungsi sebagai forum diskusi, mendorong partisipasi petani, berbagi informasi, dan memperkuat kerja sama antar anggota. Pendampingan ini tidak hanya meningkatkan kapasitas petani tetapi juga mendorong kemandirian mereka dalam pengelolaan lahan dan mengurangi ketergantungan mereka pada dukungan eksternal.

## 3. Perlindungan

Fokusnya adalah memastikan keberlanjutan pertanian dari berbagai risiko ekologis dan teknis. Pengeboran sumur sebagai respons terhadap ancaman kekeringan merupakan bentuk nyata perlindungan iklim. Lebih lanjut, pelatihan pengendalian hama dan penerapan teknik

budidaya yang diadaptasi secara lokal merupakan komponen penting dari strategi perlindungan untuk mencegah gagal panen. Sinergi antara pemerintah desa, penyuluh pertanian, dan asosiasi petani sangat penting untuk memastikan bahwa setiap intervensi benar-benar memenuhi kebutuhan lokal dan memperkuat ketahanan petani terhadap tantangan iklim, serangan hama, dan ketidakstabilan pasar.

Strategi preventif yang diterapkan Pemerintah Kalurahan Pacarejo melalui pendekatan 3P—Pemungkinan, Penguatan, dan Perlindungan—telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan ketahanan dan kemandirian petani. Upaya ini mencakup penyediaan akses sumber daya, peningkatan kapasitas melalui pelatihan, serta mitigasi risiko pertanian, yang keseluruhannya dilakukan secara kolaboratif dan berbasis kebutuhan lapangan.

## **B. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Kelompok Tani di Kalurahan Pacarejo**

### **1. Faktor Pendukung Pemberdayaan Kelompok Tani**

Pemberdayaan kelompok tani di Kalurahan Pacarejo didukung oleh beberapa faktor penting yang saling memperkuat. Komitmen kuat pemerintah kalurahan yang diwujudkan dalam pemberian dana desa (ADD) untuk pelatihan, pembangunan sumur bor, dan penyediaan demplot menjadi landasan terpenting bagi penguatan sektor pertanian. Dukungan teknis dari Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kapanewon Semanu melalui kehadiran petugas penyuluh pertanian (PPL) turut memperkuat alih pengetahuan dan ketrampilan petani. Pelatihan rutin, dukungan sarana

produksi seperti benih dan alat pertanian, serta pertemuan rutin kelompok tani juga menjadi ruang dialog dan solusi bersama. Dukungan pemerintah daerah dan prasarana pertanian, seperti benih unggul, pupuk, traktor, dan peralatan pertanian lainnya, juga turut mendukung efektivitas produksi pertanian. Dukungan ini, meskipun diberikan secara bergilir, merupakan bagian dari upaya untuk menyediakan akses bagi petani kecil terhadap input yang mereka butuhkan. Pembangunan sumur bor di wilayah yang berpotensi yang menjadi sumber air merupakan bentuk strategi adaptasi terhadap risiko perubahan iklim dan musim kemarau. Hal ini memungkinkan petani untuk tetap berproduksi pada musim tanam kedua (MH2), meskipun menghadapi tantangan tambahan seperti serangan burung, yang sering kali merusak tanaman sesaat sebelum panen padi. Meskipun hal ini menjadi masalah bagi petani, namun secara bertahap hal ini diatasi dengan pelatihan pengendalian hama. Studi banding yang dilakukan Gapoktan menunjukkan adanya semangat kemandirian dan kemauan belajar di dalam kelompok. Inisiatif untuk mengkaji praktek terbaik di daerah lain membuktikan bahwa pemberdayaan tidak hanya datang dari luar tetapi juga tumbuh dari kesadaran kelompok tani akan pentingnya peningkatan kapasitas. Meskipun hal ini belum sepenuhnya didorong oleh pemerintah kalurahan, hal ini menunjukkan potensi besar untuk pengembangan kelembagaan petani yang mandiri dan lebih berorientasi jangka panjang. Oleh karena itu, keberhasilan pemberdayaan Kalurahan Pacarejo sangat bergantung pada kerjasama

berbagai pelaku. Ketersediaan sumber daya, pendekatan lokal berbasis kebutuhan, dan kemauan petani untuk berubah dan berinovasi.

## **2. Faktor Penghambat Pemberdayaan Kelompok Tani di Kalurahan**

### **Pacarejo**

Faktor penghambat pemberdayaan kelompok tani di Kalurahan Pacarejo yang paling mencolok adalah minimnya infrastruktur dikarenakan sumber daya alam (SDA) tidak mendukung. Program pengeboran sumur yang selama ini dianggap sebagai solusi jangka panjang mengatasi kekeringan hanya dapat dilaksanakan di padukuhan-padukan tertentu yang memiliki sumber air, sehingga kelompok tani yang berada di daerah tanpa potensi air permukaan hanya bergantung pada musim hujan. Hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan produktivitas antar daerah yang pada akhirnya juga berdampak pada daya saing kelompok tani secara keseluruhan. Dari sisi sumber daya manusia, rendahnya partisipasi petani dalam berbagai program pelatihan menjadi tantangan tersendiri. Meskipun pemerintah menyelenggarakan pelatihan teknik budidaya, pengendalian hama, dan pengolahan hasil pertanian, sebagian besar anggota kelompok masih bersifat pasif. Kurangnya motivasi dan terbatasnya pengetahuan dasar menyebabkan petani enggan mencoba inovasi karena dianggap bermasalah atau tidak memberikan manfaat langsung. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan pemberdayaan yang diterapkan belum menyentuh aspek internal seperti mengubah pola pikir dan meningkatkan motivasi petani yang seharusnya menjadi dasar keberhasilan program pemberdayaan itu sendiri. Dari segi

teknis khususnya hama burung yang menyerang tanaman padi pada musim tanam kedua (MH2), merupakan salah satu masalah utama yang belum tertangani secara optimal. Saat petani berupaya memaksimalkan produktivitasnya di musim kemarau, hama burung menjadi ancaman serius yang dapat mengakibatkan gagal panen. Minimnya teknologi pengendalian hama dan belum adanya sistem pengendalian kolektif di tingkat kelompok menyebabkan petani harus mengelola masalah ini secara individual, yang secara ekonomis dan manusiawi tidak efisien serta meberatkan. Dari segi ekonomi dan pasar, sebagian besar hasil panen petani masih dijual ke tengkulak dengan harga murah. Meskipun ada inisiatif pemerintah untuk bekerjasama dengan BULOG dalam pembelian jagung, jangkauan program ini masih terbatas dan belum menjangkau semua kelompok tani. hal ini menunjukkan rantai pasok dan sistem pemasaran belum terkelola secara optimal. Minimnya pelatihan dalam strategi pengemasan, branding, dan pemasaran juga membatasi kesempatan petani untuk memberikan nilai tambah pada hasil produksinya. Dengan kata lain, aspek hilir kegiatan pertanian belum menjadi fokus strategi pemberdayaan. Secara keseluruhan kendala-kendala ini menunjukkan bahwa kelompok-kelompok pendukung petani di Kalurahan Pacarejo terus menghadapi tantangan yang kompleks dan beraneka ragam. Meskipun telah ada kemajuan dalam pendanaan dan dukungan pemerintah, keberhasilan program-program dukungan terus bergantung pada penguatan kelompok-kelompok internal, penyelarasan infrastruktur, peningkatan kualitas tenaga kerja pertanian, dan risiko serta

strategi pasar yang lebih terstruktur. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan partisipatif, yang memposisikan petani tidak hanya sebagai penerima manfaat tetapi juga sebagai pelaku utama dalam pengembangan dan implementasi strategi pertanian yang adaptif, mandiri dan berkelanjutan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kalurahan Pacarejo, diketahui bahwa pemerintah kalurahan telah menerapkan berbagai strategi dalam pemberdayaan kelompok tani.

##### **1. Strategi agresif**

Pemerintah secara aktif mendorong peningkatan produktivitas petani melalui intervensi langsung, seperti penyediaan sarana produksi, fasilitas pertanian, lahan demplot, dan sumur bor.

##### **2. Strategi defensif**

Pemerintah menjaga stabilitas kelembagaan kelompok tani dengan membina komunikasi internal, mempertahankan keberlangsungan program, dan mengelola dinamika organisasi secara berkesinambungan.

##### **3. Strategi kompetitif**

Pemerintah mendorong petani bersaing di pasar dengan meningkatkan kualitas produk, memperbaiki kemasan, dan memperluas jangkauan pemasaran.

##### **4. Strategi inovatif**

Pemerintah mengembangkan kreativitas dan keterampilan petani dengan memberikan pelatihan teknik pengolahan hasil pertanian agar produk memiliki nilai tambah dan tidak hanya dijual mentah.

#### 5. Strategi preventif

Pemerintah menjaga partisipasi dan motivasi petani melalui pertemuan rutin, kegiatan penyuluhan, dan pelatihan untuk mencegah stagnasi serta penurunan semangat kolektif.

### **B. Saran**

1. Pengolahan dan pemasaran hasil pertanian perlu ditingkatkan melalui pelatihan kewirausahaan dan akses pasar yang lebih luas agar produk petani memiliki nilai tambah dan tidak hanya berhenti di budidaya.
2. Partisipasi aktif petani dalam seluruh pelatihan dan program pemberdayaan lainnya juga perlu terus didorong agar manfaat program yang telah dilaksanakan dapat dirasakan secara lebih luas dan berkelanjutan.
3. Penguatan kelembagaan petani dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan diperlukan untuk mendorong kemandirian petani dalam jangka panjang.
4. Evaluasi berkala terhadap setiap program pemberdayaan juga diperlukan untuk mengukur keberhasilan dan mengembangkan strategi ke depan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan tantangan lokal.



## DAFTAR PUSTAKA

- Antonius. (2024). Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Sungai Segak Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang. *FOKUS: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 12.
- al, A. e. (2023). *Pemberdayaan masyarakat*. Padang Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi
- Bili, A. L. (2022). Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani. *Unitri.ac.id*, 9.
- Batubara, M. M. (2023). Pengaruh Pertanian terhadap Pendapatan Nasional. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 8.
- Grathiano, L. (2023). Strategi Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Desa Kerten, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. *Skripsi*, 94.
- G Sihite, J. J. (2023). Tanggung Jawab Pemerintah Desa Dalam Bidnag Pendidikan Di Desa Lutur Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru. *Bacarita Law Jurnal*, 10.
- Hidayat, G. N. (2025). Strategi Pemberdayaan Masyarakat untuk Mengatasi Kemiskinan di Kabupaten Merauke. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 16.
- Hamdi, M. M. (2021). Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan pada Pondok Pesantren. *Asosiasi Dosen Tarbiyah STAI Darussalam* , 17.
- Hariri, A. (2014). Eksistensi Pemerintahan Desa Ditinjau Dari Perspektif Asas Subsidiaritas Dalam Undang-Undang Nomor Tahun 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 14.
- Larasathi, B. N. (2020). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kampung Organik di Kampung Pinggirejo Kota Magelang. *Repositori Masasiswa Untidar*, 16.
- Lestari, Y. (2021). Konsep Pemberdayaan Masyarakat Menurut AL-QUR'AN . *skripsi*, 90.
- Lio, Y. P. (2022). Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 6.
- Mahanum. (2021). Tinjauan Kepustakaan. *ALACRITY: Journal Of Education*, 12.

- Meisy M. P. Bidara, W. F. (2022). Strategi Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Talawid Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro). *POLITICO Jurnal Ilmu Politik*, 5.
- Muhammad Hafidz Al Hikam, D. R. (2024). Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Gabungan Kelompok Tani (gapoktan) di Desa Gedangan, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik. *PRAJA Observer : Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 7.
- Ngiso Bhae, J. N. (2021). Potensi dan Permasalahan Sektor Pertanian dan Peternakan di Kecamatan Golewa Barat. *Rekasatwa*, 11.
- Patilaiya, J. S. (2022). *Pemberdayaan Masyarakat*. Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Padang Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022.
- Pakpahan, S. K. (2023). Konsep Pemberdayaan Masyarakat . In S. K. Helena Pakpahan, *Konsep Pemberdayaan Masyarakat* (p. 168). Jl. Air Paku No.29 RSUD Rasidin, Kel. Sungai Sapih, Kec Kuranji Kota Padang Sumatera Barat : CV HEI PUBLISHING INDONESIA Nomor IKAPI 043/SBA/2023.
- Peraturan, D. (2020, Januari 21). *peraturan.bpk.go.id/Details/137218/pergub-no-2-tahun2020*. Retrieved from google.com: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/137218/pergub-no-2-tahun-2020>
- Rosmalah, H. N. (2023). Strategi Pemberdayaan Petani Ladang di Kabupaten Konawe Kepulauan. *Agribisnis, Komunitas, Pertanian.*, 8.
- Raintung, S. S. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Governance* , 9.
- Rustriningsih, s. s. (2022). Pemberdayaan Kelompok Tani dalam Meningkatkan Hasil Panen Padi di Dusun Kaloang, Desa Lerang, Sulawesi Selatan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 7.
- Sugiarno, N. Y. (2024). Peran Pemerintah Desa dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Sri Bintang Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintang Tahun 2022. *Journal of Government Science (Govsci): Jurnal Ilmu Pemerintahan.*, 15.
- Sopannah, R. K. (2023). *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Desa (PAD) Berbasis Kearifan Lokal*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Salu, R. G. (2022). Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Salak Di Desa Pangu Kecamatan Ratahan Timur. *Jurnal Governance*, 13.

- Safarudin, Z. M. (2023). Penelitian Kualitatif. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 15.
- Sabani, F. (2025). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Ketahanan Pangan melalui Agrowisata Petik Melon. *uinsaizu.ac.id*, 105.
- Steventong, B. (2023). *Strategi Pemerintah Desa Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Long Bila, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara*. Yogyakarta.
- Sugiman. (2018). Pemerintah Desa. *Binamulia Hukum* , 14.
- Silvia, D. A. (2023). Peran Pemerintah Desa dalam Mendukung Kellompok Bina Tani di Desa Ajuen Kecamatan Peukan Bada. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8.
- Wibowo, S. M. (2020). Pemberdayaan Kelompok Tani, Bagian Strategi Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Tani. *Artikel Pertanian* , 2.
- Widjaja, H. (2010). *Otonomi Desa*. Jakarta: PT.Rja Grafindo Persada.
- Yunanto, S. E. (2021). Goverment Making : Membuat Ulang Ilmu Pemerintahan. *Jurnal Ilmu Pemerintah Semesta* , 19.

#### **Peraturan Perundang-Undangan :**

- Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2013
- Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 237/Kpst/ot.160/4/2007
- Peraturan Kementrian Pertanian Nomor 82 Tahun 2013
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Nomor 2 Tahun 2020



**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"**  
**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**  
**STATUS TERAKREDITAS A (SK BAN-PT No.3295/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020)**

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775 Fax. (0274) 515989

Nomor : 10/PEM/J/III/2025

Hal : Penunjukan Dosen  
Pembimbingan Skripsi

K e p a d a :

Dr. Rumsari Hadi Sumarto, S.I.P., M.P.A

Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD"

di Yogyakarta.

Sehubungan dengan pembimbingan Skripsi, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi Dosen Pembimbing mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Indah Marlian Gloria Konda Tana  
No. Mahasiswa : 21520154  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Tanggal Acc Judul : 7 Maret 2025

Demikian, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 17 Maret 2025  
Ketua Program Studi  
  
Dr. Gregorius Sahdan, M.A.

Sumber: Prodi Ilmu Pemerintahan



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  
YOGYAKARTA  
Akreditasi Institusi B**

• PROGRAM STUDI SARJANA S-1 PEMERINTAHAN  
• PROGRAM STUDI SARJANA S-1 ILMU KOMUNIKASI  
• PROGRAM STUDI SARJANA S-1 ILMU HUKUM

• PROGRAM STUDI SARJANA S-1 ILMU KEMAHIRUAN  
• PROGRAM STUDI SARJANA S-1 ILMU KEMAS  
• PROGRAM STUDI SARJANA S-1 ILMU KEMAS

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : [www.apmd.ac.id](http://www.apmd.ac.id), e-mail : [info@apmd.ac.id](mailto:info@apmd.ac.id)

**SURAT TUGAS**  
Nomor : 192/I/I/2025

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama : Indah Marlian Gloria Konda Tana  
Nomor Mahasiswa : 21520154  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.  
Jenjang : Sarjana (S-1).  
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.  
a. Tempat : Kalurahan Pacarejo, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul  
b. Sasaran : Strategi Pemerintah Kalurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat  
c. Waktu : 1 Bulan

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 3 Juni 2025

Ketua  
  
Dr. Sutoro Eko Yunanto  
NID. 170 230 190

**PERHATIAN :**

Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

**MENGETAHUI :**

Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian.

Sumber: Prodi Ilmu Pemerintahan



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA**  
**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"**  
**YOGYAKARTA**  
**Akreditasi Institusi B**

• PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMATEKA, STATUS TERAKREDITASI B  
• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SUSAHA, PROGRAM KUTIPANA, STATUS TERAKREDITASI BAK SEKOLAH

• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI BAK SEKOLAH  
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI BAK SEKOLAH  
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, STATUS TERAKREDITASI BAK SEKOLAH

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : [www.apmd.ac.id](http://www.apmd.ac.id), e-mail : [info@apmd.ac.id](mailto:info@apmd.ac.id)

Nomor : 336/I/U/2025

Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :  
Lurah Pacarejo, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul  
Di tempat.

Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana ( S1 ) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan dalam waktu 1 bulan. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi yang hasilnya akan diperhitungkan untuk penelitian dalam kemampuan Studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :

Nama : Indah Marlian Gloria Konda Tana  
No Mhs : 21520154  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Judul Skripsi : Strategi Pemerintah Kalurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat  
Tempat : Kalurahan Pacarejo, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul  
Dosen Pembimbing : Dr. Rumsari Hadi Sumarto, S.I.P., M.P.A

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan kesediaan Bapak/ Ibu untuk berkenan memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 3 Juni 2025

Ketua

Dr. Sutoro Eko Yunanto  
NIP. 170 230 190



KABUPATEN  
GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON SEMANU  
**PEMERINTAH KALURAHAN PACAREJO**

*ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ꧀ꦏꦏꦤꦺꦴꦤ꧀ꦱꦼꦩꦤꦸꦤ꧀ꦥꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦥꦕꦏꦺꦴꦗꦺ*

: Kuwon lor, Pacarejo, Semanu, Gunungkidul Kode  
Pos 55893

Pacarejo, 12 Juni 2025

Nomor : 470/73/VI/2025

Sifat :

Biasa

Lampiran : 1

(satu) lembar

Hal : Izin Lokasi Penelitian

Menindak lanjuti surat dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “ APMD “ Nomor 336/1/1.1/2025 Perihal Permohonan ijin penelitian Tertanggal 3 Juni 2025 bersama ini Lurah Pacarejo Kapanewon Semanu Kabupaten Gunungkidul D.I. Yogyakarta memberikan izin kepada mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Indah Marlin Gloria Konda Tana

No MHS 21520154

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Untuk dapat melaksanakan penelitian di Kalurahan Pacarejo Kapanewon Semanu Kabupaten Gunungkidul di Gapoktan Sembada Kalurahan Pacarejo. Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

LURAH PACAREJO,



Sertifikat Elektronik diterbitkan oleh BSE

**SUHADI**

Sumber: Kantor Kalurahan Guwosari

### **Interview Guide (Panduan Wawancara)**

#### **A. Identitas Informan**

Nama :  
Usia :  
Jenis Kelamin :  
Pekerjaan :  
Tingkat Pendidikan :  
Tanggal Wawancara :

#### **B. Daftar Pertanyaan**

##### **1. Daftar pertanyaan untuk kelompok tani**

- 1) Apakah kelompok tani pernah mendapatkan bantuan langsung dari Pemerintah Kalurahan, seperti alat, bibit, pupuk, atau uang?
- 2) Menurut bapak/ibu, apakah pemerintah sudah sering turun langsung dalam membantu kelompok tani agar lebih maju?
- 3) Saat panen gagal atau harga jual turun, apakah pemerintah pernah membantu atau memberi solusi?
- 4) Jika ada hama atau cuaca buruk, apa pemerintah memberi pelatihan atau bantuan agar petani tidak mengalami kerugian yang cukup besar?
- 5) Apakah pemerintah pernah memberi pelatihan atau bimbingan agar hasil tani bisa bersaing dengan kelompok tani lain?
- 6) Apakah kelompok tani pernah dibantu untuk menjual hasil tani ke pasar yang lebih luas, misalnya ke kota atau ke luar daerah?
- 7) Apakah pemerintah pernah mengenalkan cara baru dalam bertani, seperti teknologi atau cara menanam yang lebih modern?
- 8) Apa kelompok tani pernah diajak buat produk baru dari hasil pertanian (misalnya olahan makanan) atau cara jualan yang lebih modern?



- 9) Apakah pemerintah pernah memberi penyuluhan atau pengarahan untuk mencegah masalah yang sering terjadi, seperti gagal panen atau salah dalam mengelola uang?
- 10) Apakah kelompok tani pernah diajak berdiskusi oleh pemerintah untuk bersiap-siap dalam menghadapi tantangan ke depan, seperti perubahan cuaca atau persaingan harga?

## **2. Daftar pertanyaan untuk Pemerintah Kalurahan**

- 1) Apa saja bantuan yang pernah diberikan oleh Pemerintah Kalurahan secara langsung kepada kelompok tani, seperti alat, bibit, atau dana usaha?
- 2) Apakah Pemerintah Kalurahan secara rutin mengadakan program untuk mendorong kelompok tani agar lebih berkembang?
- 3) Apa langkah yang diambil pemerintah desa jika kelompok tani mengalami gagal panen atau harga jual hasil tani turun?
- 4) Apakah Pemerintah Kalurahan memiliki cadangan bantuan atau program darurat untuk kelompok tani saat menghadapi bencana atau hama?
- 5) Apakah Pemerintah Kalurahan pernah membantu kelompok tani agar bisa memasarkan hasil taninya keluar desa atau kota?
- 6) Apakah ada pelatihan atau pendampingan yang bertujuan agar kelompok tani bisa menghasilkan produk yang lebih unggul?
- 7) Apakah Pemerintah Kalurahan pernah memperkenalkan teknologi baru, sistem pertanian modern, atau cara baru dalam mengolah hasil tani?
- 8) Bagaimana dukungan Pemerintah Kalurahan dalam mendorong kelompok tani untuk membuat produk olahan atau menggunakan media sosial untuk pemasaran?
- 9) Apakah Pemerintah Kalurahan melakukan penyuluhan atau sosialisasi rutin agar kelompok tani bisa menghindari masalah seperti gagal panen atau konflik dalam kelompok?

10) Bagaimana cara Pemerintah Kabupaten mempersiapkan kelompok tani untuk menghadapi tantangan di masa depan seperti perubahan cuaca, perubahan pasar, atau penurunan minat bertani?

## DOKUMENTASI

Wawancara Bersama Pak Suhadi  
selaku Lurah Kalurahan Pacarejo,  
20 Juni 2025



Sumber : Dokumentasi Peneliti

Wawancara bersama Pak Sudiyatna Selaku PPL  
Kapanewon Semanu, 23 Juni 2025



Sumber : Dokumentasi Peneliti

Wawancara bersama Pak  
Sukiman selaku Ketua Gapoktan  
dan Ketua Bamuskal Kalurahan  
Pacarejo, 20 Juni 2025



Sumber : Dokumentasi Peneliti

Wawancara bersama Pak Wartoyo selaku  
Ketua Kelompok Tani di Padukuhan  
Serpeng Lor, 20 Juni 2025



Sumber : Dokumentasi Peneliti

Wawancara bersama Pak Tarip  
selaku Ketua Kelompok Tani di  
Padukuhan Pacing Kidul, 20 Juni  
2025



Sumber : Dokumentasi Peneliti

Wawancara bersama Ibu Watini selaku  
Ketua KWT dan Ibu Yatina, Ibu Yatini,  
Ibu Denik selaku anggota KWT di  
Padukuhan Jasem Kidul, 17 Juli 2025



Sumber Dokumentasi Peneliti



Wawancara bersama Ibu Wabiyem selaku Ketua KWT di Padukuhan Dengok Lor, 17 Juli 2025



Sumber : Dokumentasi Peneliti

Bersama Pak Suhari saat mengambil data Profil Kalurahan Pacarejo, 24 Juni 2025



Sumber : Dokumentasi Peneliti

Salah satu bantuan sumur bor yang berada di Padukuhan Dengok Lor, 17 Juli 2025



Sumber : Dokumentasi Peneliti

Lahan pertanian warga yang di tanami sayur lokasi di Padukuhan Dengok Lor, 17 Juli 2025



Sumber : Dokumentasi Peneliti

Lahan Demplot yang merupakan bantuan dari Pemerintah Kalurahan Pacarejo berlokasi di Padukuhan Dengok Lor, 17 Juli 2025



Sumber : Dokumentasi Peneliti

Pertemuan Rutin setiap bulan  
10 Juli 2025



Sumber : Dokumen Milik Gapoktan